

**ANALISIS PENGARUH AGLOMERASI SEKTOR INDUSTRI  
PENGOLAHAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

**Fitri Yuni Lestari  
NPM 1920051006**



**PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### ANALISIS PENGARUH AGLOMERASI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

**Fitri Yuni Lestari**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) aglomerasi sektor industri pengolahan; (2) pola dan struktur pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan daerah; (3) hubungan aglomerasi sektor industri pengolahan terhadap nilai tambah dan urbanisasi penduduk; dan (4) pengaruh langsung dan tidak langsung aglomerasi sektor industri pengolahan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Data yang digunakan adalah data panel dengan data sekunder time series dan data cross section periode 2016 – 2020. Penelitian dilakukan di Provinsi Lampung pada 15 kabupaten/kota.. Indeks Balassa digunakan untuk menjawab tujuan pertama. Tujuan ke dua menggunakan analisis *location quotient dan shift share analysis, indeks williamson*, dan *entropy theil*. Analisis korelasi digunakan untuk menjawab tujuan ke tiga; serta untuk menjawab tujuan ke empat menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Aglomerasi sektor industri pengolahan di Provinsi Lampung tahun 2012-2020 termasuk kategori lemah; (2) Pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung menunjukkan pertumbuhan ekonomi cepat dan berdaya saing kuat pada (Kabupaten Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Tanggamus, Pesawaran, dan Pantai Barat), dan pertumbuhan ekonomi cepat namun daya saing lemah (Kota B. Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Way Kanan, dan Pringsewu. Ketimpangan pendapatan Provinsi Lampung menunjukkan ketimpangan rendah, (3) aglomerasi sektor industri pengolahan tidak memiliki hubungan yang erat terhadap nilai tambah sektor industri pengolahan, sedangkan berkorelasi sedang dengan urbanisasi penduduk; (4) Secara langsung aglomerasi sektor industri pengolahan memiliki pengaruh yang lemah terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Kata kunci : Aglomerasi, analisis jalur, ketimpangan antar wilayah, *shift share*

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE EFFECT OF AGGLOMERATION OF THE PROCESSING INDUSTRY SECTOR ON INCOME INEQUALITY AND ECONOMIC GROWTH IN LAMPUNG PROVINCE**

**By**

**Fitri Yuni Lestari**

*This study aims to analyze (1) the agglomeration of the manufacturing industry sector; (2) patterns and structures of economic growth and regional income inequality; (3) the agglomeration relationship of the manufacturing industry sector to value added and population urbanization; and (4) the direct and indirect influence of the agglomeration of the manufacturing sector on income inequality and economic growth in Lampung Province. The data used is panel data with for the 2016 – 2020 time period. The research was conducted in Lampung Province in 15 districts/cities. The reply index is used to answer the first objective. The second objective uses location quotient and shift share analysis, index williamson and entropy theil analysis. Correlation analysis is used to answer the third objective; and to answer the fourth objective using path analysis. The results show that (1) the agglomeration of the manufacturing industry sector in Lampung Province in 2012-2020 is in the weak category; (2) The pattern and structure of economic growth in Lampung Province shows fast economic growth and strong competitiveness (Regencies of North Lampung, West Lampung, Central Lampung, Tulang Bawang, West Tulang Bawang, Mesuji, Tanggamus, Pesawaran, and West Coast), and fast economic growth but weak competitiveness (City B. Lampung, City of Metro, Regency of South Lampung, East Lampung, Way Kanan, and Pringsewu). Income inequality in Lampung Province shows low inequality, (3) the agglomeration of the manufacturing industry sector does not have a close relationship with the added value of the manufacturing industry sector, while it is moderately correlated with population urbanization; (4) Directly the agglomeration of the manufacturing industry sector has a weak influence on income inequality and economic growth in Lampung Province.*

*Key words: Agglomeration, inequality between regions, path analysis, shift share*

**ANALISIS PENGARUH AGLOMERASI SEKTOR INDUSTRI  
PENGOLAHAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN  
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

**Fitri Yuni Lestari**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

Pada

Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota  
Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Tesis : **ANALISIS PENGARUH AGLOMERASI  
SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN  
TERHADAP KETIMPANGAN  
PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN  
EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : Fitri Yuni Lestari

Nomor Pokok Mahasiswa : 1920051006

Program Studi : Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Pascasarjana Multidisiplin



1. Komisi Pembimbing

**Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.**  
NIP: 19640724 198902 1 002

**Dr. Ir. R. Hanung Ismono, M.P.**  
NIP: 19620623 198603 1 003

2. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota  
Universitas Lampung

**Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si**  
NIP: 19640724 198902 1 002

**MENGESAHKAN**

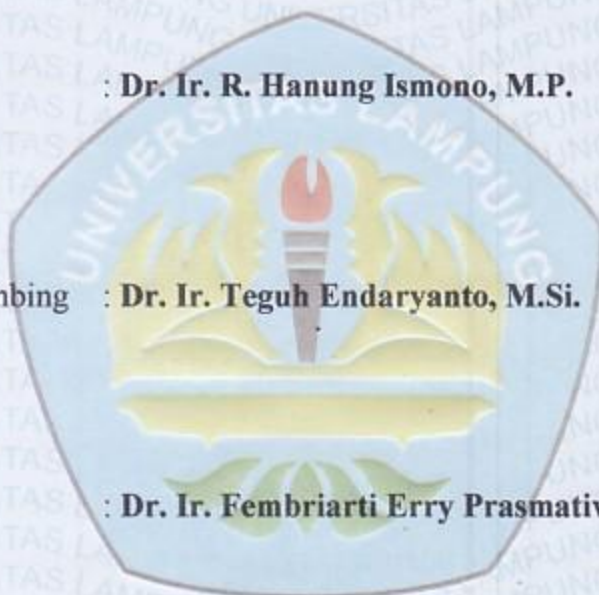
1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.**

Sekretaris : **Dr. Ir. R. Hanung Ismono, M.P.**

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Dr. Ir. Teguh Endaryanto, M.Si.**

Anggota : **Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.P.**



A handwritten signature in black ink, corresponding to the name of the Chairman of the Exam Team.

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name of the member of the Exam Team.

2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



**Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**  
NIP: 19710415 199803 1 005

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name of the Dean of Postgraduate Studies.

Tanggal Lulus Ujian Tesis: **18 Mei 2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Tesis dengan judul: **“ANALISIS PENGARUH AGLOMERASI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



  
Fitri Yuni Lestari  
NPM 1920051006

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Klaten pada tanggal 19 Februari 1995, merupakan putri tunggal dari pasangan Bapak Sutino dan Ibu Suratmi. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Kali Balau Kencana tahun 2001, lulus pada tahun 2007. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Bandar Lampung lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA N 2 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2013. Penulis diterima pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada tahun 2013 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Penulis kembali meneruskan pendidikan Pascasarjana pada tahun 2019 dengan memperoleh pada Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Lampung. Selama perkuliahan penulis pernah menjadi Asisten Peneliti pada penelitian Dimensi Sosial Ekonomi Penanaman Kembali (*Replanting*) Kelapa Sawit Menuju Pengusahaan Sawit Berkelanjutan di Provinsi Lampung tahun 2019, dan pada penelitian "*Coffee Smallholders: Challenges for Sustainable Value Chains in the Buffer Zones of Bukit Barisan Selatan (BBS) National Park, Lampung-Indonesia*" tahun 2020. Penulis juga pernah menjadi enumerator dalam penelitian "*Alternative Income of Small-Scale Gold Mining in Pesawaran, Lampung*" tahun 2020.



## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dan segala nikmat-Nya, kupersembahkan karya kecil ini kepada

Kedua orang tuaku tercinta, **Ibu Suratmi** dan **Bapak Sutino**,  
“Terima kasih atas semesta kasih sayang dan pengorbanan selama ini, serta doa yang selalu dipanjatkan untukku”

## SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Aglomerasi Sektor Industri Pengolahan Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung”** dengan baik.

Selama penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, nasihat, dorongan semangat, doa serta saran yang membangun kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota, serta sebagai Pembimbing Pertama, yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, saran, pengarahan, motivasi, dan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tesis.
4. Bapak Dr. Ir. R. Hanung Ismono, M.P., sebagai Pembimbing Kedua, yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, saran, pengarahan, motivasi, dan semangat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Ir. Teguh Endaryanto, M.Si., sebagai Pembahas Pertama atas saran, kritik, dan arahan yang diberikan untuk perbaikan tesis ini
6. Ibu Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.P., sebagai Pembahas Kedua atas saran, kritik, dan arahan yang diberikan untuk perbaikan tesis ini.
7. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Pascasarjana Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan

pengalaman selama penulis menjadi mahasiswa, serta staf/karyawan yang memberikan bantuan dan kerjasamanya selama ini.

8. Keluargaku tercinta, Bapak Sutino dan Mamak Suratmi, serta keluarga besar penulis yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat, bantuan moril dan materil, serta doa sampai penulis menyelesaikan tesis ini.
9. Rizki Rahmadani, S.P., yang menemani, memberikan support, arahan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat penulis Sarah, Fitria Kusuma Astuti, S.P., Ade Aktanotaria, S.H.,S.P., Arienda Mustikawati, S.P., dan Hesti Permata Sari, S.P., M.P., atas kebersamaan, dukungan, dan persahabatan selama ini kepada penulis.
11. WAG yang besok dibubarin Dian Rahmalia, S.P.,M.Si., Tika Leony Putri, S.P., M.Si., Ririn Aristiyani, S.P., M.P., Ibrohim Saputra, S.P. dan Fauzi Nur Dewangga, S.P., MPWK atas kebersamaan, dukungan, dan persahabatan selama ini kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Anitha Andarrini. T., S.P., Wardiah Nurul K.S.P., Haryadi S.P., Rika Agustina, S.P., dan Yolanda, S.P atas semangat berjuang dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini.
13. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis hingga terselesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas atas semua kebaikan Bapak/Ibu, dan memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang telah diberikan oleh saudara-saudari sekalian. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna, namun semoga skripsi ini tetap dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Bandar Lampung, 18 Mei 2022

Penulis,

*Fitri Yuni Lestari*

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU, DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Pustaka .....	10
1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi .....	10
a. Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	13
b. Teori Basis Ekonomi ( <i>Economic Base Theory</i> ).....	14
c. Teori Pusat/Kutub Pertumbuhan.....	15
d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.....	17
2. Ketimpangan Pendapatan.....	18
a. Pengertian Ketimpangan Pendapatan.....	19
b. Penyebab Ketimpangan Pendapatan .....	22
c. Perhitungan Ketimpangan Pendapatan .....	23
3. Konsep Aglomerasi.....	25
a. Teori Aglomerasi .....	27
b. Manfaat Aglomerasi.....	29
c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aglomerasi .....	34
d. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Aglomerasi .....	34
e. Hubungan Ketimpangan dan Aglomerasi .....	35
f. Urbanisasi dan Aglomerasi .....	36
4. Nilai Tambah ( <i>added value</i> ) .....	40
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	41
C. Kerangka Pemikiran .....	53
D. Hipotesis Penelitian .....	58
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional.....	59

B.	Jenis dan Sumber Data .....	60
C.	Metode Analisis Data .....	61
1.	Analisis Aglomerasi Industri .....	61
2.	Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi.....	62
a.	Analisis <i>Location Quotient (LQ)</i> .....	62
b.	Analisis <i>Shift Share</i> .....	63
4.	Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah .....	66
a.	Indeks <i>Williamson</i> .....	66
b.	Indeks <i>Entropy Theil</i> .....	67
5.	Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> ).....	69
a.	Uji Asumsi Klasik.....	69
b.	Pengujian Hipotesis .....	70
c.	Uji Hubungan Antar Variabel.....	71
d.	Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> ).....	72
<b>IV.</b>	<b>GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>75</b>
A.	Gambaran Umum Provinsi Lampung.....	75
1.	Kondisi Fisik Daerah .....	75
2.	Kondisi Demografi Provinsi Lampung .....	77
3.	Kondisi Perekonomian Provinsi Lampung .....	78
4.	Potensi Pengembangan Wilayah.....	86
<b>V.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>89</b>
A.	Aglomerasi Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Lampung .....	90
B.	Menganalisis Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Daerah Di Provinsi Lampung .....	97
1.	Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung.....	97
a.	Pertumbuhan cepat dan daya saing kuat .....	102
1)	Kabupaten Lampung Utara .....	102
2)	Kabupaten Lampung Barat .....	105
3)	Kabupaten Lampung Tengah .....	107
4)	Kabupaten Tulang Bawang.....	109
5)	Kabupaten Tulang Bawang Barat .....	111
6)	Kabupaten Mesuji .....	113
7)	Kabupaten Tanggamus.....	115
8)	Kabupaten Pesawaran .....	117
9)	Kabupaten Pesisir Barat .....	119
b.	Pertumbuhan cepat, namun berdaya saing lemah .....	122
1)	Kota Bandar Lampung .....	122
2)	Kota Metro .....	124
3)	Kabupaten Lampung Selatan .....	126
4)	Kabupaten Lampung Timur .....	128
5)	Kabupaten Way Kanan .....	130
6)	Kabupaten Pringsewu .....	132
2.	Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah .....	135
C.	Pengaruh Aglomerasi Sektor Industri Pengolahan Terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung .....	141
1.	Analisis Data .....	143

a. Uji Prasyarat.....	143
b. Hubungan antar variabel independen.....	146
2. Analisis Jalur.....	147
a. Pengaruh langsung variabel independen terhadap ketimpangan pendapatan (Y).....	147
b. Pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dan pengaruh tidak langsung melalui variabel perantara (ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung) .....	154
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>163</b>
6.1 Kesimpulan .....	163
6.1 Saran .....	164
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>166</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Kontribusi PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016 – 2020 .....	2
2. Peranan/ <i>share</i> sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor industri pengolahan per kabupaten di Provinsi Lampung (2017-2019).....	4
3. Penelitian terdahulu .....	48
4. Kebutuhan data dan sumber perolehan data penelitian.....	60
5. Kuadran posisi relatif sektoral perekonomian .....	65
6. Interpretasi terhadap koefisien korelasi .....	72
7. Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha ADHK (2010) Provinsi Lampung tahun 2012-2020 (Juta Rupiah) .....	79
8. PDRB ADHK 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2012-2020 (juta rupiah).....	83
9. Hasil analisis <i>shift share</i> Provinsi Lampung tahun 2012 dan 2020 .....	98
10. Hasil analisis <i>shift share</i> Kabupaten Lampung Utara tahun 2012 dan 2020.....	103
11. Hasil analisis <i>shift share</i> Kabupaten Lampung Barat tahun 2012 dan 2020.....	105
12. Hasil analisis <i>shift share</i> Kabupaten Lampung Tengah tahun 2012 dan 2020.....	107
13. Hasil analisis <i>shift share</i> Kabupaten Tulang Bawang tahun 2012 dan 2020.....	110
14. Hasil analisis <i>shift share</i> Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2012 dan 2020.....	111
15. Hasil analisis <i>shift share</i> Kabupaten Mesuji tahun 2012 dan 2020 .....	113
16. Hasil analisis <i>shift share</i> Kabupaten Tanggamus tahun 2012 dan 2020....	115

17.	Hasil analisis <i>shift share</i> Kabupaten Pesawaran tahun 2012 dan 2020 .....	117
18.	Hasil analisis <i>shift share</i> Kabupaten Pesisir Barat tahun 2012 dan 2020 ..	119
19.	Hasil analisis <i>shift share</i> dan <i>location quotient</i> pada sembilan kabupaten/kota dengan pola pertumbuhan cepat, daya saing kuat .....	121
20.	Hasil analisis <i>shift share</i> Kota Bandar Lampung tahun 2012 dan 2020 ....	123
21.	Hasil analisis <i>shift share</i> Kota Metro tahun 2012 dan 2020 .....	125
22.	Hasil analisis <i>shift share</i> Kabupaten Lampung Selatan tahun 2012 dan 2020.....	127
23.	Hasil analisis <i>shift share</i> Kabupaten Lampung Timur tahun 2012 dan 2020.....	129
24.	Hasil analisis <i>shift share</i> Kabupaten Way Kanan tahun 2012 dan 2020 ...	131
25.	Hasil analisis <i>shift share</i> Kabupaten Pringsewu tahun 2012 dan 2020 .....	133
26.	Hasil analisis <i>shift share</i> dan <i>location quotient</i> pada sembilan kabupaten/kota dengan pola pertumbuhan cepat, daya saing lemah .....	134
27.	<i>Indeks entrophy theil</i> 15 kabupaten/kota tahun 2012-2020 .....	137
28.	Hasil uji heterokedastisitas struktur persamaan pertama .....	144
29.	Hasil uji heterokedastisitas struktur persamaan kedua .....	144
30.	Hasil uji <i>person correlation</i> stuktur persamaan pertama .....	145
31.	Hasil uji <i>person correlation</i> stuktur persamaan kedua .....	145
32.	Hasil uji kolinearitas masing-masing variabel independen.....	146
33.	Hasil analisis pengaruh variabel independen terhadap variabel perantara ketimpangan pendapatan (Y) .....	148
34.	Pengaruh langsung variabel aglomerasi industri, jumlah industri, jumlah penduduk, nilai tambah industri pengolahan, dan urbanisasi penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung .....	148
35.	Hasil analisis pengaruh variabel independen terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung (Z).....	154
36.	Besaran pengaruh langsung dan tidak langsung masing-masing variabel terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung .....	155



## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Diagram alir analisis pengaruh aglomerasi sektor industri pengolahan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Lampung .....	57
2.	Diagram jalur penelitian .....	73
3	Peta administrasi kabupaten/kota Provinsi Lampung.....	76
4.	Persentase luas wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2020 .....	76
5.	Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung tahun 2012-2020.....	78
6.	Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2012-2020.....	79
7.	Kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB di Provinsi Lampung tahun 2012-2020 .....	80
8.	Laju pertumbuhan sektor lapangan usaha terbesar di Provinsi Lampung tahun 2012-2020 .....	81
9.	Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Lampung didasarkan pada tiga sektor lapangan usaha terbesar tahun 2012-2020.....	84
10.	Pertumbuhan tenaga kerja di Provinsi Lampung dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir (2012-2020).....	91
11.	Rata-rata <i>share</i> /peranan tenaga kerja sektor industri di Kabupaten/Kota terhadap total tenaga kerja sektor industri Provinsi Lampung tahun 2012-2020 (%).....	92
12.	Sebaran rata-rata indeks ballasa di Provinsi Lampung tahun 2012-2020 ..	94
13.	Serapan tenaga kerja sektor industri pengolahan di Provinsi Lampung .....	95
14.	Bentuk grafis posisi masing-masing sektor ekonomi di Provinsi Lampung dalam kuadran <i>shift share</i> tahun 2012 dan 2020 .....	101
15 .	Bentuk grafis posisi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam kuadran <i>shift share</i> tahun 2012 dan 2020 .....	102
16 .	Ketimpangan pendapatan Provinsi Lampung tahun 2012-2020 .....	135
17 .	Kontribusi ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung .....	136

18.	Rata-rata indeks <i>entropy theil</i> masing-masing sektor di Provinsi Lampung tahun 2012-2020.....	139
19 .	Sektor penyumbang ketimpangan masing-masing kab/kota .....	140
20:	Model struktur persamaan pengaruh langsung variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung diagram jalur penelitian ....	156
21.	Pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung .....	156
22 .	Diagram jalur penelitian dengan keseluruhan struktur persamaan.....	162

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan dikatakan sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, adanya pengurangan ketimpangan, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Sukirno (2000) mengatakan bahwa pembangunan yakni rangkaian gerak perubahan menuju ke arah kemajuan yang dapat diartikan kegiatan dan rangkaian usaha yang bertujuan mencapai keadaan lepas landas, atau keadaan yang penuh dengan dorongan kematangan. Kemajuan pembangunan ekonomi disuatu wilayah akan memperlancar proses pertumbuhan daerah ke arah yang lebih maju.

Pembangunan ekonomi disuatu daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai sektor, salah satunya sektor pertanian. Sektor pertanian masih menjadi penggerak dalam pembangunan (*engine of growth*) dari segi penyedia bahan baku, penyedia bahan pangan, kesempatan kerja, serta sebagai daya beli bagi produk yang dihasilkan oleh sektor lain. Tercatat kontribusi sektor pertanian di tingkat nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal II 2020 menjadi 15,46 persen. Angka tersebut naik dari kontribusi pada kuartal II 2019, yakni 13,57 persen (Badan Pusat Statistik, 2020). Menurut Ningsih (2010) perkembangan sektor pertanian yang kuat dilihat dari sisi penawaran maupun permintaan dapat mendukung pembangunan ekonomi suatu daerah. Pembangunan yang dilakukan memfokuskan terhadap sektor ekonomi atau pada lokasi yang dinilai strategis. Hal tersebut dapat mempengaruhi sektor lain yang memiliki hubungan dengan fokus pembangunan di suatu sektor ekonomi (Potro, 2011). Penetapan daerah sentra dalam pengembangan komoditas pertanian merupakan salah satu sistem ekonomi komparatif yang diartikan sebagai tatanan perekonomian berbasis lokal, dan berorientasi kepada masyarakat (Eriyatno, 2011).

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi PDRB Provinsi Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan rata-rata sebesar 30,45 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020). Kontribusi PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kontribusi PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016 – 2020

	LAPANGAN USAHA/ <i>INDUSTRY</i>	2016	2017	2018	2019	2020
A	<b>Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</b>	<b>31,81</b>	<b>31,05</b>	<b>30,19</b>	<b>29,28</b>	<b>29,91</b>
B	Pertambangan dan Pengalihan	5,97	5,95	5,79	5,65	5,54
C	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>17,60</b>	<b>17,73</b>	<b>18,01</b>	<b>18,41</b>	<b>17,74</b>
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,17	0,17	0,18	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10
F	Konstruksi	8,91	9,29	9,64	9,78	9,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,00	11,93	12,04	12,27	11,81
H	Transportasi dan Pergudangan	4,99	5,04	5,09	5,16	4,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,34	1,36	1,40	1,44	1,37
J	Informasi dan Komunikasi	4,20	4,41	4,54	4,66	5,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,14	2,12	2,06	2,02	2,11
L	Real Estat	3,05	3,09	3,10	3,11	3,09
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,06	3,05	3,05	3,04	3,23
P	Jasa Pendidikan	2,74	2,73	2,80	2,87	3,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,96	0,97	0,97	0,98	1,10
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,86	0,87	0,90	0,92	0,89

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2020

Konsep pembangunan ekonomi sering dikaitkan juga dengan keberhasilan industrialisasi yang makin berkembang. Pembangunan ekonomi tersebut memiliki titik berat pada sektor pertanian dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor industri. Keseimbangan tersebut memberikan dampak terhadap total produktivitas, serapan tenaga kerja, distribusi pendapatan, serta percepatan pembangunan daerah. Tabel 1 memperlihatkan bahwa rata-rata sebesar 17,90 persen kontribusi sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar ke dua terhadap PDRB di Provinsi Lampung, jika dilihat dari laju pertumbuhan kontribusi ke dua sektor memperlihatkan bahwa

sektor pertanian, perikanan dan kehutanan menunjukkan pertumbuhan yang cenderung lambat dengan rata-rata sebesar 1,59 persen per tahun. Sedangkan sektor industri pengolahan tumbuh secara positif dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 0,19 persen per tahunnya. Kedua sektor memiliki kontribusi pertumbuhan yang fluktuatif terhadap perekonomian Provinsi Lampung. Dominasi sektor pertanian yang besar terhadap kontribusi perekonomian dikarenakan produk pertanian memiliki peranan penting dalam penyediaan bahan pangan dan industri, penyediaan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, ekspor dan devisa negara.

Provinsi Lampung adalah salah satu daerah prioritas pengembangan kawasan industri di Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Hal tersebut juga tertuang dalam RPJMD 2019-2024 bahwa salah satu sasaran pembangunan di Provinsi Lampung yakni meningkatkan pertumbuhan sektor industri daerah berbasis pertanian. Lokasi perindustrian cenderung di dalam dan di sekitar kota yang disebabkan telah tersedianya sarana dan prasarana memadai. Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan industri yakni terdapat pemusatan industri. Pola pemusatan terjadi karena adanya kumpulan jenis industri pada suatu wilayah tertentu, sehingga mengakibatkan timbulnya keuntungan eksternal yaitu aglomerasi. Sejalan dengan Wahyuntari dan Pujianti (2016) menyatakan bahwa aglomerasi muncul ketika kegiatan ekonomi saling berkaitan atau memiliki keterpaduan yang dapat memberikan keuntungan. Terjadinya konsentrasi atau pemusatan kegiatan ekonomi di daerah-daerah setempat menghasilkan manfaat ekonomi yang disebut sebagai ekonomi aglomerasi. Damayanti (2017) mengatakan bahwa kegiatan industri yang terkonsentrasi di wilayah tertentu menciptakan aglomerasi yang membawa pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Perkembangan industri melalui pendekatan aglomerasi dilakukan karena beberapa alasan, yaitu (1) Membantu industri untuk mencapai skala ekonomi yang optimal melalui aglomerasi tersebut; (2) Memudahkan transfer pengetahuan dan teknologi; dan (3) Menciptakan lingkungan yang dapat menumbuhkan inovasi dan kerja sama antar industri (Landiyanto, 2005).

## B. Rumusan Masalah

Perkembangan sektor industri pengolahan yang didukung oleh sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dapat memberi nilai tambah (*added value*) yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Nilai tambah sektor industri pengolahan yang dapat diciptakan yakni nilai tambah sektoral atau vertikal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, dan nilai tambah kewilayahan yang mampu memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat setempat. Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor industri pengolahan masih menjadi dua sektor yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian di Provinsi Lampung. Peranan/*share* sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor industri pengolahan per kabupaten di Provinsi Lampung (2017-2019) dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Peranan/*share* sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor industri pengolahan per kabupaten di Provinsi Lampung (2017-2019)

No	Kabupaten/kota	Peranan/ <i>share</i> (persen)							
		Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan				Sektor industri pengolahan			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Kota Bandar Lampung	2,15	2,11	2,11	2,09	17,94	17,82	17,70	17,86
2	Kota Metro	0,31	0,31	0,31	0,31	1,63	1,61	1,59	1,59
3	Lampung Selatan	11,81	11,76	11,81	11,94	16,40	16,15	15,75	15,77
4	Lampung Utara	8,22	8,20	8,12	8,10	4,77	4,92	5,06	5,06
5	Lampung Barat	3,36	3,35	3,32	3,31	0,47	0,49	0,51	0,51
6	Lampung Tengah	22,10	22,30	22,27	22,37	24,71	24,50	24,64	24,66
7	Lampung Timur	13,93	13,93	13,99	13,95	4,84	5,00	5,08	5,08
8	Way Kanan	4,54	4,54	4,54	4,55	4,68	4,68	4,68	4,52
9	Tulang Bawang	8,23	8,17	8,17	8,18	7,75	7,98	8,28	8,41
10	Tulang Bawang Barat	3,66	3,67	3,64	3,66	5,04	5,07	5,12	5,04
11	Mesuji	4,06	4,08	4,08	4,09	3,53	3,58	3,64	3,65
12	Tanggamus	6,31	6,32	6,38	6,20	1,65	1,62	1,55	1,56
13	Pringsewu	2,57	2,56	2,56	2,56	2,64	2,63	2,55	2,53
14	Pesawaran	6,65	6,60	6,61	6,62	3,57	3,59	3,50	3,46
15	Pesisir Barat	2,09	2,10	2,09	2,08	0,37	0,35	0,32	0,30

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2020.

Tabel 2 memperlihatkan peranan/*share* sektor industri pengolahan dan perubahannya selama periode waktu 2017-2019 di Provinsi Lampung secara rata-rata cenderung naik dengan nilai yang bervariasi. Arahannya rencana kawasan industri yang tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung 2009-2029 memperlihatkan bahwa pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu di lokasi yang berada pada sentra penghasil sumberdaya (bahan baku). Sebagian besar *share* sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan memberikan kontribusi yang cukup besar. Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Lampung Timur memiliki *share* sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang cukup besar terhadap perekonomian Provinsi Lampung dengan rata-rata sebesar 11,83 persen (Tabel 2). Jika dilihat dari *share* sektor industri pengolahan terdapat beberapa kabupaten memiliki *share* yang cukup kecil, namun pada sektor pertanian cukup besar, seperti Kabupaten Lampung Timur yang hanya memiliki rata-rata *share* sektor industri pengolahan sebesar 5,00 persen. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pengolahan produksi yang dilakukan belum sepenuhnya dilakukan di kabupaten/kota sentra produksi melainkan di luar kabupaten/kota sentra produksi. Selain itu, industri-industri pengolahan yang ada di Provinsi Lampung belum mampu menyerap hasil panen melimpah dikarenakan kapasitas produksi pabrik yang masih kecil (RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024).

Perbedaan infrastruktur, sumberdaya, dan peruntukan pembangunan daerah akan mengakibatkan beberapa daerah memiliki kegiatan industri yang lebih besar dan terjadi pengelompokan pada daerah tertentu. Pemusatan kegiatan dalam suatu wilayah akan memberikan keuntungan yakni keuntungan akibat aglomerasi. Sejalan dengan Suparta dan Pratama (2020) menyimpulkan bahwa terdapat dua kecamatan dengan tingkat aglomerasi industri berbasis perikanan tergolong sedang serta 12 kecamatan yang tergolong lemah di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Aglomerasi atau pemusatan kegiatan industri yang terbentuk di suatu daerah memiliki dampak yang positif pertumbuhan ekonomi wilayah.

Kecenderungan pola pemusatan (aglomerasi) industri yang menunjukkan bahwa hal penting terhadap pertumbuhan perekonomian daerah adalah pola pemusatan, dimana terdapat kumpulan berbagai jenis industri pada suatu tempat tertentu yang didukung oleh sumber bahan baku industri (Sihombing, 2008). Damayanti (2017)

mengemukakan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat ketimpangan regional rendah karena memiliki tingkat aglomerasi tinggi, sedangkan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat ketimpangan regional rendah atau hampir sama dengan Jawa Timur. Namun, Provinsi Banten memiliki tingkat ketimpangan regional paling tinggi karena belum teraglomerasinya industri di wilayah tersebut atau tergolong aglomerasi rendah. Teraglomerasinya industri di daerah memiliki dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pada ketimpangan regional yang semakin rendah. Teraglomerasinya industri di kabupaten/kota Provinsi Lampung diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Oleh sebab itu, perlu diketahui tingkat aglomerasi sektor industri pengolahan di Provinsi Lampung.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor industri pengolahan masih menjadi sektor yang mendominasi dalam kontribusi terhadap PDRB di Provinsi Lampung. Amalina dan Asmara (2009) menyatakan bahwa fluktuasi sektor pertanian pada PDRB juga diikuti oleh pertumbuhan ekonomi di sektor industri. Besarnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor industri pengolahan tidak terlepas dari kabupaten/kota yang berkontribusi terhadap perekonomian di Provinsi Lampung. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah di Provinsi Lampung mengakibatkan adanya wilayah yang maju atau aktif dan wilayah yang terbelakang atau pasif. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh kabupaten/kota, hal ini terjadi jika peningkatan pertumbuhan ekonomi disertai dengan kecilnya ketimpangan pendapatan daerah. Menurut Rustiadi, Indraprahasta, dan Mulya (2021) menyebutkan bahwa ketimpangan regional dan aglomerasi masih menjadi isu pembangunan yang relevan terhadap perencanaan pembangunan wilayah.

Perbedaan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat menentukan besar atau kecilnya kontribusi yang di berikan terhadap perekonomian daerah. Badan Pusat Statistik (2020) menyebutkan bahwa secara keseluruhan indeks tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung yakni sebesar 0,329 pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan indeks rata-rata ketimpangan nasional sebesar 0,384. Nilai



tersebut dapat dikategorikan sebagai tingkat ketimpangan pendapatan rendah. Namun dengan tingkat ketimpangan yang rendah jika dilihat dari kontribusi sumbangan dan nilai PDRB masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung cenderung berbeda secara signifikan. Sejalan dengan penelitian Sari, Hidayat, dan Yogie (2017) bahwa tingkat ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung termasuk kategori rendah, namun cenderung meningkat setiap tahunnya. Ketimpangan pendapatan antar wilayah masih menjadi salah satu sasaran pembangunan di Provinsi Lampung (RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024). Pola dan struktur ekonomi yang berbeda dapat memberikan gambaran mengenai potensi sumberdaya dan wilayah aglomerasi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung.

Teraglomerasinya industri pengolahan di Provinsi Lampung akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja di sektor industri. Menurut BPS Provinsi Lampung (2019) laju pertumbuhan sektor industri pengolahan memiliki serapan tenaga kerja lebih besar dibandingkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yakni sebesar 7,82 persen per tahunnya (2017-2019), sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya sebesar 1,06 persen per tahun. Secara umum daerah atau lokasi aglomerasi lebih mengarah terhadap daerah perkotaan, di mana di daerah perkotaan memiliki kelebihan serta potensi dan kemampuan dalam menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan oleh industri yang bersangkutan. Hal tersebut secara tidak langsung akan menyebabkan urbanisasi penduduk atau migrasi penduduk ke daerah aglomerasi industri pengolahan. Sejalan dengan Hadijah (2020) bahwa laju pertumbuhan urbanisasi di Provinsi Lampung masuk dalam kategori tinggi tahun 2018 sebesar  $> 2,73$  persen. Salah satu penyebab tingginya urbanisasi yakni adanya keterbukaan lapangan pekerjaan di sektor industri. Dengan kata lain aglomerasi industri akan menjadi daya penarik terhadap arus urbanisasi atau migrasi karena adanya kebutuhan pasar tenaga kerja di sektor industri. Sejalan dengan Khan, *et al* (2016) yang mengasumsikan bahwa industri-industri yang teraglomerasi di perkotaan akan menarik tenaga kerja dari perkotaan maupun perdesaan. Berdasarkan hal tersebut apakah teraglomerasinya sektor industri pengolahan di Provinsi Lampung dapat mempengaruhi arus

urbanisasi atau migrasi penduduk sebagai dampak terserapnya tenaga kerja industri.

Pengembangan kawasan industri melalui pendekatan aglomerasi industri dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah. Pangestuti (2020) mengatakan bahwa aglomerasi industri secara simultan dan parsial memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur ekonomi terpusat pada Kawasan Gerbangkertosusila. Apabila aglomerasi industri naik, maka ketimpangan ekonomi akan mengalami penurunan. Ketergantungan dalam suplai barang dan tenaga kerja antara wilayah pusat dengan wilayah belakang merupakan akibat dari adanya *trickle down effect*. Pengaruh polarisasi berupa urbanisasi penduduk dapat menyerap tenaga kerja yang terampil dan mengurangi pengangguran di daerah terbelakang (Hirschman, 1958). Apabila daerah perkotaan terspesialisasi pada industri dan daerah pedesaan terspesialisasi pada produksi primer, maka meluasnya permintaan daerah perkotaan harus mendorong perkembangan daerah pedesaan.

Salsabila, Santosa, dan Soeharjoto (2019) mengatakan bahwa daerah akan memiliki dampak eksternalitas dari adanya aglomerasi. Dampak eksternalitas positif pada daerah aglomerasi yakni akan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya dan menurunkan ketimpangan pendapatan antar daerah. Aglomerasi menjelaskan bahwa konsentrasi kegiatan industri secara spasial muncul karena pelaku ekonomi berupaya mendapatkan penghematan aglomerasi baik karena membesarnya skala produksi, penghematan lokasi dan urbanisasi dengan mengambil lokasi yang saling berdekatan satu sama lain. Hal tersebut terjadi karena wilayah yang banyak mempunyai industri pengolahan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang hanya mempunyai sedikit industri pengolahan (Sodik dan Iskandar, 2007). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat keterkaitan aglomerasi sektor industri pengolahan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aglomerasi sektor industri pengolahan di Provinsi Lampung ?

2. Bagaimana pola dan struktur pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan daerah di Provinsi Lampung ?
3. Bagaimana pengaruh aglomerasi sektor industri pengolahan terhadap nilai tambah dan urbanisasi penduduk di Provinsi Lampung ?
4. Bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung aglomerasi sektor industri pengolahan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis aglomerasi sektor industri pengolahan di Provinsi Lampung.
2. Menganalisis pola dan struktur pertumbuhan ekonomi serta ketimpangan pendapatan daerah di Provinsi Lampung.
3. Menganalisis hubungan aglomerasi sektor industri pengolahan terhadap nilai tambah dan urbanisasi penduduk di Provinsi Lampung.
4. Menganalisis pengaruh langsung dan tidak langsung aglomerasi sektor industri pengolahan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan perekonomian daerah melalui pengembangan aglomerasi industri yang didukung oleh kemampuan sumberdaya daerah.
2. Meningkatkan pemahaman mengenai ketimpangan pendapatan daerah, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung sektor unggulan daerah.
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU, DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

### **A. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Konsep Pertumbuhan Ekonomi**

Menurut Sukirno (2000) yang mengatakan bahwa “pertumbuhan ekonomi daerah didefinisikan sebagai peningkatan dalam PDRB dengan tidak melihat ada kenaikan yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk, atau adakah perbedaan di struktur ekonomi yang terjadi atau tidak”. Berbeda dengan Tambunan (2001) menyatakan pembangunan ekonomi di waktu yang panjang mengikuti pertumbuhan pendapatan nasional, akan menyebabkan perbedaan mendasar dalam struktur ekonomi. Adanya kecenderungan atau dapat dilihat sebagai suatu dugaan dimana semakin tinggi pertumbuhan ekonomi rata-rata/tahun membuat semakin cepat pergeseran struktur ekonomi. Hal tersebut diasumsikan bahwa adanya faktor-faktor penentu lainnya yang mendukung, diantaranya tenaga kerja, teknologi, dan bahan baku.

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun (Sukirno, 2000), oleh karena itu untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi perlu adanya perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun yang didasarkan atas harga konstan dan harga berlaku. Perubahan nilai pendapatan nasional hanya dikarenakan adanya suatu perubahan pada tingkat kegiatan ekonomi.

Konsep pertumbuhan ekonomi wilayah menganalisis wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka antar wilayah-wilayah lain melalui laju perpindahan faktor-faktor produksi. Pembangunan di suatu wilayah dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain

yang akan mendukung pembangunan wilayah tersebut. Atau dengan kata lain pembangunan ekonomi dari wilayah lain dapat mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi wilayah yakni peningkatan besarnya variabel ekonomi dari sub sistem spasial dan juga dapat diartikan sebagai kemakmuran suatu wilayah yang meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan produksi di beberapa komoditas yang diperoleh suatu wilayah. Todaro dan Smith (2006), pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas jangka panjang di wilayah yang bersangkutan untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi penduduknya. Peningkatan kapasitas tersebut diasumsikan adanya kemajuan atau perubahan teknologi, institusi, dan ideologi terhadap keadaan saat ini. Perekonomian yang terus berkembang dapat diartikan secara luas dan mencakup perubahan pada susunan ekonomi di masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi umumnya diartikan sebagai proses yang mengakibatkan perubahan pendapatan riil perkapita penduduk yang disertai dengan adanya perbaikan sistem kelembagaan. Terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi yakni:

- a) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- b) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- c) Kemajuan teknologi

Konsep penting dalam pembangunan ekonomi regional yakni konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah ukuran keberhasilan ekonomi yang berasal dari seluruh kegiatan ekonomi. PDRB dijadikan sebagai salah satu indikator dalam melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Jika didefinisikan, PDRB merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh dari seluruh unit ekonomi dalam waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diperoleh dari besaran kenaikan PDRB atas dasar harga konstan, dimana akan memperlihatkan perubahan produksi barang dan jasa dari tahun ke tahun. Terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi menurut Todaro dan Smith (2006), yakni:

- 1) Akumulasi modal mencakup semua investasi dalam bentuk tanah (tanah), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia. Akumulasi modal akan terjadi jika sebagian dari pendapatan saat ini ditabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk meningkatkan output di masa yang akan datang. Investasi juga disertai dengan investasi infrastruktur berupa jalan, listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, fasilitas komunikasi, dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi produktif. Investasi pada sumber daya manusia berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 2) Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja maka semakin produktif angkatan kerja tersebut, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik.
- 3) Kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru teknologi dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam pekerjaan tradisional.

Pembangunan daerah dilakukan untuk mencapai tiga tujuan penting, yaitu mencapai pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan.

- 1) Pertumbuhan, tujuan pertama adalah pertumbuhan ditentukan sejauh mana kelangkaan sumber daya dapat terjadi pada sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya alam dapat dialokasikan secara maksimal dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produktif.
- 2) Pemerataan dalam hal ini berimplikasi pada pencapaian tujuan ketiga, sumber daya yang berkelanjutan tidak boleh hanya terfokus pada satu bidang saja sehingga manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan dapat dinikmati oleh semua pihak dengan pemerataan.
- 3) Berkelanjutan (*sustainability*), sedangkan tujuan pembangunan daerah berkelanjutan harus memenuhi syarat bahwa penggunaan sumber daya baik yang ditransaksikan melalui sistem pasar maupun di luar sistem pasar tidak boleh melebihi kapasitas kemampuan produksi.

### a. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Ada beberapa teori mengenai pertumbuhan ekonomi diantaranya Teori Ekonomi Klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, kemudian Teori Ekonomi Neo Klasik, Teori Schumpeter, dan Teori Harrod-Domar. Berikut penjelasan teori tersebut (Adisasmita, 2013):

- 1) Teori Ekonomi Klasik Adam Smith mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada mekanisme pasar. Mekanisme pasar akan mengatur dan memecahkan masalah sehingga perekonomian dapat berfungsi secara efisien. Jadi, para pelaku kegiatan ekonomi atau masyarakat bebas melakukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah (*Laissez Faire*). Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya pembagian kerja dan spesialisasi karena hal ini akan menyebabkan peningkatan keterampilan tenaga kerja dan efisiensi waktu yang dibutuhkan dalam memproduksi barang.
- 2) Teori Ekonomi Neo-Klasik Teori ini berasumsi bahwa kemajuan teknologi dapat meningkatkan pendapatan nasional, terdapat rasio konstan antara modal dan tenaga kerja dimana perekonomian dapat mengakumulasi modal tanpa menambah tenaga kerja, dan penemuan-penemuan baru dapat menghemat tenaga kerja.
- 3) Teori Schumpeter Schumpeter berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tercipta melalui inisiatif kelompok pengusaha, karena mereka dapat memberikan inovasi dalam proses produksi misalnya, seperti memperkenalkan barang baru, metode baru dalam memproduksi barang, memperluas pasar, melakukan restrukturisasi organisasi, dan sebagainya.
- 4) Teori Harrod-Domar Teori ini menekankan pentingnya akumulasi modal dalam proses pertumbuhan ekonomi, karena akumulasi modal atau investasi dapat menghasilkan pendapatan dan meningkatkan kapasitas produksi. Model Harrod-Domar dapat digunakan untuk menganalisis pertumbuhan regional dengan memperhatikan pergerakan modal dan tenaga kerja. Daerah yang tidak memiliki tingkat tabungan yang tinggi

akan mendatangkan modal dan tenaga kerja dari daerah lain agar pertumbuhannya cepat.

Berdasarkan penjelasan teori tersebut dapat diketahui bahwa banyak hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ekonomi klasik, pertumbuhan ekonomi bergantung pada mekanisme pasar, yaitu para pelaku kegiatan ekonomi dan pentingnya pembagian kerja dan spesialisasi. Pelaku ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi menurut Schumpeter adalah pengusaha. Hal ini dikarenakan wirausahawan mampu memberikan inovasi dalam proses produksinya. Selain itu, hal penting lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut teori ekonomi Neo-Klasik dan Harrod-Domar adalah akumulasi modal yang mampu mengembangkan teknologi baru sehingga terjadi penghematan tenaga kerja dan produksi dapat berjalan lebih efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut beberapa teori tersebut. Hal-hal penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia, akumulasi modal/investasi, dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, diharapkan ada peningkatan dalam hal ini agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dan dapat berdampak pada proses pembangunan.

#### **b. Teori Basis Ekonomi(*Teori Dasar Ekonomi*)**

Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Richardson (2001) yang menyatakan bahwa faktor penentu utama bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah berkaitan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar wilayah (Arsyad, 1999). Pada penjelasan selanjutnya dijelaskan bahwa pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk ekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan lapangan kerja. Asumsi ini memberikan pemahaman bahwa suatu daerah akan memiliki sektor unggulan apabila



daerah tersebut dapat memenangkan persaingan di sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor.

### c. Pusat Pertumbuhan/Teori Kutub

Pusat pertumbuhan dapat berfungsi baik secara fungsional maupun geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah lokasi industri, yaitu lokasi pemusatan kelompok-kelompok usaha atau cabang-cabang industri yang karena sifat hubungannya mempunyai unsur-unsur dinamis sehingga mampu merangsang kegiatan ekonomi baik secara internal maupun eksternal. Secara geografis, pusat pertumbuhan merupakan suatu lokasi yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat atraksi (*pole of Attraction*) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di kawasan tersebut, meskipun tidak ada interaksi antara bisnis ini (Tarigan, 2004). . Ciri-ciri pusat pertumbuhan adalah:

1) Adanya hubungan internal dari berbagai kegiatan.

Hubungan internal dimaksudkan sebagai keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya, sehingga pertumbuhan sektor yang satu akan mempengaruhi sektor lainnya. Hal ini akan menciptakan pertumbuhan yang saling melengkapi dan sinergis untuk mendukung pertumbuhan satu sama lain.

2) Ada efek pengganda

Adanya sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan *multiplier effect*. Jika ada satu sektor yang permintaan dari luar daerah, produksinya meningkat karena ada keterkaitan membuat produksi sektor lain juga meningkat dan akan terjadi beberapa putaran pertumbuhan sehingga total peningkatan produksi bisa beberapa kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu. peningkatan permintaan eksternal untuk sektor itu (sektor pertama yang meningkat). permintaannya). Unsur *multiplier effect* berperan penting dalam membuat kota mampu memacu pertumbuhan di belakangnya. Karena kegiatan beberapa sektor di kota

meningkat tajam, kebutuhan kota akan bahan baku/tenaga kerja yang dipasok dari belakang akan meningkat tajam.

3) Ada konsentrasi geografis

Konsentrasi geografis beberapa sektor atau fasilitas, selain mampu menciptakan efisiensi antar sektor yang membutuhkan, juga meningkatkan daya tarik kota. Orang-orang yang datang ke kota bisa mendapatkan berbagai kebutuhan di lokasi terdekat. Sehingga kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih menghemat waktu, tenaga dan biaya. Hal ini membuat kota ini semakin menarik untuk dikunjungi dan karena meningkatnya volume transaksi maka akan tercipta *skala ekonomi* sehingga dapat menciptakan efisiensi lebih lanjut.

4) Mendorong daerah belakang

Artinya ada hubungan yang harmonis antara kota dengan kawasan di belakangnya. Kota membutuhkan bahan baku dari daerah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan daerah belakangnya untuk dapat mengembangkan dirinya. Kegiatan ekonomi di suatu daerah cenderung menggumpal di sekitar titik pusat (Adisasmita, 2005). Teori kutub pertumbuhan terutama didasarkan pada ekonom Prancis, terutama Perroux, yang berpendapat bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai wilayah pada saat yang bersamaan, tetapi kehadirannya akan muncul di beberapa tempat atau pusat pertumbuhan. (*pemoles pertumbuhan*) dengan intensitas yang berbeda melalui saluran yang berbeda. Ia mengatakan bahwa kota adalah “pusat” sekaligus tiang pertumbuhan. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat, terutama daerah perkotaan, yang disebut sebagai pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda-beda. Perroux mengatakan industri unggulan merupakan penggerak utama dalam pembangunan daerah, keberadaan sektor industri unggulan memungkinkan terjadinya pemusatan industri yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena konsentrasi industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan

industri dalam satu daerah akan mempengaruhi pembangunan daerah lain.

#### **d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan, apabila output yang dihasilkan pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Jhingan (2012) pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

##### 1) Sumber daya alam

Sumber daya alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi perekonomian karena ketersediaan sumber daya alam yang potensial akan menjamin kelancaran pertumbuhan ekonomi. Namun, sumber daya alam yang melimpah saja tidak cukup untuk menopang perekonomian, tetap harus dilengkapi dengan fasilitas pengolahan, pemasaran, transportasi dan sumber daya manusia yang mampu mengolah dan memanfaatkannya.

##### 2) Organisasi

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor-faktor produksi dalam kegiatan ekonomi dan merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi melengkapi modal, tenaga kerja, dan membantu meningkatkan produktivitas. Organisasi juga terkait dengan pengusaha yang tampil sebagai organisator dan berfungsi melakukan reformasi.

##### 3) Akumulasi modal

Akumulasi modal adalah investasi dalam bentuk barang modal yang dapat meningkatkan persediaan modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

##### 4) Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi berkaitan dengan perubahan cara produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi, serta berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. .

5) Pembagian Kerja dan Skala Produksi

Adanya spesialisasi dan pembagian kerja dapat menciptakan peningkatan produktivitas. Pembagian kerja menghasilkan peningkatan kapasitas produktif pekerja, sehingga setiap pekerja menjadi lebih efisien.

6) Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya dapat mengubah pandangan, harapan, dan nilai-nilai sosial. Hal ini dapat dilakukan melalui penyebaran pendidikan dan pengetahuan.

7) Faktor manusia

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada jumlah sumber daya manusia, tetapi lebih menekankan pada efisiensi dan produktivitasnya. Program pelatihan dan pendidikan diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia.

8) Faktor Politik dan Administratif

Struktur politik dan administrasi yang kuat, efisien dan tidak korupsi merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendorong perekonomian juga diperlukan.

## **2. Ketimpangan Pendapatan**

Ketimpangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara si kaya dan si miskin, hal ini tercermin dari perbedaan pendapatan (Baldwin, 1986). Ketimpangan atau disparitas antar wilayah merupakan hal yang lumrah dalam kegiatan perekonomian suatu wilayah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi di setiap wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, di setiap daerah biasanya terdapat istilah daerah maju dan daerah tertinggal (Sjafrizal, 2012).

Penelitian Williamson tahun 1965 menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan disparitas wilayah semakin besar dan pembangunan terkonsentrasi di wilayah tertentu. Pada tahap yang lebih matang, dilihat dari pertumbuhan

ekonomi, terlihat adanya keseimbangan antar daerah yang disparitasnya berkurang secara signifikan. Penyebab tidak meratanya proses pertumbuhan wilayah adalah keunggulan aglomerasi, indivisibility investasi, perbedaan keuntungan sumber daya alam dan distribusi spasial penduduk dan permintaan pasar yang tidak merata. Menurut Sutawijaya (2004) Williamson melakukan langkah dengan menganalisis hubungan antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional di suatu negara.

Menurut Williamson, secara umum ketimpangan regional cenderung membesar selama proses pembangunan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Migrasi penduduk yang produktif dan terampil atau berpendidikan ke daerah yang telah berkembang.
2. Investasi cenderung berlaku di daerah yang sudah berkembang.
3. Kebijakan pemerintah cenderung mengakibatkan pemusatan modal sosial dan ekonomi di daerah-daerah yang telah berkembang karena kebutuhan yang lebih besar.
4. Kurangnya keterkaitan antar pasar regional menciptakan hambatan terhadap efek penyebaran inovasi dan pengganda pendapatan.

#### **a. Pengertian Ketimpangan Pendapatan**

Menurut Kuncoro (2006), ketimpangan mengacu pada taraf hidup yang relatif bagi seluruh masyarakat, karena adanya kesenjangan antar wilayah, yaitu perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini menyebabkan tingkat perkembangan dan distribusi pendapatan di setiap daerah berbeda-beda sehingga menimbulkan kesenjangan atau gap kesejahteraan di berbagai daerah tersebut. Kuznets mengungkapkan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin, cenderung mengarah pada peningkatan kemiskinan dan juga membuat ketimpangan pendapatan semakin tidak merata. Seiring kemajuan negara, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan akan berkurang. (Hutabarat, E, 2016).

Pada tahap awal, ketimpangan pendapatan antara sektor industri modern dan sektor pertanian meningkat pesat namun sebelum kemudian menurun.

Ketimpangan pendapatan cenderung lebih tinggi di daerah dengan sektor industri modern daripada di daerah yang menggunakan sektor pertanian yang relatif tetap (Todaro dan Smith, 2006). Menurut Sjafrizal (2012) ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah merupakan fenomena umum yang terjadi dalam proses pembangunan ekonomi suatu wilayah. Ketimpangan ini pada awalnya disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat di setiap wilayah. Akibatnya, kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga akan berbeda.

Berdasarkan (Wie, 1981) Pertumbuhan ekonomi yang pesat umumnya disertai dengan distribusi pendapatan yang semakin tidak merata. Negara-negara yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, tanpa memperhatikan distribusi pendapatan negaranya akan menciptakan ketimpangan antara lain:

1. Ketimpangan pendapatan antar kelompok atau ketimpangan relatif, biasanya ketimpangan diukur dengan menggunakan koefisien Gini. Meskipun koefisien Gini bukan merupakan koefisien yang ideal untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar berbagai kelompok, setidaknya angka ini dapat memberikan gambaran tentang kecenderungan umum pola distribusi pendapatan.
2. Ketimpangan masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan, ketimpangan distribusi pendapatan juga dapat dilihat dari segi perbedaan pendapatan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan (urban-rural income disparities). Untuk membedakannya, dua indikator pertama digunakan untuk membandingkan tingkat pendapatan di pedesaan dan perkotaan. Kedua, disparitas pendapatan di pedesaan dan perkotaan.
3. Ketimpangan distribusi pendapatan antar daerah. Ketimpangan pendapatan ini disebabkan oleh tidak meratanya distribusi sumber daya alam serta laju pertumbuhan daerah dan tidak efektifnya upaya pemerataan perubahan antar daerah di Indonesia.

Menurut Mubyarto (1995) ketimpangan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Ketimpangan antar sektor yaitu sektor industri dan sektor pertanian
2. Ketimpangan antar daerah, yaitu ketimpangan yang terjadi karena perbedaan sumber daya yang dimiliki
3. Ketimpangan antar kelompok ekonomi, ketimpangan ini sangat mungkin terjadi pada sistem ekonomi yang cenderung liberal atau kapitalis

Todaro dan Smith (2006) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, tetapi pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan membaik. Pengamatan ini dikenal sebagai "Hipotesis U" atau kurva Kuznets "U terbalik", karena perubahan longitudinal (deret waktu) dalam distribusi pendapatan. Hipotesis ini dihasilkan oleh studi empiris yang diambil dari pola pertumbuhan sejumlah negara di dunia, bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terjadi trade-off antara pertumbuhan dan pemerataan. Lambat laun sejalan dengan pertumbuhan pembangunan ekonomi setelah mencapai tahap tertentu ketimpangan akan hilang dan digantikan oleh korelasi positif antara pemerataan dan pertumbuhan. Pola ini muncul karena pada tahap awal pembangunan cenderung lebih terfokus pada sektor modern yang menyerap sedikit tenaga kerja. Sektor modern berkembang pesat meninggalkan sektor tradisional (sektor pertanian). Kesenjangan antara sektor modern dan sektor tradisional menyebabkan ketimpangan. Ketimpangan pendapatan cenderung tinggi karena sebagian besar penduduk masih berpenghasilan rendah, dan sektor modern telah berkembang tanpa perubahan.

Ada dua model pertidaksamaan, yaitu teori menurut Harrod Domar dan teori menurut Neo-klasik. Kedua teori tersebut memberikan peran khusus pada peran modal yang dapat diwakili oleh kegiatan investasi yang ditanamkan di suatu daerah untuk menarik modal ke daerah tersebut. Hal ini jelas akan mempengaruhi kemampuan masing-masing daerah untuk berkembang dan sekaligus akan menimbulkan perbedaan kemampuan dalam menghasilkan pendapatan. Investasi dianggap lebih menguntungkan jika dialokasikan pada daerah yang mampu menghasilkan return yang besar dalam waktu yang

relatif singkat. Mekanisme pasar justru akan menimbulkan ketimpangan, dimana daerah yang relatif maju akan tumbuh lebih cepat sedangkan daerah yang kurang berkembang memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif lambat.

Menurut Myrdal (1997), ketimpangan regional disebabkan oleh besarnya *backwash effect* dibandingkan dengan *spread effect* di negara-negara terbelakang. Pergerakan modal cenderung meningkatkan ketimpangan daerah, meningkatnya permintaan ke daerah maju akan merangsang investasi dan akan meningkatkan pendapatan.

### **b. Penyebab Ketimpangan Pendapatan**

Adelman dan Morris (1973) mengemukakan delapan faktor penyebab ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berdampak pada penurunan pendapatan perkapita
2. Inflasi adalah peningkatan pendapatan uang tetapi tidak dengan peningkatan produksi barang
3. Ketimpangan pembangunan antar daerah
4. Banyaknya investasi pada proyek padat modal (*capital intensive*). Sehingga prosentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dari prosentase pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan, sehingga pengangguran meningkat.
5. Mobilitas sosial masyarakat yang rendah
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang menyebabkan harga barang-barang industri meningkat untuk melindungi usaha-usaha kelompok kapitalis
7. Inelastisitas permintaan barang ekspor dari negara berkembang menyebabkan memburuknya *terms of trade* negara berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, serta
8. Adanya industri-industri yang terbangun



### c. Perhitungan Ketimpangan Pendapatan

#### 1) Indeks Williamson

Pada awal pembangunan akan terjadi ketimpangan daerah yang tinggi dan pembangunan yang hanya terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu saja. Menurut Williamson (1965) pada tahap awal pertumbuhan ekonomi yang lebih maju, keseimbangan antar wilayah dan disparitas akan berkurang secara signifikan. Menurut Sjafrizal (2012), salah satu model yang paling representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah adalah Indeks Williamson.

Sutarno dan Kuncoro (2003) mengatakan bahwa indeks williamson merupakan hubungan antara kesenjangan wilayah dengan tingkat pembangunan ekonomi dengan menggunakan data ekonomi maju dan berkembang. Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan wilayah menjadi lebih besar dan pembangunan hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Selanjutnya, pada tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih matang dan menguntungkan, terlihat adanya keseimbangan antar daerah dan kesenjangan antar daerah mulai berkurang secara signifikan. Indeks Williamson secara garis besar mengukur seberapa besar ketimpangan yang terjadi dalam suatu pembangunan di suatu wilayah. Metode ini diperoleh dari perhitungan pendapatan per kapita daerah dan jumlah penduduk masing-masing daerah. Rumus Indeks Williamson (Kuncoro, 2004) adalah sebagai berikut:

$$IW = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}{Y}} \dots\dots\dots(1)$$

Informasi:

- IW = indeks Williamson
- $Y_i$  = PDRB per kapita daerah i (Kabupaten/Kota)
- $Y$  = PDRB per kapita semua daerah (Provinsi)
- $f_i$  = Jumlah penduduk daerah i (Kabupaten/Kota)
- $n$  = Jumlah penduduk seluruh wilayah (Provinsi)

Dengan menggunakan Indeks Williamson dapat diketahui seberapa besar ketimpangan antar wilayah. Nilai ini positif dan berkisar antara 0-1. Terdapat kriteria penilaian yaitu: jika nilai indeks mendekati 1 berarti tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah di wilayah tersebut semakin besar. Namun jika nilai williamson mendekati 0 (nol), maka dapat dikatakan ketimpangan antar wilayah masih kecil atau dapat dikatakan masih rendah.

## 2) Indeks *Entropy Theil*

*Theil Entropy Index* digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Konsep entropi merupakan teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri di suatu wilayah. Indeks ini mengukur tingkat ketimpangan berdasarkan sektor-sektor yang membentuk perekonomian di masing-masing wilayah.

Perhitungan indeks ini memiliki kegunaan untuk menganalisis tren konsentrasi selama periode tertentu dan dapat mengkaji gambaran kesenjangan spasial yang lebih detail. Menurut Kuncoro (2001) indeks ketimpangan entropi theil memungkinkan untuk melakukan perbandingan selama periode waktu tertentu. Indeks ketidaksetaraan entropi juga dapat memberikan rincian dalam subunit geografis yang lebih kecil,

Indeks entropi tersebut dapat menunjukkan sektor mana yang memberikan ketimpangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri. Perhitungan indeks entropi dilakukan dengan menggunakan pendekatan sektoral untuk setiap kabupaten/kota. Hasil analisis akan menunjukkan indeks entropi di tingkat kabupaten/kota dan kontribusinya terhadap ketimpangan antar wilayah. Langkah-langkah untuk menghitung indeks entropi adalah sebagai berikut:

$$P_{ij} = \frac{X_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p X_{ij}} \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan:

- $P_{ij}$  : Peluang untuk kegiatan sektor i di j. wilayah  
 $X_{ij}$  : Total PDRB sektor i untuk tahun tertentu

saya : 1,2,.....,n menunjukkan jumlah baris (sub wilayah)  
 J : 1,2,.....,n menunjukkan jumlah kolom (aktivitas)

$$Q_{ij} = Ln(P_{ij}) \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

Q<sub>ij</sub> : Ln probabilitas aktivitas tipe j di wilayah i  
 P<sub>ij</sub> : probabilitas aktivitas tipe j di wilayah i  
 saya : 1,2,.....,n menunjukkan jumlah baris (sub wilayah)  
 J : 1,2,.....,n menunjukkan jumlah kolom (aktivitas)

$$S_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p R_{ij} \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan:

S<sub>ij</sub> : Total entropi area (S total)  
 R<sub>ij</sub> : Perkalian matriks –P<sub>ij</sub> dan C<sub>ij</sub>  
 saya : 1,2,.....,n menunjukkan jumlah baris (sub wilayah)  
 J : 1,2,.....,n menunjukkan jumlah kolom (aktivitas)

Semakin besar indeks *entropy theil* menunjukkan bahwa ketimpangan pada suatu wilayah/wilayah semakin besar atau ketimpangan pada wilayah tersebut tidak merata. Demikian juga jika indeks *entropy theil* semakin kecil menunjukkan ketimpangan di suatu wilayah/wilayah semakin kecil/rendah atau dapat dikatakan ketimpangan di wilayah tersebut semakin merata (Kuncoro, 2004).

### 3. Konsep aglomerasi

Istilah aglomerasi pada dasarnya berasal dari gagasan Marshall tentang ekonomi aglomerasi atau dalam istilah Marshall disebut sebagai *localized industries*.

Kuncoro (2002), aglomerasi adalah konsentrasi spasial kegiatan ekonomi di daerah perkotaan karena penghematan karena kedekatan ekonomi yang terkait dengan kelompok spasial perusahaan, pekerja dan konsumen. Pengertian ekonomi aglomerasi juga terkait dengan eksternalitas kedekatan geografis dari kegiatan ekonomi, bahwa ekonomi aglomerasi merupakan bentuk eksternalitas positif dalam produksi yang merupakan salah satu faktor penyebab pertumbuhan

suatu kota (Bradley dan Gans, 1996). Dengan mengacu pada beberapa pendapat para ahli ekonomi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aglomerasi adalah konsentrasi spasial kegiatan ekonomi dan penduduk yang timbul karena adanya simpanan yang diperoleh karena letaknya yang berdekatan.

Menurut Markusen (1996) aglomerasi adalah lokasi yang “tidak mudah berubah” karena penghematan eksternal yang terbuka untuk semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa, dan bukan karena perhitungan perusahaan atau individu pekerja. Dalam konteks ekonomi geografis, konsep aglomerasi berkaitan dengan konsentrasi spasial kegiatan ekonomi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kuncoro (2002) bahwa aglomerasi adalah pemusatan kegiatan ekonomi secara spasial akibat penghematan karena lokasi yang berdekatan terkait dengan klaster spasial perusahaan, pekerja dan konsumen.

Manfaat yang diperoleh dari konsentrasi spasial karena skala ekonomi disebut ekonomi aglomerasi. Pengertian ekonomi aglomerasi berkaitan dengan kedekatan geografis eksternalitas kegiatan ekonomi. Ekonomi aglomerasi merupakan bentuk eksternalitas positif dalam produksi yang menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan daerah.

Ekonomi aglomerasi didefinisikan sebagai penurunan biaya produksi karena kegiatan ekonomi berada di tempat yang sama. Menurut Kolehmainen (2002) aglomerasi berarti bahwa industri tidak merata di seluruh wilayah, tetapi mengelompok berdekatan di bagian-bagian tertentu dari wilayah tersebut. Dalam aglomerasi industri ada interaksi yang saling terkait antara skala ekonomi, biaya transportasi dan permintaan. Untuk meningkatkan kekuatan skala ekonomi, industri cenderung menggumpal secara spasial dan melayani seluruh pasar dari satu lokasi.

Menurut Landiyanto (2005) aglomerasi berkaitan dengan pemusatan beberapa fasilitas penunjang yang melayani industri dengan adanya fasilitas tersebut dapat mempengaruhi terjadinya aglomerasi. Fasilitas penunjang tersebut antara lain transportasi, ketersediaan tenaga kerja dengan beragam keterampilan dan layanan

dari pemerintah. Faktor yang menentukan pemilihan lokasi industri adalah perbedaan biaya transportasi, perbedaan biaya upah dan penghematan aglomerasi. Produsen cenderung memilih lokasi yang memberikan keuntungan berupa penghematan biaya transportasi sehingga mendorong efisiensi dan efektifitas produksi. Selain itu, produsen cenderung mencari lokasi dengan tarif tenaga kerja yang lebih rendah untuk meminimalkan biaya.

#### **a. Teori aglomerasi**

##### 1) Teori Neo Klasik

Dalam teori ini, aglomerasi muncul karena para pelaku ekonomi berusaha memperoleh ekonomi aglomerasi, baik karena simpanan lokalisasi maupun simpanan urbanisasi, dengan mengambil lokasi-lokasi yang berdekatan (Kuncoro, 2002). Aglomerasi ini mencerminkan suatu sistem interaksi antar pelaku ekonomi yang sama: baik antar perusahaan antar industri yang sama, antar perusahaan antar industri yang berbeda, atau antara individu, perusahaan dan rumah tangga. Di sisi lain, kota merupakan kawasan keanekaragaman yang menawarkan manfaat kedekatan baik bagi konsumen maupun produsen.

##### 2) Geografi Ekonomi Baru (*The New Economic Geography*)

Teori ekonomi geografis baru mencoba untuk mengurangi efek aglomerasi dari interaksi antara ukuran pasar, biaya transportasi dan peningkatan pengembalian perusahaan. Dalam hal ini ekonomi aglomerasi tidak diasumsikan tetapi diturunkan dari interaksi skala ekonomi di tingkat perusahaan, biaya transportasi dan mobilitas faktor-faktor produksi.

Teori ekonomi geografis baru menekankan adanya mekanisme kausalitas melingkar untuk menjelaskan konsentrasi spasial kegiatan ekonomi. Dalam model ini, kekuatan sentripetal berasal dari variasi konsumsi atau variasi barang antara di sisi produksi. Gaya sentrifugal berasal dari tekanan yang diberikan oleh konsentrasi geografis pasar input lokal yang menawarkan

harga lebih tinggi dan permintaan menyebar. Jika biaya transportasi cukup rendah, aglomerasi akan terjadi.

Dalam perkembangan teknologi, transfer pengetahuan antar perusahaan memberikan insentif untuk aglomerasi kegiatan ekonomi. Informasi diperlakukan sebagai barang publik dengan kata lain tidak ada persaingan dalam memperolehnya. Penyebaran informasi ini kemudian menghasilkan keuntungan bagi masing-masing perusahaan. Dengan asumsi bahwa setiap perusahaan menghasilkan informasi yang berbeda, manfaat interaksi meningkat dengan jumlah perusahaan. Karena interaksi ini bersifat informal, tingkat pertukaran informasi berkurang dengan meningkatnya jarak. Hal ini memberikan insentif bagi pengusaha untuk berlokasi dekat dengan perusahaan lain sehingga terjadi aglomerasi.

### 3) Teori Pemilihan Lokasi Kegiatan Industri

Menurut (Tarigan, 2004) ada 3 faktor yang menjadi alasan perusahaan dalam industri dalam menentukan lokasi, yaitu:

- Perbedaan Biaya Transportasi.  
Produsen cenderung mencari lokasi yang memberikan keuntungan berupa penghematan biaya transportasi dan dapat mendorong efisiensi dan efektifitas produksi. Dalam perspektif yang lebih luas, menyarankan penghematan biaya transaksi (biaya transportasi, biaya transaksi, biaya kontrak, biaya koordinasi dan biaya komunikasi) dalam menentukan lokasi perusahaan. Pada akhir dekade ini, biaya transportasi sedikit menurun karena inovasi, sehingga sekarang lebih umum bagi perusahaan untuk ditempatkan dalam orientasi input lokal daripada orientasi bahan baku.
- Selisih Biaya Upah.  
Produsen cenderung mencari lokasi dengan tingkat upah tenaga kerja yang lebih rendah dalam melakukan kegiatan ekonomi, sedangkan pekerja cenderung mencari lokasi dengan upah yang lebih tinggi. Adanya

daerah dengan tingkat upah yang tinggi mendorong tenaga kerja terkonsentrasi di daerah tersebut. Fenomena ini dapat ditemukan di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Perlu diingat bahwa perdesaan yang relatif tertinggal memiliki tingkat upah tertinggi masih akan rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki tingkat usaha di sektor industri.

- Keuntungan dari Aglomerasi

Aglomerasi akan menciptakan keuntungan berupa penghematan lokalisasi dan penghematan urbanisasi. Penghematan lokalisasi terjadi ketika biaya produksi perusahaan dalam suatu industri menurun ketika total produksi industri tersebut meningkat (ada skala pengembalian yang meningkat). Hal ini terjadi pada perusahaan-perusahaan di industri yang letaknya berdekatan. Penghematan urbanisasi terjadi ketika biaya produksi perusahaan menurun ketika produksi semua perusahaan pada berbagai tingkat kegiatan ekonomi di daerah yang sama meningkat. Penghematan karena berada di area yang sama adalah karena skala ekonomi, dan bukan karena skala jenis industri tertentu. Penghematan urbanisasi telah melahirkan perluasan wilayah metropolitan (*extended metropolitan region*).

## **b. Manfaat Aglomerasi**

Pengaruh konsentrasi industri di suatu daerah menurut teori pusat pertumbuhan yang dikembangkan oleh Perroux (1970) adalah:

- 1) Dalam proses pembangunan akan muncul industri-industri unggulan yang menjadi penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. karena keterkaitan antar industri sangat erat, perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang erat kaitannya dengan industri unggulan tersebut.
- 2) Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi

yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri pada daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah tersebut.

- 3) Perekonomian merupakan perpaduan antara sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri yang relatif pasif, yaitu industri yang bergantung pada industri unggulan atau pusat-pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah yang relatif pasif.

Menurut Perroux (1970) terjadinya aglomerasi industri memiliki manfaat tertentu dengan konsep penghematan aglomerasi, yaitu keuntungan skala ekonomi dan keuntungan penghematan biaya, penurunan biaya transportasi karena konsentrasi industri di suatu daerah akan mendorong berdirinya perusahaan jasa transportasi dengan fasilitas yang memadai sehingga perusahaan industri tidak perlu menyediakan sendiri jasa transportasi. Beberapa manfaat aglomerasi adalah sebagai berikut:

a) Penghematan internal

Penghematan internal adalah pengurangan biaya secara internal di dalam perusahaan atau pabrik. Seberapa jauh pengurangan biaya dapat dicapai dalam suatu perusahaan tergantung pada apakah efisiensi dapat ditingkatkan atau dipertahankan. Beberapa faktor yang berperan dalam menekan biaya secara internal antara lain: pembagian kerja (spesialisasi), penggantian tenaga manusia dengan mesin, mensubkontrakkan beberapa kegiatan proses produksi ke perusahaan lain, dan mempertahankan titik operasi yang optimal sehingga meminimalkan biaya. Penghematan internal mengarah pada keuntungan internal perusahaan. Keuntungan ini muncul karena adanya faktor produksi yang tidak dapat dibagi dan hanya dapat diperoleh dalam jumlah tertentu.

b) Keuntungan lokalisasi

Keunggulan ini berkaitan dengan sumber bahan baku atau fasilitas sourcing, artinya dengan pemusatan industri, masing-masing industri menjadi sumber atau pasar bagi industri lainnya. Keuntungan lokalisasi terjadi ketika rata-rata



total biaya produksi dari industri sejenis di lokasi yang sama menurun jika jumlah produksi dari berbagai industri di suatu lokasi meningkat.

c) Penghematan eksternal

Penghematan eksternal untuk perusahaan dan eksternal untuk sektor, atau disebut sebagai ekonomi urbanisasi. Karena kepadatan yang tinggi dan berbagai kegiatan produktif dan pemukiman di suatu daerah, kondisi yang melambangkan daerah perkotaan. Pengurangan biaya terjadi karena adanya kegiatan di luar lingkup perusahaan atau pabrik dengan melakukan aglomerasi secara spasial. Penghematan biaya terjadi karena adanya perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama yang saling bersaing dalam memperoleh pasar atau konsumen. Dalam hal ini, kawasan perkotaan menawarkan manfaat dari aglomerasi industri dan penduduk, yang diperkuat dengan tersedianya sarana dan prasarana seperti pendidikan, air, transportasi, dan hiburan, yang semuanya dapat menghemat biaya. Keuntungan lain meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran fisik kota.

d) Akumulasi informasi

Teori eksternalitas dinamis percaya bahwa akumulasi informasi di lokasi tertentu akan meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja. Pendekatan ini menjelaskan secara bersamaan bagaimana kota terbentuk dan mengapa mereka tumbuh. Eksternalitas dinamis menurut *Marshall Arrow Romer* (MAR) menekankan pentingnya transfer pengetahuan (*knowledge spillovers*) antar perusahaan dalam suatu industri, yang diperoleh melalui komunikasi berkelanjutan antar perusahaan lokal dalam industri yang sama.

e) Penghematan biaya transaksi perusahaan

Penghematan aglomerasi dengan menarik perbedaan mendasar antara biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi masalah “jarak” atau “ruang”, dan biaya yang timbul karena terletak di suatu titik dalam ruang dapat meminimalkan biaya transaksi perusahaan dalam hal (1) biaya transaksi jarak; (2) efisiensi

biaya faktor spesifik lokasi; (3) biaya koordinasi hierarkis; dan (4) biaya alternatif hierarki peluang.

Berdasarkan pemikiran Hoover tentang ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi, Glaeser *et al.* (1992) mengklasifikasikan dua macam limpahan pengetahuan, yaitu limpahan intraindustri dan limpahan antarindustri.

*Intraindustry spillovers* adalah limpahan pengetahuan yang terjadi dalam suatu industri yang dikembangkan berdasarkan pemikiran Romer. Sedangkan *inter-industrial spillovers* yang dikembangkan Jacob adalah *knowledge spillovers* yang terjadi antarindustri terkait di suatu lokasi. Jacob (1969) mengembangkan pemikiran Hoover tentang penghematan urbanisasi. Jacob menyatakan bahwa terdapat eksternalitas positif antar industri berupa *inter-industrial spillovers* yang biasa disebut dengan eksternalitas Jacobs sebagai akibat dari konsentrasi dan asosiasi industri di suatu wilayah.

Kuncoro (2002) menyatakan bahwa aglomerasi tidak selalu melahirkan sebuah kota. Perbedaan antara aglomerasi dan kota terletak terutama pada perbedaan antara kesederhanaan dan kompleksitas. Teori klasik aglomerasi berpendapat bahwa aglomerasi muncul karena pelaku ekonomi berusaha memperoleh tabungan akibat aglomerasi (aglomerasi ekonomi), baik karena tabungan karena lokasi maupun tabungan karena urbanisasi, dengan mengambil lokasi yang berdekatan satu sama lain. Aglomerasi ini mencerminkan suatu sistem interaksi antara pelaku ekonomi yang sama: baik antara perusahaan dalam industri yang sama, antara perusahaan dalam industri yang berbeda, atau antara individu, perusahaan dan rumah tangga. Di sisi lain, kota A adalah kawasan keanekaragaman yang menawarkan manfaat kedekatan baik bagi konsumen maupun produsen.

Pada dasarnya aglomerasi industri adalah pengelompokan industri inti yang saling berhubungan dengan industri penunjang, industri terkait, jasa penunjang, dan infrastruktur ekonomi. Oleh karena itu, strategi pengembangan industri yang tepat untuk membangun daya saing industri yang berkelanjutan dilakukan melalui pendekatan aglomerasi. Hal ini

dikarenakan kegiatan di sektor industri memiliki keterkaitan yang erat dengan kegiatan di sektor lain, baik keterkaitan ke belakang maupun keterkaitan ke depan. Jika kegiatan tersebut dilakukan di suatu wilayah tertentu (diaglomerasi), dapat mengurangi biaya transportasi dan berbagai biaya atau biaya transaksi lainnya (Deichmann *et al.*, 2005).

Penghematan aglomerasi terjadi karena konsentrasi spasial kegiatan ekonomi. Penghematan ini dapat terjadi dalam industri yang sama atau beberapa industri yang berbeda. Menurut Capello (2007) penghematan aglomerasi dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu penghematan karena skala ekonomi (*economies of scale*), penghematan lokalisasi (*localization economies*) dan penghematan urbanisasi (*urbanization economies*). Skala ekonomis terjadi karena proses produksi dalam skala besar sehingga berdampak pada penurunan biaya per unit output (biaya rata-rata). Penghematan lokalisasi terjadi karena konsentrasi spasial dalam industri yang sama yang mencakup penghematan transfer yang terjadi di seluruh perusahaan dalam industri terkait. Penghematan urbanisasi terjadi karena industri berada di unit perumahan yang besar. Penghematan tersebut berupa ekonomi kota, yaitu efisiensi ekonomi karena tersedianya prasarana kota, tenaga kerja, energi listrik, sistem telekomunikasi yang maju dan tersedianya sarana/prasarana umum. Penghematan ini meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran fisik kota.

Sumber aglomerasi ekonomi terdiri dari limpahan informasi, input lokal yang tidak diperdagangkan, dan sumber tenaga kerja lokal terlatih (Capello, 2007). Jika beberapa perusahaan dalam industri yang sama berkumpul di lokasi yang sama, ini menyiratkan bahwa pemilik perusahaan relatif mudah mengakses tenaga kerja dari perusahaan lokal lainnya. Pekerja yang berkumpul di lokasi yang sama memfasilitasi penyebaran informasi melalui kontak langsung atau tidak langsung (Cohen dan Paul, 2005). Dalam situasi di mana beberapa perusahaan berada di lokasi yang sama, mungkin ada input lokal yang tidak diperdagangkan seperti infrastruktur, dengan cara yang lebih efisien daripada jika perusahaan tersebar. Konsentrasi spasial dapat menurunkan biaya

transaksi informasi. Konsentrasi spasial meningkatkan kemungkinan informasi yang akan ditransmisikan, dan ketersediaan tenaga kerja terlatih di lokasi tersebut relatif lebih banyak dari pada tenaga kerja yang terdispersi.

### **c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aglomerasi**

Perroux (1970) mengatakan bahwa dari segi lokasi, perkembangan ekonomi daerah tidak merata dan cenderung menggumpal (berkonsentrasi) di pusat-pusat pertumbuhan. Pada gilirannya, pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan mempengaruhi daerah-daerah yang lambat berkembang. Tarigan (2007) berpendapat bahwa aglomerasi terjadi karena adanya saling membutuhkan produk antara berbagai industri, seperti ketersediaan fasilitas (listrik, air, jalan, dan pekerja terlatih). Gejala aglomerasi industri disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Pemusatan beberapa faktor produksi yang dibutuhkan di suatu lokasi
2. Kesamaan lokasi usaha berdasarkan satu faktor produksi tertentu
3. Adanya kawasan pusat pertumbuhan industri yang disesuaikan dengan tata ruang dan fungsi kawasan untuk memperlancar kegiatan industri
4. Adanya kesamaan kebutuhan akan kelengkapan sarana, prasarana, dan bidang jasa industri lainnya untuk memudahkan pengendalian dalam hubungan perburuhan, bahan baku, dan pemasaran.
5. Adanya kerjasama dan saling membutuhkan dalam menghasilkan suatu produk untuk meningkatkan produktivitas industri dan kualitas produksi

### **d. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Aglomerasi**

Menurut Sigalinging (2008) aglomerasi menyebabkan efisiensi produksi perusahaan yang pada gilirannya akan berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan teori Harrod Dhomar yang menyatakan bahwa pembentukan modal meningkatkan produktivitas, aglomerasi industri di daerah-daerah terpusat mempercepat akumulasi modal

yang mengarah pada efisiensi produktivitas yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Munculnya aglomerasi di suatu wilayah akan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut karena terciptanya efisiensi produksi (Sigalingging, 2008). Aglomerasi industri di suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah lainnya. Selain itu, pola konsentrasi, dimana terdapat kumpulan berbagai jenis industri di suatu tempat tertentu mengakibatkan munculnya keuntungan eksternal, yang dalam hal ini adalah tabungan aglomerasi.

#### **e. Hubungan Ketimpangan dan Aglomerasi**

Secara geografis, pusat pertumbuhan merupakan suatu lokasi yang memiliki banyak fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat atraksi (*pole of Attraction*) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi di kawasan tersebut, meskipun tidak ada interaksi antara bisnis ini (Tarigan, 2004). Dalam suatu kawasan terdapat penduduk atau kegiatan yang terpusat pada satu tempat, yang disebut dengan berbagai istilah seperti kota, pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, pusat pemukiman, atau kawasan ibu kota. Di sisi lain, daerah di luar pusat konsentrasi disebut: daerah pedalaman, daerah pedalaman, daerah pertanian, atau daerah pedesaan. Hubungan antara kota (daerah maju) dengan daerah lain yang lebih terbelakang adalah sebagai berikut:

1. *Generatif*: hubungan yang saling menguntungkan atau saling membangun antara daerah yang lebih maju dengan daerah yang tertinggal
2. *Parasive*: hubungan yang terjadi di mana daerah perkotaan (daerah yang lebih maju) tidak membantu atau membantu daerah tertinggal, bahkan dapat mematikan berbagai bisnis yang mulai tumbuh di daerah belakang.

3. *Enclave* (tertutup): dimana wilayah kota (wilayah yang lebih berkembang) seolah-olah benar-benar terpisah dari wilayah sekitarnya yang lebih terbelakang

Jhingan (2012) mengemukakan bahwa tingkat pembangunan yang lebih tinggi akan semakin memperkuat *spread effect* dan cenderung menghambat arus ketimpangan wilayah. Hal ini akan menopang pembangunan ekonomi dan pada saat yang sama akan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kebijakan yang ditujukan untuk lebih mengurangi ketimpangan regional. Pada hakikatnya pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua daerah jika dibarengi dengan kesenjangan pendapatan daerah yang kecil.

*Backwash effect* didefinisikan sebagai daerah maju yang akan menghambat perkembangan daerah yang lebih terbelakang, sedangkan *spread effect* bahwa daerah yang lebih maju akan menciptakan kondisi yang mendorong berkembangnya daerah tertinggal. Aglomerasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan nilai *backward effect* lebih tinggi dari *spread effect*, yang akan berdampak pada ketimpangan pembangunan daerah.

Adanya heterogenitas dan berbagai karakteristik suatu wilayah, perbedaan struktur ekonomi, perbedaan infrastruktur (infrastruktur), aglomerasi dan kurangnya keterkaitan antar wilayah, membuat perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang akan menimbulkan kecenderungan disparitas. antar wilayah dan antar sektor ekonomi suatu wilayah. Menurut Bonet (2006), aglomerasi (konsentrasi kegiatan) produksi digunakan sebagai salah satu variabel yang dapat digunakan untuk menentukan disparitas regional. dalam perekonomian. Aglomerasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesenjangan pendapatan yang terjadi.

#### **f. Urbanisasi dan Aglomerasi**

Urbanisasi adalah proses perubahan proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Urbanisasi dapat terjadi ketika laju pertumbuhan

penduduk perkotaan lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk pedesaan. Urbanisasi dapat dikatakan tidak terjadi jika laju pertumbuhan di kedua wilayah tersebut sama. Terkait dengan urbanisasi yang terjadi terus menerus di sekitar kawasan perkotaan dengan sendirinya akan membentuk beberapa kawasan yang berfungsi sebagai pusat perekonomian yang sering disebut sebagai aglomerasi. Manfaat terbentuknya kawasan aglomerasi bagi peningkatan ekonomi tidak serta merta dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Urbanisasi terutama disebabkan oleh migrasi dari desa ke kota. Perluasan batas kota dan pembentukan pusat kota baru (kebanyakan reklasifikasi dari apa yang sebelumnya desa saat mereka tumbuh atau berkembang untuk memenuhi kriteria perkotaan nasional) juga berkontribusi terhadap urbanisasi. Menurut Aziz *et al.*, (2012) urbanisasi adalah proses yang mengarah pada pertumbuhan kota karena industrialisasi dan pembangunan ekonomi, dan yang mengarah pada perubahan khusus perkotaan dalam spesialisasi, pembagian kerja, dan perilaku manusia.

Pembangunan perkotaan menunjukkan transisi struktural dan spasial yang didominasi oleh sektor pertanian di pedesaan dan mulai bergeser ke sektor industri. Pemusatan industri besar di perkotaan akan menciptakan nilai tambah dengan urbanisasi tenaga kerja ke pusat-pusat ekonomi. Sisi positif dari urbanisasi yang terjadi saat ini dapat dikaitkan dengan peningkatan output dan produktivitas. Menurut Tjiptoherijanto (1999) ada faktor-faktor pendorong terjadinya urbanisasi yang dikenal dengan istilah ekonomi urbanisasi, yaitu aspek-aspek yang dapat mendorong berlangsungnya kegiatan usaha di kota-kota besar sebagai konsentrasi penduduk dan infrastruktur publik yaitu sebagai peluang bagi konsumen dan sumber. pekerja; infrastruktur produksi yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi secara lebih efisien. Aspek-aspek ini biasanya tidak universal di kota-kota kecil, terutama daerah pedesaan.

Pertumbuhan kota dapat terjadi karena dua hal, yaitu pertumbuhan alami, dan reklasifikasi penduduk serta migrasi. Bintarto (1987) menjelaskan bahwa suatu daerah telah mengalami proses urbanisasi jika:

1. Jumlah dan kepadatan penduduk kota meningkat,
2. Peningkatan jumlah kota di suatu negara atau wilayah sebagai akibat dari perkembangan ekonomi, budaya, industri dan teknologi baru
3. Mengubah kehidupan desa menjadi suasana perkotaan

Urbanisasi dapat terjadi di setiap wilayah dan diikuti dengan perkembangan wilayah. Tingkat perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat urbanisasinya (Muta'ali, 2015). Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari aglomerasi industri di daerah dapat menjadi salah satu faktor penarik urbanisasi sebagai pekerja sektor industri. Ferdiansyah dan Santoso (2013) menjelaskan bahwa aglomerasi adalah konsentrasi spasial kegiatan industri yang muncul karena pelaku ekonomi berusaha untuk mendapatkan simpanan aglomerasi baik karena penghematan lokalisasi maupun urbanisasi dengan mengambil lokasi yang berdekatan. Aglomerasi muncul dari perilaku para ekonom dalam mencari penghematan lokalisasi dan urbanisasi. Damayanti (2017) menyimpulkan bahwa peningkatan aglomerasi industri berdampak positif terhadap peningkatan ketimpangan wilayah di Jawa (*spread effect*). Salah satu bentuk efek penyebaran aglomerasi adalah migrasi penduduk ke kota-kota besar, yang dapat menyerap tenaga kerja terampil dan mengurangi pengangguran di pedesaan.

Urbanisasi yang terjadi akan mendorong pemekaran wilayah atau urban sprawl. Urbanisasi dari pendekatan demografi berarti suatu proses peningkatan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan sehingga proporsi penduduk yang tinggal di suatu wilayah meningkat. Biasanya, konsentrasi hanya diukur dengan proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, tingkat perubahan proporsi ini, dan perubahan jumlah pusat kota. Sejalan dengan penelitian Harahap (2013) yang mengemukakan definisi lain dari urbanisasi yang dikemukakan oleh Dr. PJM Nas (2010) yaitu Urbanisasi menyangkut gejala meluasnya pengaruh kota ke pedesaan yang dilihat dari segi morfologi, ekonomi, sosial dan psikologis. Secara keseluruhan dapat diartikan bahwa urbanisasi adalah proses peningkatan proporsi penduduk perkotaan yang menyebabkan perluasan wilayah perkotaan sebagai akibat



dari daya tarik ekonomi. Daerah yang bisa dijadikan contoh adalah Cibinong dan Bontang yang berubah dari desa menjadi kota karena adanya kegiatan industri. Pengertian kedua adalah banyaknya penduduk yang berpindah dari desa ke kota, karena adanya tarikan di kota yaitu kesempatan kerja.

Laju urbanisasi adalah suatu nilai atau kriteria yang didasarkan pada perhitungan perbandingan jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Hal ini sejalan dengan Anshori (2021) yang menghitung tingkat urbanisasi dengan pengertian peningkatan konsentrasi penduduk di perkotaan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten. Perhitungan tingkat urbanisasi pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam penelitian ini menggunakan rumus Muta'ali (2015).

$$U = \left( \frac{Jpk}{Jp} \times 100\% \right) \dots\dots\dots(5)$$

Informasi:

kamu : Urbanisasi (%)  
 Jpk : Jumlah penduduk kota per kabupaten/kota di Provinsi Lampung  
 jp : Jumlah penduduk per kabupaten/kota di Provinsi Lampung

Pengembangan kawasan industri melalui pendekatan aglomerasi industri dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah yang terjadi. Pengaruh polarisasi berupa urbanisasi penduduk dapat menyerap tenaga kerja terampil dan mengurangi pengangguran di daerah tertinggal. Bank Dunia (2018) menyatakan bahwa urbanisasi mampu mengurangi tingkat kemiskinan melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki tingkat urbanisasi dan tingkat pertumbuhan PDRB/kapita dalam kategori sedang hingga tinggi, dan tidak banyak yang termasuk dalam kategori rendah. Secara rinci, ada 25 provinsi yang mewakili daerah tumbuh cepat (Hadijah, 2020). Zhang (2016) dan Awasthi (2021) menjelaskan bahwa pada periode awal urbanisasi umumnya ditandai dengan percepatan laju pertumbuhan penduduk perkotaan yang kemudian diikuti oleh pertumbuhan ekonomi wilayah.

#### 4. Nilai tambah (nilai tambah)

Pengembangan sektor industri pengolahan yang ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat memberikan nilai tambah yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Nilai tambah sektor industri manufaktur yang dapat diciptakan adalah nilai tambah sektoral atau vertikal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai tambah sektoral itu sendiri merupakan bagian dari nilai output semua sektor yang diakumulasikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) (Soelistijo, 2013). Nilai tambah daerah yang diperoleh adalah mampu memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat setempat seperti tersedianya lapangan pekerjaan.

Secara umum, berbagai penelitian mengaitkan aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan pertumbuhan nilai tambah industri, pertumbuhan tenaga kerja, dan produktivitas tenaga kerja. Adanya berbagai konsep mengenai ekonomi aglomerasi dan teori yang mendasarinya berdampak pada perbedaan ukuran aglomerasi dan ekonomi aglomerasi digunakan dengan asumsi yang berbeda. Sodak dan Iskandar (2007) mengatakan bahwa konsep ekonomi aglomerasi statis menjelaskan hubungan antara ekonomi aglomerasi dan pertumbuhan nilai tambah industri pengolahan. Nilai tambah merupakan salah satu unsur utama dalam menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) setiap daerah. Dimana nilai tambah bruto (NTB) adalah selisih antara output dan biaya antara yang merupakan produk dari proses produksi. Produk ini terdiri dari:

- a. Pendapatan faktor yang terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga, dan keuntungan
- b. Penyusutan barang modal yang digunakan untuk produksi
- c. Pajak tidak langsung bersih

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu wilayah, atau merupakan nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi. Nilai tambah dari sektor manufaktur, yaitu: nilai total output subsektor industri pengolahan yang diakumulasikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB).

## B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang keterkaitan aglomerasi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian terkait dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Anshori (2021) melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh Aglomerasi, Urbanisasi, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aglomerasi, urbanisasi, dan investasi terhadap ketimpangan kabupaten/kota di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan gabungan data time series tahun 2014-2019 dan *cross section* di 8 (delapan) kabupaten/kota di Provinsi Banten. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan model regresi *fixed effect* dan alat analisis *e-views* 9.0. Hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel aglomerasi memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten. Sedangkan variabel Urbanisasi dan Investasi memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten. Kedua variabel tersebut berarti bahwa peningkatan urbanisasi dan investasi di Provinsi Banten cenderung meningkatkan ketimpangan antar kabupaten/kota.

Penelitian Sodik dan Iskandar (2017) tentang Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Daerah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak aglomerasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di 26 provinsi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan menggunakan metode GLS (*Generalized Least Squares*) atau metode kuadrat terkecil yang menghasilkan estimasi linier dan tidak bias. Data yang digunakan adalah data time series 1994-2003 dan data cross section dari (26 provinsi). Dari hasil penelitian selama periode 1994-2003 diketahui bahwa variabel aglomerasi memiliki nilai koefisien tertinggi dibandingkan dengan variabel independen lainnya yaitu tingkat angkatan kerja, tingkat inflasi, tingkat keterbukaan, dan tingkat pendidikan.

Damayanti (2017) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Dampak Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Jawa dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh aglomerasi industri terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Jawa. Menggunakan data sekunder di 6 provinsi di Pulau Jawa (2009-2013). Metode analisis yang digunakan adalah *williamson index*, *hoover balassa index*, dan panel data regression dengan *pendekatan fixed effect (fixed effect model)* dan *dummy dependent variable*. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah yang terjadi di pulau Jawa. Hasil estimasi Regresi Data Panel menunjukkan bahwa peningkatan aglomerasi industri berdampak positif terhadap peningkatan ketimpangan wilayah di Jawa (*spread effect*).

Penelitian Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Human Capital Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan oleh Hendarmin (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, dan human capital terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel selama periode 2013-2017 dan data cross section untuk 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel aglomerasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan variabel human capital yang diproksikan dengan HDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan human capital secara simultan mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Pelayanan publik perlu diberikan agar kesenjangan antara kota dan kabupaten tidak melebar.

Kusumasari dan Kartiasih (2017) juga meneliti Aglomerasi Industri dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Tahun 2010-2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena aglomerasi industri di Jawa Barat dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan tabel, grafik, dan peta tematik untuk menggambarkan kondisi masing-masing variabel. Sedangkan analisis inferensi dengan regresi data panel spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada delapan kabupaten/kota di Jawa Barat yang diaglomerasi industri. Modal manusia memiliki nilai elastisitas yang paling tinggi. Perekonomian Jawa Barat cenderung padat karya, didukung oleh nilai elastisitas tenaga kerja yang lebih besar dari elastisitas modal. Sebagai tambahan, infrastruktur juga memiliki dampak positif dan signifikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas manusia dan infrastruktur harus lebih ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih meningkat.

Yusica, Malik, dan Arifin (2018) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ketimpangan wilayah dan menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan pengangguran terhadap ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus PDRB relatif per kapita dan analisis regresi data panel. Berdasarkan analisis PDRB per kapita, tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur masih menunjukkan ketimpangan wilayah yang lemah karena rata-ratanya masih negatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah dan variabel aglomerasi serta tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan Lubis (2019) mengenai Pengaruh Aglomerasi dan Hubungan Vertikal Industri Terhadap Produktivitas Industri di Indonesia bertujuan untuk menganalisis pengaruh aglomerasi terhadap produktivitas perusahaan dari dua faktor penting aglomerasi, yaitu intraindustri (lokalisasi) dan lintas industri. limpahan industri (urbanisasi). Metode analisis penelitian menggunakan model estimasi regresi data panel efek tetap. Penelitian

ini menggunakan data dari perusahaan industri besar dan menengah untuk tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada tahun 2008-2015. Hasil analisis menyimpulkan bahwa perusahaan menerima dampak limpahan produktivitas yang positif dan signifikan dari berkumpulnya perusahaan-perusahaan dari sektor industri yang sama, maupun dari sektor industri lain di kawasan yang sama. Namun, semakin jauh jarak geografis pengaruhnya semakin kecil. Produktivitas spillover diperoleh dari perusahaan sektor hulu dan hilir yang berkumpul di wilayah yang sama. Semakin dekat jarak ekonomi, semakin besar efek limpahan dari sektor hilir. Pengaruh jarak ekonomi ini tidak ditemukan di sektor hulu

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya mengukur pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan alat analisis gabungan antara alat analisis data panel dan analisis jalur yang digunakan untuk melihat keterkaitan langsung dan tidak langsung antara aglomerasi sektor industri manufaktur terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Secara rinci penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Penelitian terdahulu

No	Judul	Tujuan	Metode penelitian	Kesimpulan
1	Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Daerah di Indonesia (Sodik dan Iskandar, 2017)	Menganalisis dampak aglomerasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (26 provinsi).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis regresi menggunakan metode GLS (<i>Generalized Least Squares</i>) atau metode kuadrat terkecil yang menghasilkan estimasi linier dan tidak bias</li> <li>- Menggunakan data <i>time series</i> 1994-2003 dan data <i>Cross section</i> dari (26 Provinsi)</li> </ul>	Dari hasil penelitian selama periode 1994-2003 diketahui bahwa variabel aglomerasi memiliki nilai koefisien tertinggi dibandingkan dengan variabel independen lainnya yaitu tingkat angkatan kerja, tingkat inflasi, tingkat keterbukaan, dan tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa aglomerasi (pengelompokan industri) jika dikembangkan lebih lanjut dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
2	Aglomerasi Industri dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat Tahun 2010-2014 (Kusumasari dan Kartiasih, 2017)	Menganalisis fenomena aglomerasi industri di Jawa Barat dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara ini	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan tabel, grafik, dan peta tematik untuk menggambarkan kondisi masing-masing variabel. Sedangkan analisis inferensi dengan regresi data panel spasial.</li> <li>- Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengembangan dari fungsi produksi Cobb-Douglas.</li> </ul>	Menunjukkan bahwa ada delapan kabupaten/kota di Jawa Barat yang diaglomerasi industri. Modal manusia memiliki nilai elastisitas yang paling tinggi. Perekonomian Jawa Barat cenderung padat karya, didukung oleh elastisitas tenaga kerja yang lebih besar dari elastisitas modal. Selain itu, infrastruktur juga memberikan dampak positif dan signifikan. Singkatnya, semua variabel independen yang digunakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas manusia dan infrastruktur harus lebih ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih meningkat.

Tabel 3. Lanjutan

Tidak	Judul	Tujuan	Metode penelitian	Kesimpulan
3	Analisis Dampak Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Jawa (Damayanti L, 2017)	Menganalisis pengaruh aglomerasi industri terhadap ketimpangan wilayah di Jawa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan data sekunder di 6 Provinsi Pulau Jawa (2009-2013)</li> <li>- Dianalisis menggunakan Indeks Williamson, Indeks Hoover Balassa, dan Regresi Data Panel dengan pendekatan efek tetap (<i>fixed effect model</i>) dan <i>variabel dependen dummy</i>.</li> </ul>	Menyatakan bahwa terdapat pengaruh variabel aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan wilayah yang terjadi di Pulau Jawa. Menunjukkan bahwa peningkatan aglomerasi industri berdampak positif terhadap peningkatan ketimpangan wilayah di Jawa (spread effect). Salah satu bentuk efek penyebaran aglomerasi adalah migrasi penduduk ke kota-kota besar (urbanisasi) yang dapat menyerap tenaga kerja terampil dan mengurangi pengangguran di pedesaan.
4	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Aglomerasi Industri Unggulan Daerah dan Hubungannya Dengan Daya Saing Industri Daerah (Zuliasri, Rindayati, dan Asmara, 2013)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganalisis kondisi daya saing dan aglomerasi industri unggulan</li> <li>- Menganalisis hubungan kausal antara aglomerasi dan daya saing industri unggulan</li> <li>- Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi aglomerasi industri unggulan provinsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis yang digunakan adalah <i>location quotient</i>, <i>hoover balassa index</i>, <i>metode granger causality</i> dan metode data panel dengan <i>fixed effect model</i>.</li> <li>- Menggunakan data panel. Periode waktu yang digunakan adalah 2004-2011</li> </ul>	Industri unggulan provinsi ini tergolong kompetitif dan aglomerasi (84,78%). Industri unggulan yang berdaya saing 60,87% adalah industri pengolahan berbasis pertanian (agroindustri). Daya saing dan aglomerasi industri memiliki hubungan dua arah yang positif. Faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap aglomerasi industri unggulan provinsi ini adalah nilai tambah, indeks persaingan industri (struktur pasar), infrastruktur jalan dan indeks daya saing industri. Ukuran perusahaan (skala ekonomi), keragaman industri dan tingkat upah memiliki pengaruh negatif terhadap aglomerasi.



Tabel 3. Lanjutan

No	Judul	Tujuan	Metode penelitian	Kesimpulan
5	Pengaruh Industri, Tenaga Kerja Industri dan PDRB Sektor Industri Terhadap Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Timur (Fadilah, Nuraini, dan Susilowati, 2017)	Melihat perbedaan dan besarnya disparitas pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Timur, serta untuk mengetahui pengaruh industri, tenaga kerja industri dan PDRB sektor industri terhadap disparitas pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015	Analisis regresi linier berganda dan indeks williamsom.	Dari hasil analisis diketahui bahwa hanya PDRB sektor industri yang berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan dengan arah positif, sedangkan industri dan tenaga kerja industri berpengaruh tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa industrialisasi di Provinsi Jawa Timur belum mampu menyelesaikan disparitas pendapatan antar daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2015.
6	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Total Ketimpangan Penduduk terhadap Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2016 (Ayu, Riani, dan Haviz, 2019)	Memperkirakan model ekonometrika yang dapat menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat 2005-2016	Metode kuadrat terkecil biasa (OLS)	Ketimpangan pendapatan di Jawa Barat selama 2005-2016 dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan jumlah populasi. Ketiga faktor tersebut secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia Jawa barat. Dan sebagian pertumbuhan ekonomi dan pengangguran tidak berpengaruh ketimpangan pendapatan di Jawa Barat dengan probabilitas 0,05. Jumlah penduduk merupakan faktor terpenting efek pada ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Barat dengan nilai koefisien 0,013700 pada tingkat signifikansi 5%.

Tabel 3. Lanjutan

Tidak	Judul	Tujuan	Metode penelitian	Kesimpulan
7	Hubungan Tenaga Kerja, Rumah Tangga dan Produksi Perikanan pada Aglomerasi Industri di Kabupaten Tanggamus (Suparta dan Pratama, 2020)	Untuk menguji hubungan kausal antara aglomerasi industri terhadap tenaga kerja, produksi perikanan dan perikanan rumah tangga di Kabupaten Tanggamus	- Menggunakan analisis <i>hoover ballassa index</i> dan sistem informasi geografis (SIG) menggunakan Geoda. - Dianalisis menggunakan metode <i>granger causality analysis</i> .	Hasil indeks Hoover Ballassa menunjukkan tingkat aglomerasi yang kuat hanya di 6 kecamatan. Hasil analisis hubungan kausalitas menyatakan bahwa terdapat hubungan kausalitas searah antara variabel aglomerasi dan tenaga kerja yang berpengaruh signifikan terhadap aglomerasi dan bukan sebaliknya. Terdapat hubungan kausalitas searah antara variabel aglomerasi dengan produksi perikanan, hanya produksi perikanan yang berpengaruh signifikan terhadap aglomerasi dan tidak sebaliknya. Terdapat hubungan kausalitas searah antara variabel aglomerasi dengan rumah tangga perikanan, yaitu hanya rumah tangga perikanan yang berpengaruh signifikan terhadap aglomerasi dan tidak sebaliknya.
8	Pengaruh Aglomerasi dan Hubungan Vertikal Industri Terhadap Produktivitas Industri di Indonesia (Agustina dan Lubis, 2019).	Menganalisis pengaruh aglomerasi terhadap produktivitas perusahaan dari dua faktor penting aglomerasi, yaitu intraindustri (lokalisasi) dan limpahan lintas industri (urbanisasi).	Menggunakan model estimasi regresi data panel efek tetap Menggunakan data dari perusahaan industri besar dan menengah untuk tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia pada tahun 2008-2015	Perusahaan menerima dampak limpahan produktivitas yang positif dan signifikan dari berkumpulnya perusahaan-perusahaan dari sektor industri yang sama, maupun dari sektor industri lain di kawasan yang sama. Namun semakin jauh jarak geografisnya, semakin kecil pengaruhnya. Produktivitas spillover diperoleh dari perusahaan sektor hulu dan hilir yang berkumpul di wilayah yang sama. Semakin dekat jarak ekonomi, semakin besar efek limpahan dari sektor hilir. Pengaruh jarak ekonomi ini tidak ditemukan di sektor hulu. .

Tabel 3. Lanjutan

Tidak	Judul	Tujuan	Metode penelitian	Kesimpulan
9	Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Human Capital Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Hendarmin, 2017).	Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, dan human capital terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat	Analisis data menggunakan regresi data panel selama periode 2013-2017 dan data <i>cross section</i> untuk 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat	Ditemukan bahwa secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan, variabel aglomerasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan variabel human capital yang diproksikan dengan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel pertumbuhan ekonomi, aglomerasi dan human capital secara simultan mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota. Pelayanan publik perlu diberikan agar kesenjangan antara kota dan kabupaten tidak melebar.
10	Analisis Pengaruh Aglomerasi, Urbanisasi, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Anshori, 2021)	Mengetahui pengaruh aglomerasi, urbanisasi, dan investasi terhadap ketimpangan kabupaten/kota di Provinsi Banten.	Menggunakan analisis data panel dengan model regresi efek tetap dan alat analisis e-views 9.0	Hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel aglomerasi memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan yang terjadi di Provinsi Banten. Sedangkan variabel Urbanisasi dan Investasi memiliki hubungan positif terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Banten. Kedua variabel tersebut berarti bahwa peningkatan urbanisasi dan investasi di Provinsi Banten cenderung meningkatkan ketimpangan antar kabupaten/kota.

### C. Kerangka Pemikiran

Perkembangan sektor industri pengolahan yang didukung oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat memberikan nilai tambah (*added value*) yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Nilai tambah sektor industri pengolahan yang dapat diciptakan yakni nilai tambah sektoral atau vertikal yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah, dan nilai tambah kewilayahan yang mampu memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat setempat. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor industri pengolahan masih menjadi dua sektor yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian di Provinsi Lampung.

Arahan rencana kawasan industri yang tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung 2009-2029 memperlihatkan bahwa pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu pada lokasi-lokasi yang berada pada sentra penghasil sumberdaya (bahan baku). Menurut BPS Provinsi Lampung (2020) sebagian besar *share* sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan memberikan kontribusi yang cukup besar. Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Lampung Timur memiliki *share* sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang cukup besar terhadap perekonomian Provinsi Lampung dengan rata-rata sebesar 11,83 persen. Terdapat beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang memiliki *share* sektor industri pengolahan cukup kecil, namun pada sektor pertanian cukup besar. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pengolahan produksi yang dilakukan belum sepenuhnya dilakukan di kabupaten/kota sentra produksi melainkan di luar kabupaten/kota sentra produksi. Selain itu, industri-industri pengolahan yang ada di Provinsi Lampung belum mampu menyerap hasil panen melimpah dikarenakan kapasitas produksi pabrik yang masih kecil (RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024).

Perbedaan infrastruktur, sumberdaya, dan peruntukan pembangunan daerah akan mengakibatkan beberapa daerah memiliki kegiatan industri yang lebih besar dan

terjadi pengelompokan pada daerah tertentu. Pemusatan kegiatan dalam suatu wilayah akan memberikan keuntungan yakni keuntungan akibat aglomerasi. Aglomerasi atau pemusatan kegiatan industri yang terbentuk di suatu daerah memiliki dampak yang positif pertumbuhan ekonomi wilayah. Kecenderungan pola pemusatan (aglomerasi) industri yang menemukan bahwa hal penting terhadap pertumbuhan perekonomian daerah adalah pola pemusatan, dimana terdapat kumpulan berbagai jenis industri pada suatu tempat tertentu yang didukung oleh sumber bahan baku industri (Sihombing, 2008). Teraglomerasinya industri di kabupaten/kota Provinsi Lampung diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah. Oleh sebab itu, perlu diketahui tingkat aglomerasi sektor industri pengolahan di Provinsi Lampung.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor yang mendominasi dalam kontribusi terhadap PDRB di Provinsi Lampung dengan rata-rata sebesar 30,45 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020). Sebesar 17,90 persen kontribusi sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar ke dua terhadap PDRB di Provinsi Lampung. Besarnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor industri pengolahan tidak terlepas dari kabupaten/kota yang berkontribusi terhadap perekonomian di Provinsi Lampung. Perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah di Provinsi Lampung dapat menyebabkan adanya wilayah yang maju atau aktif dan wilayah yang terbelakang atau pasif. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh kabupaten/kota, hal ini terjadi jika peningkatan pertumbuhan ekonomi disertai dengan kecilnya ketimpangan pendapatan daerah. Menurut Rustiadi, Indraprahasta, dan Mulya (2021) menyebutkan bahwa ketimpangan regional dan aglomerasi masih menjadi isu pembangunan yang relevan terhadap perencanaan pembangunan.

Perbedaan pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat menentukan besar atau kecilnya kontribusi yang di berikan terhadap perekonomian daerah. Badan Pusat Statistik (2020) menyebutkan bahwa secara keseluruhan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung yakni sebesar 0,329 persen pada tahun 2019 lebih rendah

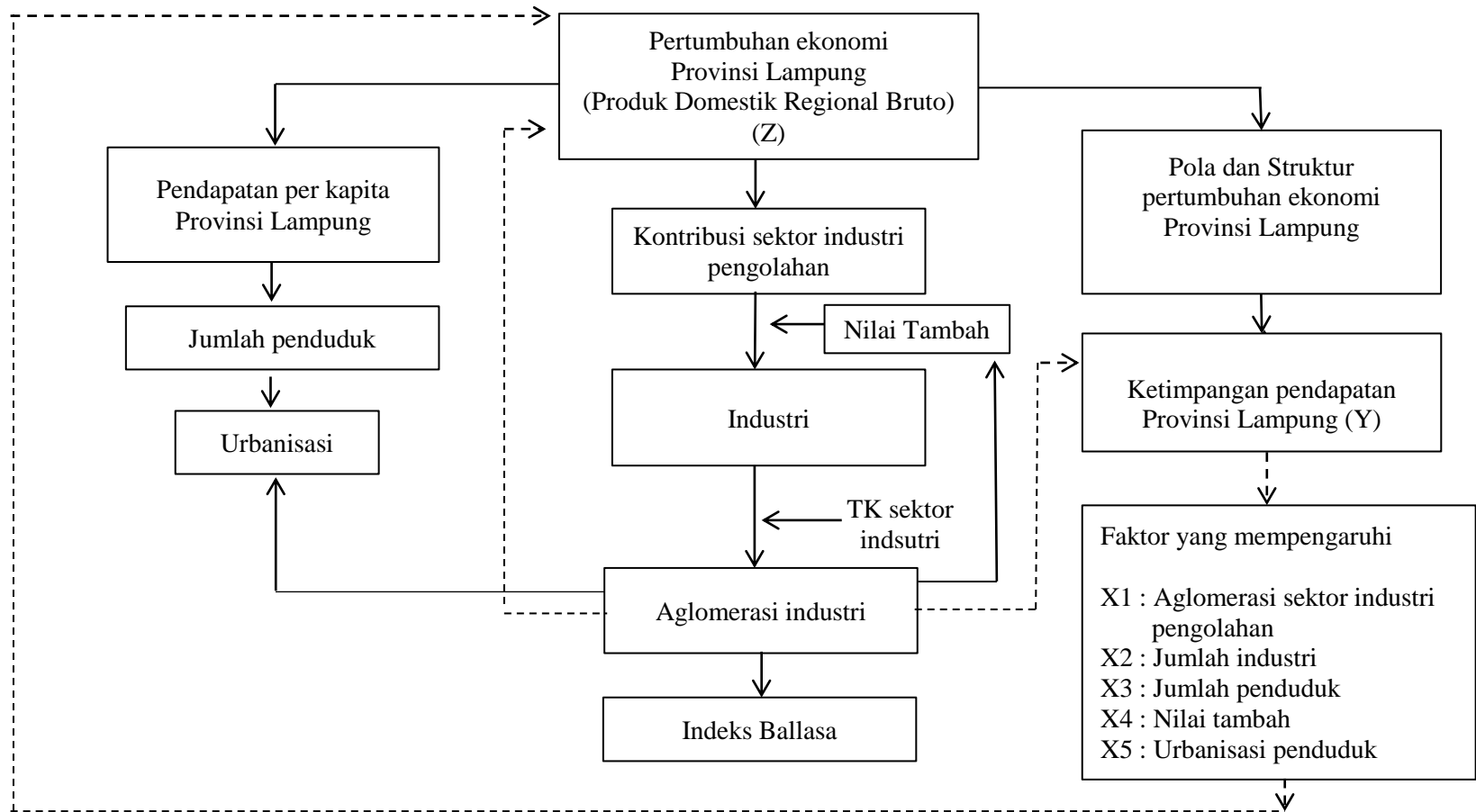
dibandingkan rata-rata ketimpangan nasional sebesar 0,384 persen. Nilai tersebut dapat dikategorikan sebagai tingkat ketimpangan pendapatan rendah. Namun dengan tingkat ketimpangan yang rendah jika dilihat dari kontribusi sumbangan dan nilai PDRB masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung cenderung berbeda secara signifikan. Sejalan dengan penelitian Sari, Hidayat, dan Yogie (2016) yang menyimpulkan bahwa tingkat ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung termasuk kategori rendah, namun cenderung meningkat setiap tahunnya. Pola, struktur ekonomi, dan peruntukan pembangunan yang berbeda dapat memberikan gambaran mengenai potensi sumberdaya dan wilayah aglomerasi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung.

Teraglomerasinya industri pengolahan di Provinsi Lampung akan memberikan nilai tambah berupa serapan tenaga kerja. Hal tersebut secara tidak langsung akan menyebabkan urbanisasi penduduk atau migrasi penduduk ke daerah aglomerasi industri pengolahan. Menurut BPS Provinsi Lampung (2019) laju pertumbuhan sektor industri pengolahan memiliki serapan tenaga kerja lebih besar dibandingkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yakni sebesar 7,82 persen per tahunnya (2017-2019), sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya sebesar 1,06 persen per tahun. Hal tersebut memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir serapan tenaga kerja pada sektor industri tumbuh lebih cepat. Sejalan dengan Hadijah (2020) bahwa laju pertumbuhan urbanisasi di Provinsi Lampung masuk dalam kategori tinggi tahun 2018 dengan persentase sebesar  $> 2,73$  persen. Salah satu penyebab tingginya urbanisasi yakni adanya keterbukaan lapangan pekerjaan di sektor industri.

Secara umum daerah atau lokasi aglomerasi lebih mengarah pada daerah perkotaan, di mana di daerah perkotaan memiliki kelebihan serta potensi dan kemampuan dalam menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan oleh industri yang bersangkutan. Dengan kata lain aglomerasi industri akan menjadi daya penarik terhadap arus urbanisasi atau migrasi yang terjadi. Sejalan dengan Khan, *et al* (2016) yang mengasumsikan bahwa industri-industri yang teraglomerasi di perkotaan akan menarik tenaga kerja dari perkotaan maupun perdesaan dengan

penawaran upah kerja yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut apakah teraglomerasinya sektor industri pengolahan di Provinsi Lampung dapat mempengaruhi arus urbanisasi atau migrasi penduduk sebagai dampak terserapnya tenaga kerja industri.

Pengembangan kawasan industri melalui pendekatan aglomerasi industri dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar wilayah yang terjadi. Aglomerasi menjelaskan bahwa konsentrasi kegiatan industri secara spasial muncul karena pelaku ekonomi berupaya mendapatkan penghematan aglomerasi baik karena membesarnya skala produksi, penghematan lokasi dan urbanisasi dengan mengambil lokasi yang saling berdekatan satu sama lain. Hal tersebut terjadi karena wilayah yang banyak mempunyai industri pengolahan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang hanya mempunyai sedikit industri pengolahan (Sodik dan Iskandar, 2007). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat keterkaitan aglomerasi sektor industri pengolahan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.



Keterangan :  $\longrightarrow$  : Menyatakan hubungan       $\dashrightarrow$  : Menyatakan pengaruh

Gambar 1 Diagram alir analisis pengaruh aglomerasi sektor industri pengolahan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Lampung



#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Diduga terdapat hubungan yang erat antara variabel aglomerasi sektor industri pengolahan dengan variabel nilai tambah sektor industri pengolahan dan urbanisasi penduduk
2. Diduga variabel aglomerasi sektor industri pengolahan memiliki pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional**

Konsep dasar dan definisi operasional merupakan pengertian dan petunjuk mengenai variabel yang akan diteliti untuk memperoleh dan menganalisis data yang berhubungan dengan penelitian. Konsep ini memperjelas dan menghindari kerancuan mengenai pengertian istilah-istilah dalam penelitian ini, maka dibuat konsep dasar dan definisi operasional sebagai berikut :

Pertumbuhan ekonomi adalah laju kenaikan/penurunan nilai PDRB pada tiap tahun yang terjadi antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, diukur dalam satuan persentase (%).

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit-unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit ekonomi disuatu wilayah, diukur dalam satuan rupiah (Rp).

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan pada suatu daerah dengan daerah lain yang berada dalam wilayah tertentu, diukur dalam satuan indeks.

Aglomerasi sektor industri pengolahan adalah pemusatan kegiatan sektor industri pengolahan dalam suatu wilayah, diukur dalam satuan indeks.

Penduduk adalah jumlah orang yang menetap di suatu daerah atau wilayah dalam waktu tertentu yang sudah tercatat secara sah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, diukur dalam satuan jiwa.

Urbanisasi penduduk adalah perluasan wilayah perkotaan akibat penambahan proporsi penduduk di daerah perkotaan, diukur dalam satuan persentase (%).

Variabel bebas adalah variabel yang memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Variabel bebas dalam penelitian ini yakni aglomerasi sektor industri pengolahan ( $X_1$ ), jumlah industri ( $X_2$ ), jumlah penduduk ( $X_3$ ), nilai tambah industri pengolahan ( $X_4$ ), dan urbanisasi penduduk ( $X_5$ ).

Variabel perantara (*intervening*) adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel perantara penelitian ini yakni ketimpangan pendapatan Provinsi Lampung (Y).

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independen). Variabel terikat penelitian ini yakni pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung (Z).

## B. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data panel. Keseluruhan data yang digunakan yakni data sekunder runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Periode waktu yang digunakan yaitu tahun 2016 – 2020. Penelitian dilakukan di Provinsi Lampung menggunakan data antar wilayah yaitu antar 15 Kabupaten/Kota. Kebutuhan data dan sumber perolehan data penelitian ini yakni sebagai berikut :

Tabel 4 .Kebutuhan data dan sumber perolehan data penelitian

No	Kebutuhan Data	Sumber Perolehan
1	PDRB ADHK	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Dalam Angka Badan Pusat Statistik (BPS)15 Kabupaten/Kota Dalam Angka
2	Jumlah tenaga kerja sektor industri	Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Dalam Angka Indikator Pasar Tenaga Kerja Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Lampung
3	Jumlah industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Direktori Indikator Industri Besar Sedang Provinsi Lampung Badan Pusat Statistik (BPS)15 Kabupaten/Kota Dalam Angka
4	Jumlah penduduk	Badan Pusat Statistik (BPS)15 Kabupaten/Kota Dalam Angka
5	PDRB sektor industri pengolahan	Badan Pusat Statistik (BPS)15 Kabupaten/Kota Dalam Angka
6	SHP ( <i>Shape File</i> ) peta 15 Kabupaten/Kota	Portal Informasi Geospasial Nasional (JIGN) Kebijakan satu peta

### C. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, tingkat aglomerasi. Tujuan analisis deskriptif menurut Pravitasari (2009) adalah memberikan gambaran dan interpretasi atas hasil analisis yang disajikan dalam bentuk grafis, dan gambar-gambar, serta menghitung ukuran-ukuran deskripsinya. Metode analisis yang digunakan yakni sebagai berikut:

#### 1. Analisis Aglomerasi Industri

Indeks Balassa digunakan untuk menjawab tujuan pertama penelitian yakni menganalisis aglomerasi sektor industri pengolahan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Kekhususan indeks ini adalah dapat digunakan untuk membedakan faktor spesialisasi di mana pada penelitian ini diwakili oleh tenaga kerja. Rumus Indeks Balassa menurut Sbergami (2002) adalah sebagai berikut :

$$IB = \frac{\left( \frac{E_{ij}}{\sum_j E_{ij}} \right)}{\left( \frac{\sum_i E_{ij}}{\sum_i \sum_j E_{ij}} \right)} \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

- I = Industri Pengolahan
- J = Provinsi/kabupaten
- E = Tenaga Kerja Industri
- $E_{ij}$  = Tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Kabupaten/Kota j di Provinsi Lampung
- $\sum_j E_{ij}$  = Tenaga kerja pada sektor industri pengolahan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
- $\sum_i E_{ij}$  = Tenaga kerja pada sektor industri pengolahan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
- $\sum_i \sum_j E_{ij}$  = Tenaga kerja total seluruh sektor di Provinsi Lampung.

Pembilang dari indeks ini menyajikan bagian wilayah dari total tenaga kerja di sektor industri manufaktur. Semakin terpusat suatu industri, semakin besar indeks Balassanya (Sbergami, 2002). Kriteria dari Indeks Balassa adalah sebagai berikut

- Indeks Balassa > 4 = Kuat
- Indeks Balassa 2-4 = Sedang
- Indeks Balassa < 2 = Lemah

## 2. Pola dan Struktur Pertumbuhan Ekonomi

Pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dijawab menggunakan dua alat analisis. Ke dua analisis tersebut dilakukan di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan hasil pada masing-masing wilayah. Ke dua alat analisis tersebut dijelaskan sebagai berikut :

### a. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Alat analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan suatu perbandingan mengenai besarnya peranan suatu sektor/industri disuatu daerah terhadap sektor/industri secara nasional atau di kabupaten terhadap peranan sektor/industri secara regional atau tingkat provinsi. Novita (2010) menjelaskan bahwa kelebihan alat analisis *location quotient* merupakan alat analisis sederhana yang dapat menunjukkan struktur perekonomian suatu daerah dan industri substitusi impor potensial atau produk-produk yang dapat dikembangkan untuk ekspor dan menunjukkan inudstri potensial yang dapat dianalisis lebih lanjut. Alat analisis *Location Quetiont* dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi dan pergeseran sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan sebagai indikator pertumbuhan wilayah (Adisasmita, 2005). Teknik ini menyajikan perbandingan antara kemampuan suatu sektor di daerah yang sedang diteliti dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah lebih luas. Untuk mengetahui sektor basis dan non basis perekonomian Provinsi Lampung dan di 15 kabupaten/kota yang mengacu pada formulasi Bendavid (1991) dengan persamaan sebagai berikut:

$$LQ = \frac{\frac{P_{ij}}{P_j}}{\frac{P_{ir}}{P_r}} \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

- LQ : *Location Quotient*  
 Pij : PDRB sektor i tahun tertentu Prov. Lampung/Kab/Kota  
 Pj : Total PDRB tahun tertentu Prov Lampung/Kab/Kota  
 Pir : PDRB sektor i tahun tertentu Nasional/Prov. Lampung  
 Pr : Total PDRB tahun tertentu Nasional/Prov. Lampung

Kriteria pengukuran nilai LQ yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Bila  $LQ > 1$  berarti tingkat spesialisasi sektor i di Provinsi Lampung/Kabupaten/Kota lebih besar dibanding sektor yang sama pada tingkat Nasional/Provinsi Lampung. Dan juga dapat disimpulkan bahwa sektor ini merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian di Provinsi Lampung/Kabupaten/Kota.
2. Bila  $LQ < 1$  berarti tingkat spesialisasi sektor i di di Provinsi Lampung/Kabupaten/Kota lebih kecil dibanding sektor yang sama pada tingkat Nasional/Provinsi Lampung. Dan juga dapat disimpulkan bahwa sektor ini merupakan sector non basis dan tidak potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian di Provinsi Lampung/Kabupaten/Kota.
3. Bila  $LQ = 1$  berarti tingkat spesialisasi sektor I di Provinsi Lampung/Kabupaten/Kota sama dengan sektor yang sama pada Nasional/Provinsi Lampung.

#### **b. Analisis *Shift Share***

Analisis *Shift Share* merupakan teknik yang digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih besar (regional dan nasional), sehingga memperlihatkan pola dan struktur perekonomian yang berkembang dalam kurun waktu tertentu. Dekiawan dan Budi (2017) mengatakan bahwa analisis *shift-share* merupakan analisis yang menggambarkan perubahan yang terjadi di suatu wilayah, dan dalam konteks perekonomian analisis ini melihat pola perubahan melalui pergeseran (*shift*) dan pangsa (*share*)

struktur perekonomian yang ditunjukkan oleh perubahan dan pergeseran dan dari tiga komponen yaitu *national share*, *industry mix*, dan *regional share*. Analisis *shift share* memiliki tiga komponen (Tarigan, 2005) yaitu:

1. *National share* merupakan perubahan di suatu wilayah (provinsi/kab/kota) yang dipengaruhi oleh perubahan di wilayah yang lebih luas (nasional/provinsi). Menurut Mitchell *et al.*, (2005) perubahan di wilayah akan terjadi apabila pertumbuhan sektor di wilayah memiliki pertumbuhan yang sama dengan wilayah yang lebih luas. Dalam *national share*, akan diperoleh informasi pengaruh perekonomian yang lebih luas (nasional/provinsi) terhadap wilayah yang lebih kecil (provinsi/kab/kota).
2. *Industry mix/Proportional Shift* merupakan perubahan pangsa wilayah yang melekat pada *industry mix* lokal dan menggambarkan spesialisasi wilayah dalam industri, apakah tumbuh lebih cepat atau tumbuh lebih lambat dalam wilayah yang lebih luas. *Industry mix* disebut juga dengan *proportional effect* atau *structural effect*. Dengan demikian melalui analisis *industry mix* akan diperoleh informasi perubahan perekonomian wilayah yang disebabkan oleh struktur perekonomian wilayah itu sendiri.
3. *Regional share/Differential shift* perubahan wilayah yang membawa perbedaan antara pertumbuhan wilayah dengan pertumbuhan di wilayah yang lebih luas. *Regional share* disebut juga dengan *competitive effect* (Mitchell *et al.*, 2005). Analisis *regional share* akan diperoleh informasi sektor ekonomi apa sajakah yang memiliki keunggulan kompetitif atau berdaya saing.

Penggunaan data untuk analisis *shift share* menggunakan data PDRB ADHK tahun awal 2012 nasional/Provinsi Lampung/kab/kota dan PDRB ADHK nasional/Provinsi Lampung/kab/kota tahun akhir 2020. Perhitungan analisis *shift share* dengan tiga komponen tersebut dijabarkan sebagai berikut ini :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

$D_{ij}$  : Perubahan suatu variabel regional sektor i diwilayah j dalam suatu kurun waktu tertentu.

- Nij** : Komponen pertumbuhan nasional/provinsi sektor i di wilayah j  
Merupakan *share* atau kontribusi komponen sektor i pada daerah yang di atasnya atau nasional terhadap pertumbuhan sektor i di daerah yang bersangkutan
- Mij** : Bauran industri/*proportional shift* sektor i di wilayah j  
Dengan ketentuan jika **Mij** Positif maka pertumbuhan sektor i lebih cepat dibandingkan sektor sejenis di tingkat daerah yang di atasnya. Jika **Mij** Negatif maka pertumbuhan sektor i lebih lambat di bandingkan sektor sejenis di tingkat daerah yang di atasnya
- Cij** : Keunggulan kompetitif/*differential shift* sektor i di wilayah j  
Dengan ketentuan jika **Cij** positif maka sektor i memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan sektor sejenis di tingkat daerah yang di atasnya. Jika **Cij** negatif maka sektor i memiliki daya saing yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor sejenis di tingkat daerah yang di atasnya.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

$$N_{ij} = E_{ij} \times r_n \dots\dots\dots(4)$$

$$M_{ij} = E_{ij} (r_{ij} \pm r_n) \dots\dots\dots(5)$$

$$C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} \pm r_n) \dots\dots\dots(6)$$

Keterangan :

**Eij** : PDRB sektor i Provinsi Lampung/Kab/Kota tahun awal

**rij** : Laju pertumbuhan sektor i Prov Lampung/Kab/Kota

**rin** : Laju pertumbuhan sektor i tingkat Nasional/Prov Lampung

**rn** : Laju pertumbuhan PDB tingkat Prov Lampung/Nasional

Perhitungan analisis *shift share* dengan tiga komponen (*national share, industrial mix/proportional shift, dan regional share/differential shift*) dilakukan pada tingkat Provinsi Lampung dengan wilayah acuan yakni nasional, serta di wilayah 15 kabupaten/kota dengan wilayah acuan Provinsi Lampung. Hasil analisis setiap sektor ekonomi dapat diposisikan kedalam matriks 4 (empat kuadran) yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 . Kuadran posisi relatif sektoral perekonomian

Kriteria	$C_{ij} > 0$	$C_{ij} < 0$
$M_{ij} > 0$	Kuadran I Unggulan	Kuadran III Potensial
$M_{ij} < 0$	Kuadran II Berkembang	Kuadran IV Tertinggal

Sumber : Mirdana *et al.*, (2018)



Keterangan :

1. Kuadran I (unggulan) terdiri dari sektor – sektor ekonomi baik komponen Mij maupun Cij positif artinya sektor didalam kuadran ini memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang kuat.
2. Kuadran II (potensial) terdiri dari sektor ekonomi yang komponen Mij negatif namun komponen Cij positif artinya sektor didalam kuadran ini memiliki pertumbuhan yang lambat namun daya saing yang kuat.
3. Kuadran III (berkembang) terdiri dari sektor ekonomi yang komponen Mij positif namun komponen Cij negatif artinya sektor didalam kuadran ini memiliki pertumbuhan yang cepat namun daya saing yang lemah.
4. Kuadran IV (tertinggal) terdiri dari sektor ekonomi baik komponen Mij dan komponen Cij negatif artinya sektor didalam kuadran ini memiliki pertumbuhan yang lamban dan daya saing yang lemah.

#### **4. Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah**

Pengukuran ketimpangan pendapatan dilakukan untuk mengetahui ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung dan ketimpangan pendapatan antar wilayah di 15 kabupaten/kota Provinsi Lampung. Pengukuran dua ketimpangan tersebut dilakukan dengan dua pendekatan yakni sebagai berikut :

##### **a. Indeks Williamson**

Indeks Williamson digunakan untuk menganalisis ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung. Pendekatan yang digunakan pada indeks williamson yakni PDRB per kapita di Provinsi Lampung. Hasil analisis indeks williamson akan memperlihatkan ketimpangan pendapatan Provinsi Lampung dengan provinsi lainnya (ketimpangan antar provinsi). Indeks Williamson secara garis besar mengukur seberapa kesenjangan yang ada pada suatu pembangunan pada suatu wilayah. Metode ini berasal dari perhitungan pendapatan regional perkapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah. Rumus Indeks Williamson (Kuncoro, 2004) adalah sebagai berikut

$$IW = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2 f_i / n}{Y}} \dots\dots\dots(7)$$

Keterangan:

IW = Indeks Williamson

$Y_i$	= PDRB per kapita daerah i (Kabupaten/Kota)
$Y$	= PDRB per kapita seluruh daerah (Provinsi)
$f_i$	= Jumlah penduduk daerah i (Kabupaten/Kota)
$n$	= Jumlah penduduk seluruh daerah (Provinsi)

Dengan menggunakan Indeks Williamson, dapat terlihat besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah. Besarnya nilai ini bernilai positif dan berkisar antara angka 0-1. Terdapat kriteria penilaian, yakni: apabila nilai indeks ini mendekati angka 1, hal tersebut berarti semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut. Namun apabila nilai Williamson mendekati angka 0 (nol) maka dapat dikatakan terjadi ketidakmerataan antar daerah masih kecil atau dapat dikatakan masih rendah.

#### **b. Indeks Entrophy Theil**

Indeks *entrophy theil* digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui ketimpangan pendapatan antar wilayah di 15 kabupaten/kota Provinsi Lampung. Indeks ini dapat mengukur tingkat kesenjangan berdasarkan sektor-sektor pembentuk perekonomian di masing-masing wilayah. Perhitungan indeks ini memiliki kegunaan menganalisis kecenderungan konsentrasi selama periode tertentu dan dapat mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan spasial. Menurut Kuncoro (2001), konsep *entrophy theil* yang dilihat dari distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri.

Penggambaran hasil analisis *entrophy theil* akan digambarkan dalam ketimpangan antar wilayah 15 kabupaten/kota atau kontribusi masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung terhadap ketimpangan Provinsi Lampung. Nilai diversitas *entrophy theil* juga menunjukkan bahwa penyebab ketimpangan tersebut disebabkan oleh karena kurang meratanya sektor-sektor ekonomi serta kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan ketimpangan dalam kabupaten atau kota dan menyumbangkan ketimpangan tersebut. Perhitungan indeks *entrophy theil* dilakukan dengan pendekatan sektoral masing-masing kabupaten/kota di Provinsi

Lampung dari tahun 2012-2020. Data yang digunakan yakni PDRB ADHK masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2012-2020. Hasil analisis akan memperlihatkan indeks *entropy* dari masing-masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Tahapan menghitung indeks *entropy theil* sebagai berikut :

$$P_{ij} = \frac{X_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p X_{ij}} \dots\dots\dots(8)$$

Keterangan :

- $P_{ij}$  : Peluang aktivitas sektor i di wilayah ke j  
 $X_{ij}$  : Total PDRB sektor i tahun tertentu  
 i : 1,2,...,n menunjukkan banyaknya baris (sub wilayah)  
 J : 1,2,...,n menunjukkan banyaknya kolom (aktivitas)

$$Q_{ij} = Ln(P_{ij}) \dots\dots\dots(9)$$

Keterangan:

- $Q_{ij}$  : Ln peluang aktivitas jenis ke j di wilayah ke i  
 $P_{ij}$  : peluang aktivitas jenis ke j di wilayah ke i  
 i : 1,2,...,n menunjukkan banyaknya baris (sub wilayah)  
 J : 1,2,...,n menunjukkan banyaknya kolom (aktivitas)

$$S_{ij} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p R_{ij} \dots\dots\dots(10)$$

Keterangan :

- $S_{ij}$  : Entropi total wilayah (S total)  
 $R_{ij}$  : Perkalian matriks  $-P_{ij}$  dan  $C_{ij}$   
 i : 1,2,...,n menunjukkan banyaknya baris (sub wilayah)  
 J : 1,2,...,n menunjukkan banyaknya kolom (aktivitas)

Indeks *Entropy Theil* yang semakin besar menunjukkan bahwa ketimpangan yang terdapat pada suatu daerah/wilayah semakin besar atau ketimpangan di daerah tersebut tidak merata. Demikian juga, apabila indeks *Entropy Theil* semakin kecil menunjukkan bahwa ketimpangan yang terdapat di suatu daerah/wilayah tersebut semakin kecil/rendah atau dapat dikatakan ketimpangan pada daerah tersebut semakin merata (Kuncoro, 2004).

## 5. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda, untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model kasual) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Kegunaan uji korelasi *path analysis* adalah untuk mengukur tingkat keeratan pengaruh antara dua atau lebih variabel. Analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen sekaligus memungkinkan pengujian terhadap variabel intervening. Selain itu analisis jalur merupakan suatu tipe analisis multivariate untuk mempelajari efek-efek langsung dan tidak langsung dari sejumlah variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel sebab terhadap variabel lainnya yang disebut variabel akibat. Didalam menggambarkan diagram jalur yang perlu diperhatikan adalah anak panah berkepala satu merupakan hubungan regresi dan anak panah berkepala dua adalah hubungan korelasi (Ghozali, 2016).

Diagram jalur adalah alat untuk melukiskan secara grafis, struktur hubungan kausalitas antar variabel independen, intervening dan dependen. Model diagram jalur dibuat berdasarkan variabel yang diteliti. Data diolah menggunakan alat statistika dan ekonometrika SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*). Metode yang digunakan yakni metode kuadrat terkecil atau sering juga disebut dengan metode *ordinary least square* (OLS).

### a. Uji Asumsi Klasik

Uji prasyarat dilakukan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukan analisis pada data. Hipotesis pada penelitian ini dianalisis menggunakan uji analisis jalur. Sebelum uji hipotesis maka perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan. Uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu: uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

1) Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Menurut Ghozali (2016) model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Banyak cara untuk menguji multikolinieritas pada data. Penelitian ini menggunakan uji *person correlation* untuk melihat ada atau tidaknya masalah multikolinieritas pada data.

2) Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2016) uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membuktikan apakah terdapat heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan grafik plot, *uji park*, *uji glejser*, dan *uji white*. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari  $\alpha=5\%$  atau 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas berada diatas  $\alpha=5\%$  atau 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

## **b. Pengujian Hipotesis**

Setelah koefisien jalur dihitung selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk membuktikan variabel independen yang sedang diteliti berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis nol ( $H_0$ ) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen sedangkan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

1) Uji-F

Uji – F adalah statistik uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan.

Jika nilai probabilitas F-statistic  $<$  taraf nyata ( $\alpha$ ), maka keputusannya  $H_0$  ditolak sehingga kesimpulannya adalah minimal ada satu variabel bebas yang memengaruhi variabel terikat. Hipotesis yang digunakan :

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_5 = 0$$

(variabel bebas ( $X_1, X_2, \dots, X_5$ ) secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat)

$$H_1 : \text{minimal ada satu } i \text{ dimana } b_i \neq 0$$

(variabel bebas ( $X_1, X_2, \dots, X_5$ ) secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat)

## 2) Uji Parsial (t)

Dalam penelitian ini uji – t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas yang menjadi faktor-faktor dalam memengaruhi variabel perantara dan variabel dependen. Hipotesis dalam uji – t yaitu:  $\beta = 0$  dengan  $t = 1, 2, 3, \dots, n : \neq 0$ . Jika nilai probabilitas t-statistic  $<$  taraf nyata ( $\alpha$ ), maka keputusannya tolak. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel bebas yang diuji berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

## 3) Uji $R^2$

Uji koefisien determinasi atau uji  $R^2$  dilakukan untuk mengukur besarnya keragaman variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang terdapat di dalam model. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 sampai 1. Nilai  $R^2$  yang semakin mendekati 1 menunjukkan semakin baik keragaman variabel terikat yang mampu dijelaskan oleh variabel-variabel bebas tersebut.

### c. Uji Hubungan Antar Variabel

Uji hubungan atau korelasi antar variabel dilakukan untuk menjawab tujuan ke tiga penelitian. Analisis jalur dalam penelitian ini akan memperlihatkan hubungan atau korelasi antar variabel independen. Analisis korelasi dapat diartikan sebagai metode statistik yang digunakan dalam mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi dapat bernilai positif atau negatif dan nilai koefisien korelasi berkisar antar -1 sampai dengan +1. Korelasi negatif ditunjukkan dengan koefisien korelasi yang bernilai negatif begitu juga sebaliknya korelasi positif

ditunjukkan dengan koefisien korelasi yang bernilai positif. Interpretasi terhadap koefisien korelasi dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Interpretasi terhadap koefisien korelasi

Besar koefisien korelasi (positif/negative)	Interpretasi koefisien korelasi
0,00 – 1,99	Sangat rendah
0,20 – 0,39	Rendah
0,40 – 0,59	Sedang
0,60 – 0,79	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono, 2010

#### d. Analisis Jalur (*Path Analyst*)

Analisis jalur dalam penelitian ini memiliki dua struktur persamaan. Pengujian akan dilakukan dua tahap, dimana pada tahap pertama akan diuji pengaruh langsung aglomerasi sektor industri pengolahan ( $X_1$ ), jumlah industri ( $X_2$ ), jumlah penduduk ( $X_3$ ), nilai tambah ( $X_4$ ), dan urbanisasi penduduk ( $X_5$ ) terhadap ketimpangan pendapatan ( $Y$ ). Bentuk sturktural persamaan pertama yakni sebagai berikut :

$$Y = \rho_{Y1}X_1 + \rho_{Y2}X_2 + \rho_{Y3}X_3 + \rho_{Y4}X_4 + \rho_{Y5}X_5 + e_1 \dots\dots\dots(11)$$

Kemudian struktur persamaan pada tahap kedua akan diuji pada pengaruh langsung aglomerasi sektor industri pengolahan ( $X_1$ ), jumlah industri ( $X_2$ ), jumlah penduduk ( $X_3$ ), nilai tambah ( $X_4$ ), urbanisasi penduduk ( $X_5$ ) dan ketimpangan pendapatan ( $Y$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi ( $Z$ ) di Provinsi Lampung. Bentuk sturktural persamaan kedua yakni sebagai berikut

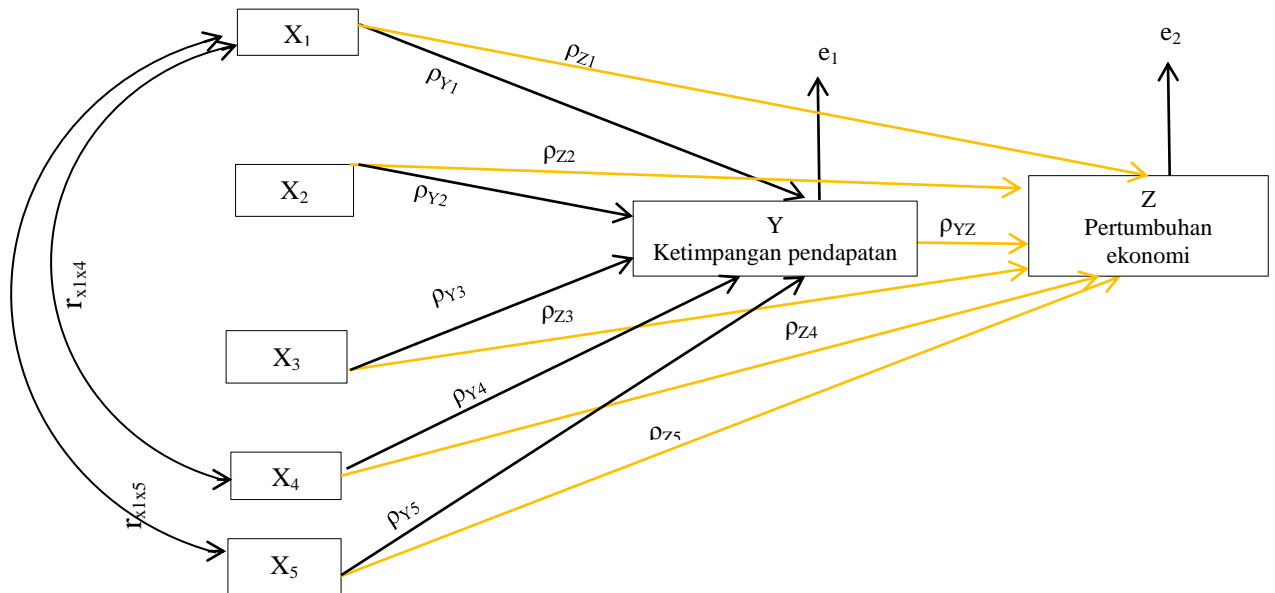
$$Z = \rho_{YZ}Y + \rho_{Z1}X_1 + \rho_{Z2}X_2 + \rho_{Z3}X_3 + \rho_{Z4}X_4 + \rho_{Z5}X_5 + e_2 \dots\dots\dots (12)$$

Keterangan:

- $Y_1$  = Variabel ketimpangan pendapatan
- $Z$  = Variabel pertumbuhan ekonomi
- $X_1$  = Variabel aglomerasi
- $X_2$  = Variabel jumlah industri
- $X_3$  = Variabel jumlah penduduk
- $X_4$  = Variabel nilai tambah
- $X_5$  = Variabel urbanisasi penduduk
- $e_1$  = *error* sub struktur 1

$e_2$  = error sub struktur 2

Jika digambarkan dalam bentuk diagram jalur untuk dua struktur persamaan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram jalur penelitian

Keterangan:

- = Langsung terhadap pertumbuhan ekonomi
- = Melalui variabel perantara
- $Y$  = Variabel ketimpangan pendapatan
- $Z$  = Variabel pertumbuhan ekonomi
- $X_1$  = Variabel aglomerasi
- $X_2$  = Variabel jumlah industri
- $X_3$  = Variabel jumlah penduduk
- $X_4$  = Variabel nilai tambah
- $X_5$  = Variabel urbanisasi penduduk
- $\rho$  (rho) = Koefisien masing – masing variabel
- $\rho_{Y1}$  = Koefisien jalur variabel aglomerasi industri terhadap ketimpangan pendapatan
- $\rho_{Y2}$  = Koefisien jalur variabel jumlah industri terhadap ketimpangan pendapatan
- $\rho_{Y3}$  = Koefisien jalur variabel jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan
- $\rho_{Y4}$  = Koefisien jalur variabel nilai tambah terhadap ketimpangan pendapatan
- $\rho_{Y5}$  = Koefisien jalur variabel urbanisasi penduduk terhadap ketimpangan pendapatan



$\rho Y$	= Koefisien jalur variabel aglomerasi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi
$\rho YZ$	= Koefisien jalur ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi
$r_{X_1 X_2 X_3 X_4 X_5}$	= Koefisien korelasi variabel aglomerasi industri , jumlah industri jumlah penduduk, nilai tambah dan urbanisasi penduduk
$\varepsilon$ (epsilon)	= Faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen (diluar yang dipengaruhi yang tidak diteliti)

Nilai pengaruh langsung masing-masing variabel dapat dilihat dari hasil analisis regresi yakni pada nilai *Standardized Coefficients Beta* dengan melihat tingkat signifikansi. Pengaruh tidak langsung masing-masing variabel yang melalui variabel perantara diperoleh dari nilai masing-masing *Standardized Coefficients Beta* struktur persamaan pertama dikalikan dengan nilai *Standardized Coefficients Beta* variabel Y (ketimpangan pendapatan) terhadap Z (pertumbuhan ekonomi). Hasil analisis pengaruh langsung dan tidak langsung dapat kategorikan sebagai berikut :

1. Apabila nilai pengaruh tidak langsung  $>$  pengaruh langsung, menunjukkan bahwa secara tidak langsung variabel independen melalui Y berpengaruh secara signifikan terhadap Z.
2. Apabila nilai pengaruh tidak langsung  $<$  pengaruh langsung, menunjukkan bahwa secara tidak langsung variabel independen melalui Y tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Z.

## IV. GAMBARAN UMUM

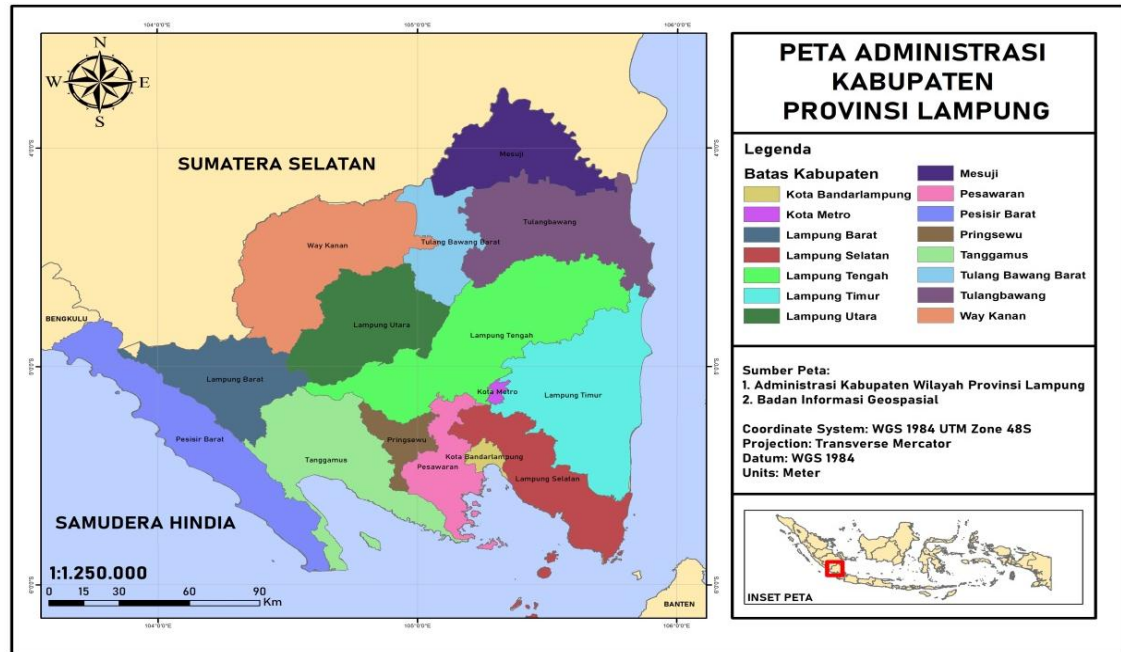
### A. Gambaran Umum Provinsi Lampung

#### 1. Kondisi Fisik Daerah

Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103°40" (BT) Bujur Timur sampai 105°50" (BT) Bujur Timur dan 3°45" (LS) Lintang Selatan sampai 6°45" (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km (Badan Pusat Statistik, 2020) termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai kearah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan kurang lebih 24.820 km. Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk empat wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km).

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari Kota Kembar Tanjungkarang dan Telukbetung memiliki wilayah. Memiliki luas 34.623,80 km<sup>2</sup> provinsi ini terdiri atas daerah pesisir, pulau kecildan laut. Luas seluruh daratannya mencapai 3.528.835 ha, sementara garis pantainya sepanjang 1.105 km. Kawasan bagian barat merupakan daerah pegunungan yang menjadi bagian dari rangkaian Bukit Barisan. Tercatat ada tiga buah gunung di sana dengan tinggi lebih dari 2.000 m dari permukaan laut (dpl), yaitu Gunung Pesagi, Gunung Tanggamus, dan Gunung Tangkit Tebak. Provinsi Lampung secara geografis terletak diujung selatan Pulau Sumatera. Letaknya sangat strategis karena provinsi ini menjadi sentral penghubung antara Jawa dan Sumatera. Batas administrasi wilayah Provinsi Lampung adalah

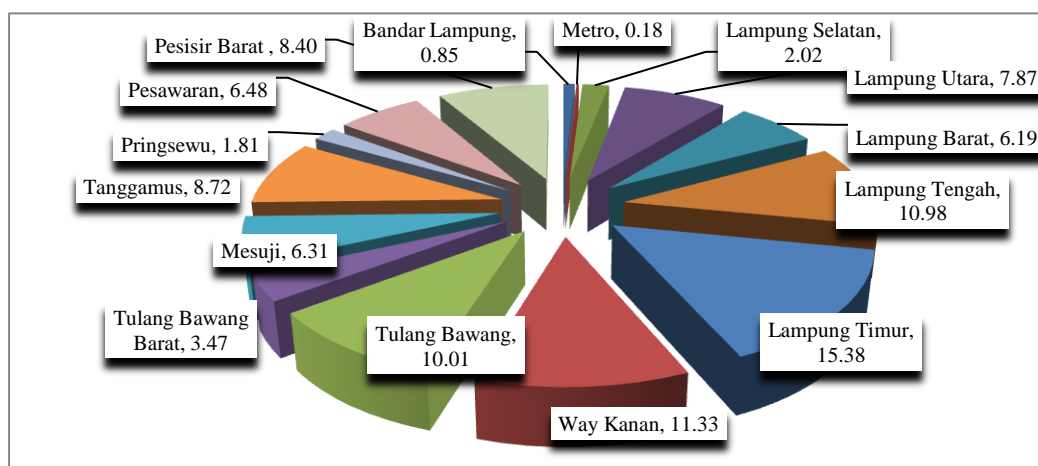
- a. Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
- b. Sebelah Selatan : Selat Sunda
- c. Sebelah Barat : Samudera Indonesia
- d. Sebelah Timur : Laut Jawa



Gambar 3 Peta administrasi kabupaten/kota Provinsi Lampung

Sumber : Peta diolah, 2021

Secara administrasi Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten/kota yang memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Kabupaten Lampung Timur merupakan kabupaten terluas dibandingkan dengan 14 kabupaten/kota lainnya, yaitu sebesar 15,38 persen dari luas Provinsi Lampung. Sementara Kota Metro memiliki luas wilayah terkecil sebesar 0,18 persen. Persentase luas wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2020 dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Persentase luas wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2020

Sumber : Data diolah, 2021

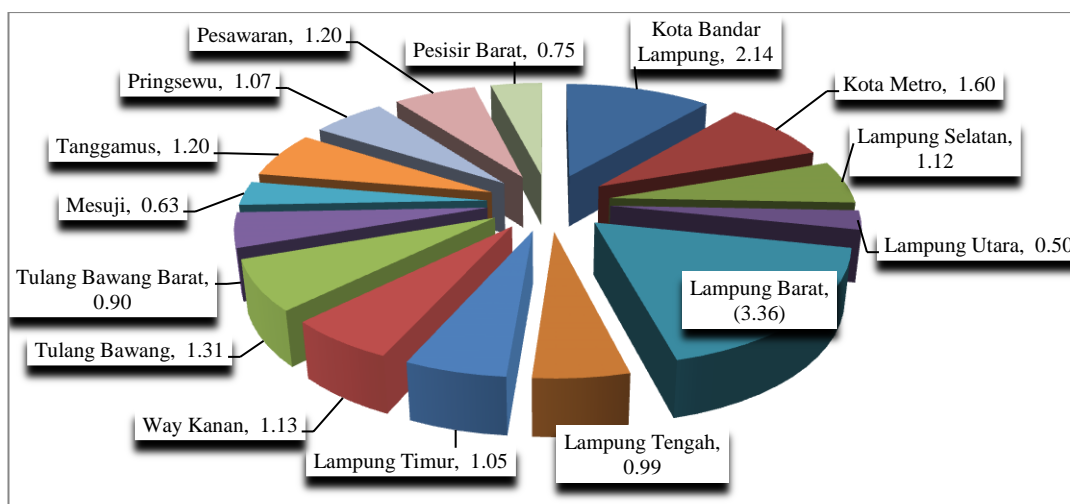
## 2. Kondisi Demografi Provinsi Lampung

Pada tahun 2012 jumlah penduduk di Provinsi Lampung yakni sebesar 7.914.241 jiwa. Peningkatan pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung tercatat terus bertambah hingga tahun 2020 dengan rata-rata sebesar 0,93 persen per tahunnya. Dilihat dari distribusi antar-kabupaten/kota di tahun 2020 terdapat tiga wilayah dengan jumlah penduduk diatas 1 juta jiwa yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Lampung Timur. Kepadatan Penduduk di 15 kabupaten/ kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Bandar Lampung yakni sebesar 3.552 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Pesisir Barat sebesar 53 jiwa/km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2020).

Jika dibandingkan antar provinsi se-Sumatera, Provinsi Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu mencapai lebih dari 14,6 juta jiwa disusul Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung. Sedangkan dari sisi kepadatan penduduk, Provinsi Kepulauan Riau adalah yang terpadat penduduk yaitu sebanyak 273 jiwa/km<sup>2</sup>. Provinsi Lampung menempati urutan kedua yaitu sebanyak 244 jiwa/km<sup>2</sup>, disusul Sumatera Utara dengan kepadatan 201 jiwa/km<sup>2</sup>(Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2019). Rencana pengembangan permukiman dari tingkat kepadatan penduduk berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung tahun 2009-2029 akan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kawasan permukiman berkepadatan tinggi akan diarahkan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu.
2. Kawasan permukiman berkepadatan sedang akan diarahkan di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang
3. Kawasan permukiman berkepadatan rendah akan diarahkan di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

Jumlah penduduk hingga tahun 2020 telah mencapai 8.521.201 orang yang menyebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Dilihat dari sembilan tahun terakhir (2012-20220) jumlah penduduk di Provinsi Lampung mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya kabupaten/kota. Hal yang berbeda ditunjukkan dari laju pertumbuhan penduduk bahwa terdapat beberapa wilayah yang mengalami penurunan jumlah penduduk. Kabupaten Lampung Barat memiliki laju pertumbuhan penduduk yang bernilai negatif atau menurun dengan rata-rata sebesar 3,36 persen sedangkan kabupaten dengan laju penambahan penduduk terbesar yakni Kota Bandar Lampung sebesar 2,14 persen. Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 9 tahun terakhir (2012-2020) dapat dilihat pada Gambar 5.

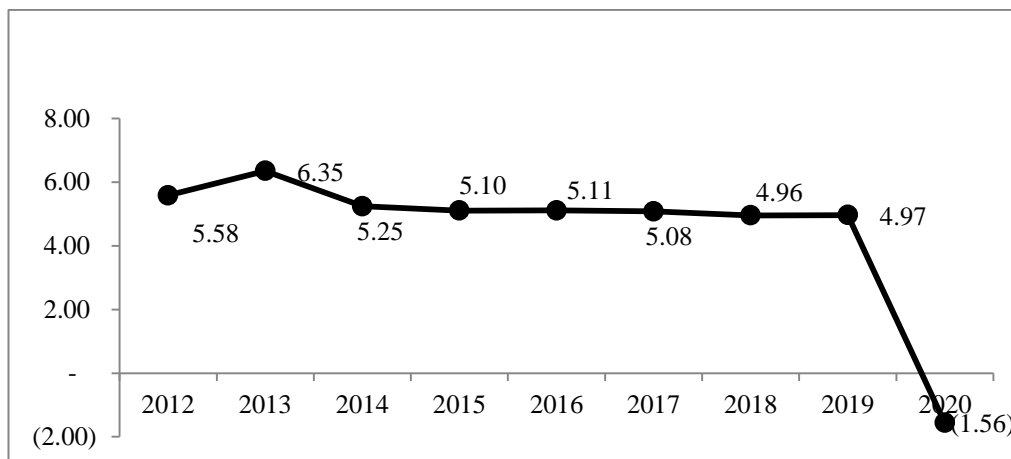


Gambar 5. Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung tahun 2012-2020

Sumber : Data diolah, 2021

### 3. Kondisi Perekonomian Provinsi Lampung

Kinerja perekonomian secara keseluruhan salah satunya dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kinerja perekonomian yang terjadi dapat memperlihatkan kondisi perekonomian Provinsi Lampung. Kondisi perekonomian yang terjadi dapat tumbuh secara positif maupun negatif. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tahun 2012-2020

Tabel 7. Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha ADHK (2010) Provinsi Lampung tahun 2012-2020 (Juta Rupiah)

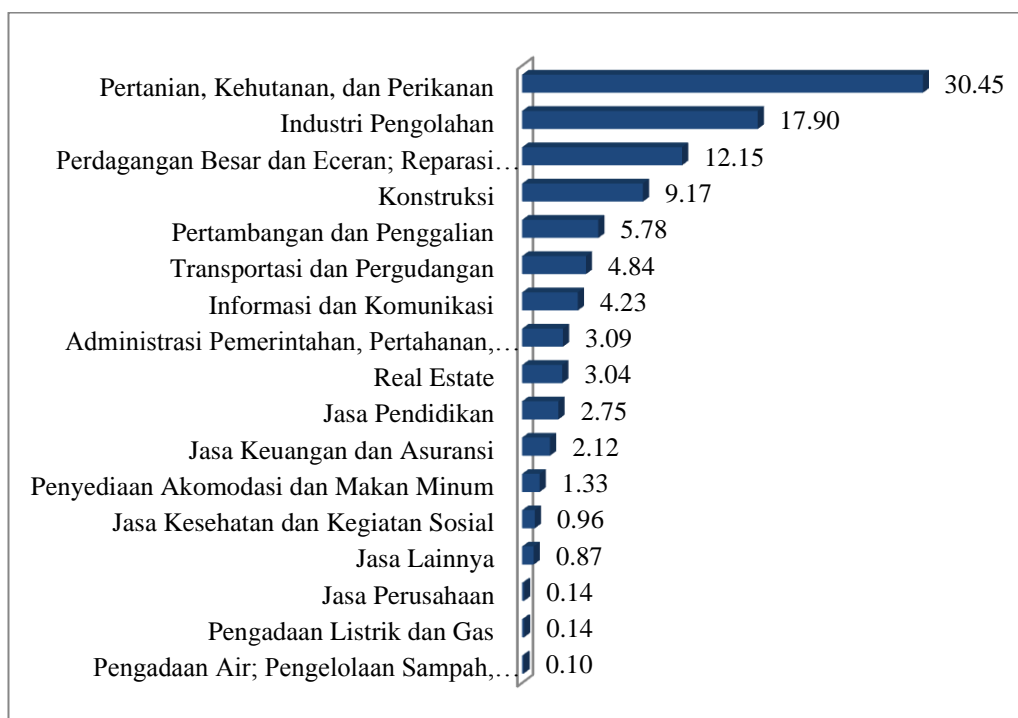
No	Tahun	PDRB (Rp)
1	2012	168.697.025,00
2	2013	180.142.334,67
3	2014	190.114.181,79
4	2015	200.341.558,31
5	2016	211.140.504,42
6	2017	222.446.597,04
7	2018	234.049.899,29
8	2019	246.280.886,16
9	2020	242.498.252,63

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2020

Gambar 6, memperlihatkan bahwa sejak tahun 2012 hingga tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung tumbuh secara positif maupun negatif. Terlihat pada tahun 2013 ekonomi Provinsi Lampung tumbuh secara positif dengan laju pertumbuhan sebesar 6,35 persen lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,58 persen. Tahun 2014 hingga tahun 2020 jika dilihat laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung terus mengalami penurunan. Tabel 7 memperlihatkan jumlah PDRB Provinsi Lampung pada tahun 2014-2019 menunjukkan penambahan PDRB di setiap tahunnya. Berbeda dengan hal tersebut, jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya penurunan atau tumbuh stagnan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa ekonomi di Provinsi Lampung masih tumbuh namun secara lambat.

Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terlihat signifikan yakni pada tahun 2020 hingga sebesar – 1,56 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2020 masih tumbuh lebih rendah jika dibandingkan dengan Sumatera yang tercatat sebesar -1,19 persen, namun lebih baik jika dibandingkan dengan ekonomi Nasional yakni -2,07 persen. Secara spasial, Provinsi Lampung berada pada peringkat ke-8 provinsi untuk pertumbuhan tertinggi tahun 2020 se-Sumatera. Secara kumulatif, kinerja pertumbuhan ekonomi Lampung pada tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya akibat penurunan permintaan sebagai dampak pandemi Covid-19 (Bank Indonesia Publikasi, 2021).

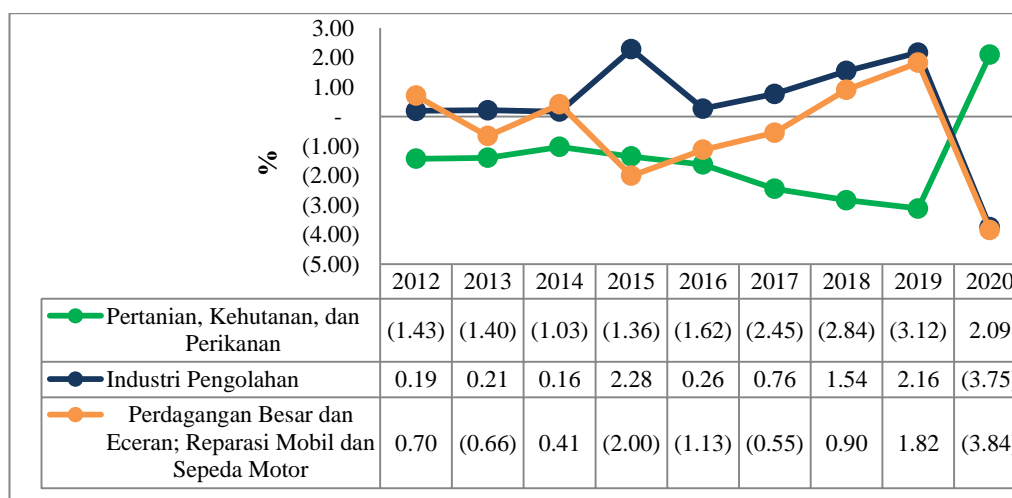
Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dibentuk oleh beberapa sektor lapangan usaha. Sektor-sektor lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian di Provinsi Lampung. Terdapat 17 sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap PDRB di Provinsi Lampung tahun 2012-2020 dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB di Provinsi Lampung tahun 2012-2020

Sumber : Data diolah, 2021

Gambar 7, menunjukkan kontribusi dari 17 sektor lapangan usaha terhadap PDRB di Provinsi Lampung. Terdapat tiga sektor lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar dalam kurun waktu 2012 hingga 2020. Ketiga sektor tersebut yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan rata-rata sebesar 30,45 persen; sektor industri pengolahan sebesar 17,90 persen; dan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 12,15 persen. Jika dijabarkan laju pertumbuhan dari tiga sektor lapangan usaha terbesar tahun 2012 -2020 dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Laju pertumbuhan sektor lapangan usaha terbesar di Provinsi Lampung tahun 2012-2020

Sumber : Data diolah, 2021.

Gambar 8, memperlihatkan perkembangan sektor lapangan usaha terbesar terhadap PDRB di Provinsi Lampung tahun 2012-2020. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor dengan penyumbang terbesar terhadap PDRB. Apabila dilihat dari Gambar 8 sektor pertanian, kehutan, dan perikanan menggambarkan pertumbuhan yang relatif menurun disetiap tahunnya dengan penurunan rata-rata sebesar 1,46 persen per tahunnya. Tahun 2020 menunjukkan laju pertumbuhan yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Laporan Perekonomian Provinsi Lampung (2020), sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan tumbuh lebih tinggi karena didorong oleh adanya panen raya padi, gula, dan komoditas hortikultura. Selain itu, masih positifnya pertumbuhan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terjadi seiring dengan peningkatan produksi pertanian



yang bersumber dari penambahan luas tanam, prosuktivitas, dan cuaca yang mendukung disepanjang tahun 2020.

Kontribusi terbesar ke dua yakni dari sektor lapangan usaha industri pengolahan dengan rata-rata sebesar 17,90 persen per tahunnya. Jika dilihat pada Gambar 8, industri pengolahan memperlihatkan pertumbuhan yang positif meningkat disetiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 0,42 persen per tahunnya. Pertumbuhan di sektor industri pengolahan terlihat tumbuh secara positif, namun tahun 2020 sektor industri pengolahan tumbuh secara lambat terhadap ekonomi daerah. Hal tersebut dikarenakan sektor industri pengolahan menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup besar akibat dari pandemi Covid 19. Perbaikan ekonomi Lampung pada Triwulan IV 2020 terutama ditopang oleh peningkatan kinerja lapangan usaha informasi dan komunikasi yang selama pademi Covid 19 cenderung mengalami peningkatan. Sementara itu, pemulihan aktivitas ekonomi secara perlahan mendorong perbaikan di sektor lapangan usaha industri pengolahan sebesar 1,13 persen, setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 10,17 persen yoy.

Sektor lapangan usaha lainnya yang mengalami penurunan yakni pada sektor perdagangan besar dan eceran. Sektor tersebut masih menjadi sektor ke tiga sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB di Provinsi Lampung. Jika dilihat pada Gambar 8 memiliki pertumbuhan yang relatif lambat sejak tahun 2012 hingga 2020 yakni sebesar 0,07 persen per tahunnya. Penurunan yang terjadi ditahun 2020 juga disebabkan karena penurunan penjualan kendaraan bermotor akibat masih lemahnya preferensi masyarakat untuk membeli barang tahan lama serta adanya pembatasan sosial karena pandemi Covid 19.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung yang digambarkan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berasal dari Kabupaten/Kota yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan sumberdaya yang dimiliki masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung akan memberikan kontribusi berbeda yang berasal dari berbagai sektor lapangan usaha. PDRB masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2012-2020 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 . PDRB ADHK 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2012-2020 (juta rupiah)

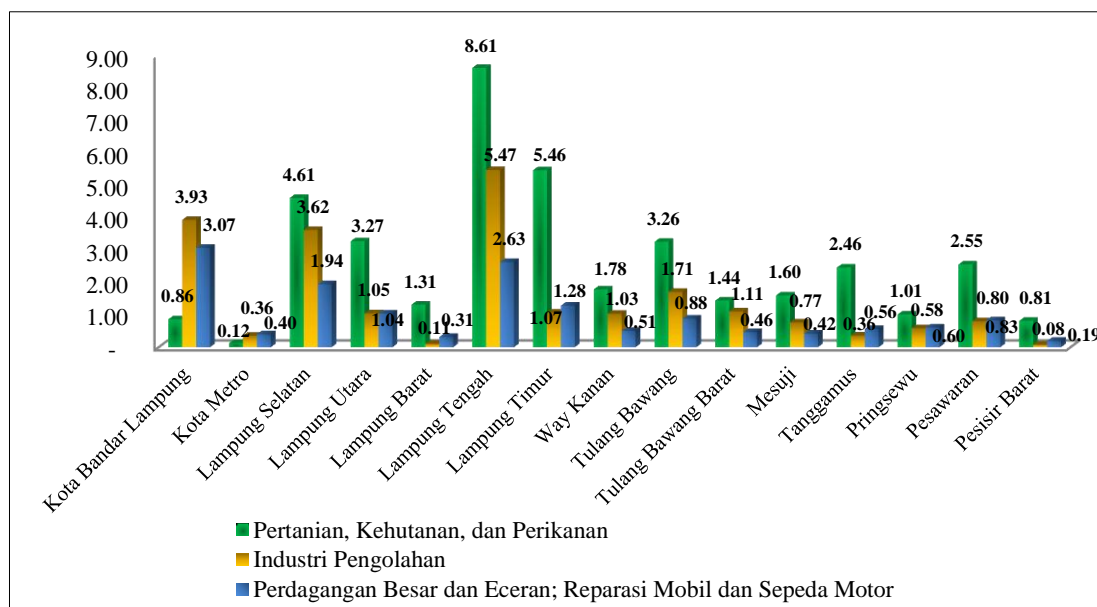
Kab/Kota	Thn	PDRB	Kab/Kota	Thn	PDRB	Kab/Kota	Thn	PDRB
Bandar Lampung	2012	25.403.655	Lampung Tengah	2012	32.702.370	Mesuji	2012	4.840.740
	2013	27.123.918		2013	34.815.760		2013	5.139.850
	2014	29.036.173		2014	36.794.360		2014	5.432.250
	2015	30.873.560		2015	38.773.800		2015	5.716.230
	2016	32.859.033		2016	40.949.380		2016	6.008.000
	2017	34.921.076		2017	43.107.060		2017	6.320.660
	2018	37.084.488		2018	45.406.240		2018	6.655.510
	2019	39.385.646		2019	47.837.710		2019	7.005.860
	2020	38.656.703		2020	47.347.960		2020	6.911.130
Metro	2012	2.876.025	Lampung Timur	2012	21.455.319	Tanggamus	2012	7.470.400
	2013	3.074.122		2013	23.378.060		2013	7.975.600
	2014	3.262.462		2014	24.049.295		2014	8.445.980
	2015	3.453.953		2015	25.151.473		2015	8.910.240
	2016	3.657.867		2016	26.292.188		2016	9.371.990
	2017	3.865.010		2017	27.496.840		2017	9.858.640
	2018	4.084.825		2018	28.518.177		2018	10.352.100
	2019	4.312.585		2019	29.606.132		2019	10.872.100
	2020	4.235.495		2020	28.929.627		2020	10.679.330
Lampung Selatan	2012	20.782.070	Way Kanan	2012	6.687.926	Pringsewu	2012	5.367.487
	2013	22.113.690		2013	7.041.004		2013	5.712.839
	2014	23.396.560		2014	7.440.123		2014	6.041.410
	2015	24.654.680		2015	7.832.393		2015	6.356.990
	2016	25.942.700		2016	8.233.786		2016	6.677.349
	2017	27.359.530		2017	8.654.296		2017	7.018.698
	2018	28.791.450		2018	9.102.880		2018	7.370.494
	2019	30.268.820		2019	9.573.871		2019	7.742.153
	2020	29.744.340		2020	9.462.809		2020	7.648.789
Lampung Utara	2012	11.333.804	Tulang Bawang	2012	10.827.940	Pesawaran	2012	7.954.320
	2013	12.065.942		2013	11.559.180		2013	8.447.690
	2014	12.765.479		2014	12.199.150		2014	8.920.050
	2015	13.458.839		2015	12.811.500		2015	9.368.560
	2016	14.145.712		2016	13.505.420		2016	9.843.440
	2017	14.882.707		2017	14.242.040		2017	10.336.500
	2018	15.675.556		2018	15.014.450		2018	10.858.920
	2019	16.508.060		2019	15.827.470		2019	11.402.110
	2020	16.269.350		2020	15.612.300		2020	11.258.700
Lampung Barat	2012	3.441.000	Tulang Bawang Barat	2012	5.388.180	Pesisir Barat	2012	2.165.790
	2013	3.677.320		2013	5.731.550		2013	2.285.810
	2014	3.881.890		2014	6.046.680		2014	2.402.320
	2015	4.088.450		2015	6.370.000		2015	2.520.890
	2016	4.293.430		2016	6.705.660		2016	2.654.550
	2017	4.509.540		2017	7.078.040		2017	2.795.960
	2018	4.738.850		2018	7.451.060		2018	2.944.900
	2019	4.984.640		2019	7.850.730		2019	3.103.000
	2020	4.927.800		2020	7.747.260		2020	3.066.660

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2020.

Tabel 8 memperlihatkan PDRB ke 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang terlihat bahwa tahun 2020 secara keseluruhan PDRB masing-masing kabupaten/kota mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan pandemi Covid yang menyebabkan kontribusi masing-masing sektor ekonomi mengalami penurunan. Rata-rata dalam kurun waktu tahun 2012-2020 kabupaten dengan

pertumbuhan ekonomi lambat yakni Kabupaten Lampung Barat sebesar minus 2,03 persen. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2012 Kabupaten Lampung Barat mengalami pemekaran wilayah yakni Pesisir Barat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2012-2020 yakni sebesar 3,00 persen per tahunnya.

Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah memiliki nilai PDRB yang tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hal tersebut dapat dikarenakan perbedaan peruntukan wilayah dan sumberdaya yang dimiliki. Sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih menjadikan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor utama pendorong ekonomi wilayah dengan keunggulan memiliki lahan pertanian yang memadai. Kota Bandar Lampung memiliki sektor perdagangan sebagai sektor unggulan, sektor industri pengolahan yang juga merupakan unggulan daerah. Jika didasarkan pada tiga sektor lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB di Provinsi Lampung maka gambaran kontribusi dari Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Lampung didasarkan pada tiga sektor lapangan usaha terbesar tahun 2012-2020

Sumber: Data diolah, 2021.

Gambar 9, memperlihatkan terdapat lima kabupaten di Provinsi Lampung dengan kontribusi yang cukup besar untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yakni berasal dari Kabupaten Lampung Tengah (8,61%), Lampung Timur (5,46%), Lampung Selatan (4,61%), Tulang Bawang (3,26%), dan Pesawaran (2,55%). Sektor industri pengolahan yang memiliki kontribusi terbesar ke dua terhadap PDRB Provinsi Lampung memiliki dukungan dari beberapa kabupaten yakni Kabupaten Lampung Tengah (5,47%), Kota Bandar Lampung (3,93%), Lampung Selatan (3,62%), Tulang Bawang (1,77%), dan Tulang Bawang Barat (1,11%). Jika dilihat antara sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan terdapat beberapa kabupaten yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap ekonomi Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Tulang Bawang dengan kontribusi di sektor pertanian yang cukup besar serta sektor industri pengolahan yang cukup besar juga memperlihatkan bahwa pada daerah-daerah tersebut memiliki potensi dalam pengembangan sektor industri pengolahan di masa mendatang dengan dukungan sumber bahan baku.

Berbeda dengan beberapa kabupaten tersebut, Kota Bandar Lampung hanya memiliki kontribusi 0,86 persen di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, namun pada sektor industri pengolahan mampu menjadi daerah dengan kontribusi terbesar ke dua di Provinsi Lampung. Hal tersebut dikarenakan kedudukan Kota Bandar Lampung pada posisi geografis yang strategis yang didukung oleh aksesibilitas yang tinggi mampu mendorong kegiatan di sektor industri pengolahan. Bandar Lampung menjadi salah satu unggulan untuk menjadi pusat pertumbuhan Sumatera bagian Selatan. RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, dan RTRW Kota Bandar Lampung 2010-2030 mempertimbangkan bahwa kedudukan Kota Bandar Lampung sebagai pintu gerbang terhadap Pulau Jawa; adanya jalur lintas Trans Sumatera dan pelabuhan Panjang. Hal ini selaras dengan arah kebijaksanaan penataan ruang nasional, regional, dan lokal untuk peruntukan Kota Bandar Lampung.

Sementara itu sumbangan terbesar pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yakni dari Kabapten/Kota Bandar Lampung

(3,07%), Lampung Tengah (2,63%), Lampung Selatan (1,94%), Lampung Timur (1,28%), dan Lampung Utara (1,04%). Perbedaan kontribusi terhadap ekonomi di Provinsi Lampung didasarkan pada masing-masing potensi daerah yang dimiliki. Potensi tersebut akan mendorong pertumbuhan di beberapa sektor dan daerah ikut tumbuh baik dari segi ekonomi dan pengolahan sumber bahan baku.

#### **4. Potensi Pengembangan Wilayah**

Dari aspek geografis, Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang Pulau Sumatera dari arah Pulau Jawa. Posisi yang strategis tersebut dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Jarak Provinsi Lampung yang relatif dekat dengan pusat pertumbuhan nasional Jakarta dan salah satu pusat pertumbuhan di Sumatera yaitu Palembang. Jarak yang relatif dekat memungkinkan terjadinya *spill over effect* atau limpahan dari perkembangan industri dan investasi di kedua kutub pertumbuhan tersebut. Berdasarkan pencapaian RPJMN 2015-2019 secara keseluruhan perekonomian membaik didukung oleh seluruh provinsi. Secara sektoral pertumbuhan ekonomi ditopang oleh industri pengolahan. Pengembangan kawasan industri Tanggamus diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi Lampung yang lebih tinggi.

Dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam ekonomi Provinsi Lampung masih menjadi yang terbesar. Selain itu, perkembangan sektor industri pengolahan juga menunjukkan trend positif. Terlihat pada tahun 2012 hingga tahun 2019 rata-rata pertumbuhan sektor industri pengolahan yakni sebesar 0,17 per tahunnya, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,61 persen akibat dampak dari pandemi Covid 19. Berdasarkan hal tersebut sektor industri pengolahan di Provinsi Lampung mulai tumbuh dan berkembang. Keberhasilan industrialisasi yang makin berkembang dapat dikaitkan dengan konsep pembangunan ekonomi. Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah prioritas pengembangan kawasan industri di Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024.

Arahan rencana pengembangan kawasan industri yang tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung 2009-2029 memperlihatkan bahwa pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten di Provinsi Lampung, yaitu pada lokasi-lokasi yang berada pada sentra penghasil sumberdaya (bahan baku). Pola yang akan dikembangkan diarahkan pada bagian tengah provinsi ke arah timur provinsi. Industri besar terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran. Provinsi Lampung terus berupaya dalam percepatan industrialisasi daerah yang didukung oleh sumberdaya potensial. Sembilan kawasan Industri yang akan dikembangkan sebagai percepatan pengembangan kawasan industri di Provinsi Lampung. Hal tersebut tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2019-2024. Sembilan kawasan industri tersebut diantaranya :

1. Pembangunan Kawasan Industri Maritim di Tanggamus
2. Pembangunan Kawasan Industri Way Pisang di Lampung Selatan
3. Pengembangan Kawasan Industri Mesuji
4. Pengembangan Kawasan Industri Sulusuban di Lampung Tengah
5. Pengembangan Kawasan Industri Way Kanan
6. Pengembangan Kawasan Industri Tulang Bawang Barat
7. Pengembangan Kawasan Industri Tulang Bawang
8. Pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL II) di Lampung Selatan
9. Pengembangan Kawasan Industri Ketibung di Lampung Selatan

Sembilan pengembangan industri tersebut merupakan strategi pengembangan daerah dengan pendekatan spasial. Salah satu program dan kegiatan prioritas pembangunan industri di Provinsi Lampung yakni mengembangkan industri pengolahan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menyerap banyak tenaga kerja, memperbaiki distribusi pendapatan (RPJMD Provinsi

Lampung, 2019-2024). Kebijakan tersebut diharapkan dapat membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah.

Salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan industri yakni terdapat pemusatan industri. Pola pemusatan terjadi karena adanya kumpulan jenis industri pada suatu wilayah tertentu, sehingga mengakibatkan timbulnya keuntungan eksternal yaitu aglomerasi. Terjadinya konsentrasi atau pemusatan kegiatan ekonomi di daerah-daerah setempat menghasilkan manfaat ekonomi yang disebut sebagai ekonomi aglomerasi. Malik (2020) mengatakan kawasan aglomerasi Kota Bandar Lampung memiliki keterkaitan dengan beberapa daerah lainnya yakni Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Pringsewu dan Pesawaran. Selama kurun waktu sembilan tahun terakhir (2010-2019) capaian pertumbuhan populasi yang terjadi di kawasan aglomerasi Kota Bandar Lampung yakni sebesar 300.000 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan populasi yang cukup tinggi di kawasan aglomerasi ini yang dapat memberikan dampak positif dan juga negatif pada masa depan kawasan aglomerasi. Penambahan populasi tersebut menunjukkan terjadinya *urban sprawl* di mana kawasan wujud fisik perkotaan semakin melebar dan memiliki kepadatan yang cenderung rata. Dua kota dan tiga kabupaten tersebut tumbuh bersama dan mereka memiliki ketergantungan satu sama lain. Ketergantungan ini dapat memberikan manfaat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi wilayah. Sehingga setiap kota dan kabupaten yang ada dalam kawasan aglomerasi ini memiliki spesialisasi tersendiri yang dapat menopang kebutuhan daerah lain disekitarnya.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Aglomerasi sektor industri pengolahan di Provinsi Lampung tahun 2012-2020 dengan pendekatan tenaga kerja sektor industri pengolahan secara keseluruhan memperlihatkan kategori lemah.
2. Pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung menunjukkan pertumbuhan ekonomi cepat dan berdaya saing kuat (Kab. Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Tanggamus, Pesawaran, dan Pesisir Barat), serta pertumbuhan ekonomi cepat namun berdaya saing lemah (Kota B. Lampung, Kota Metro, Kab. Lampung Selatan, Lampung Timur, Way Kanan, dan Pringsewu).

Ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung menunjukkan ketimpangan rendah dengan indeks *williamson* rata-rata sebesar 0,265 dengan kontribusi ketimpangan pendapatan terendah yakni pada Kabupaten Pesisir Barat 1,76 persen dan kontribusi terbesar yakni Kabupaten Lampung Tengah sebesar 15,67 persen.

3. Hubungan sektor aglomerasi sektor industri pengolahan ( $X_1$ ) dengan nilai tambah sektor industri pengolahan ( $X_4$ ) tidak memiliki hubungan yang erat. Sedangkan hubungan sektor aglomerasi sektor industri pengolahan ( $X_1$ ) dengan urbanisasi penduduk ( $X_5$ ) memiliki kategori pada tingkat hubungan sedang.
4. Secara langsung aglomerasi sektor industri pengolahan memiliki pengaruh lemah terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung dan



pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Secara tidak langsung aglomerasi sektor industri pengolahan yang melalui variabel perantara memiliki pengaruh yang lemah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

## 6.1 Saran

1. Diharapkan bagi pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah di 15 kabupaten/kota Provinsi Lampung untuk meningkatkan ekonomi daerah dari berbagai sektor potensial seperti sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; dan sektor konstruksi yang memiliki daya saing kuat terhadap pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah walaupun bukan merupakan sektor unggulan daerah.
2. Pemerataan pembangunan seperti terbangunnya pabrik-pabrik industri pengolahan pada daerah-daerah penghasil bahan baku dapat dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung dan Dinas Perindustrian serta Perdagangan di 15 kabupaten/kota Provinsi Lampung yang kedepannya dapat menciptakan keuntungan aglomerasi bagi masyarakat setempat dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan terbukanya lapangan kerja industri.
3. Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang menjadi keterbatasan penelitian. Keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Penggunaan data pada penelitian ini hanya menggunakan data secara keseluruhan untuk tenaga kerja di sektor industri pengolahan, sedangkan pada sektor industri pengolahan memiliki sub-sub industri pengolahan.
  - b. Pendekatan analisis aglomerasi yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan pendekatan di sektor tenaga kerja sektor industri pengolahan.
  - c. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggambarkan kekuatan aglomerasi di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung, sedangkan untuk

aglomerasi sektor industri pengolahan dapat dilihat spesialisasi pada masing-masing sub sektor industri pengolahan

Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian tersebut, oleh karena itu perlu adanya kajian lebih dengan memperhatikan dan menggunakan data-data secara rinci khususnya pada data tenaga kerja yang ada pada sub-sub industri di sektor industri pengolahan, sehingga akan memperoleh hasil kekuatan aglomerasi dan menghasilkan spesialisasi industri. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi penelitian selanjutnya antara lain melakukan analisis aglomerasi sektor industri pengolahan dengan menggunakan pendekatan masing-masing sub-sub di sektor industri pengolahan menggunakan pendekatan tenaga kerja atau dapat menggunakan nilai tambah sektor industri pengolahan (PDRB). Analisis yang dapat digunakan lainnya yakni penggunaan indeks *Herfindahl* dan *Ellison-Glaeser*. Kedua pendekatan pengukuran tersebut dapat memperlihatkan konsentrasi spasial di sektor industri baik menggunakan tenaga kerja di sektor industri pengolahan ataupun menggunakan pendekatan nilai tambah sektor industri pengolahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelman, I and Morris, C T. (1973). *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*. Stanford University Press: California.
- Adisasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan dan Pertumbuhan Wilayah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Affandi, M.I. (2009). Peran Agroindustri Dalam Perekonomian Wilayah di Provinsi Lampung: Analisis Keterkaitan Antarsektor dan Aglomerasi Industri. *Disertasi*, Institute Pertanian Bogor: Bogor.
- Agustina, B Y., dan Lubis, A F. (2019). Pengaruh Aglomerasi Dan Hubungan Vertikal Industri Terhadap Produktivitas Industri Di Indonesia. *Manajemen Industri dan Logistik*, 3 (1): 23-42. DOI: 10.30988/jmil.v3i1.71. [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Ajija, S R et al.,. (2011). *Cara-cara Menguasai Eviews*. Salemba Empat: Jakarta.
- Amalia, V.V, Josep, B.K, dan Kres, D.T. (2021). Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi Dan Sektor Potensial Kabupaten Pringsewu Periode 2015-2019. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(4): 44-56. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/36442/33913>. [Diakses pada 8 Desember 2021].
- Amalina, D H dan Asmara, A. (2009). Keterkaitan Antar Sektor Pertanian Dan Industri Pengolahan di Indonesia. *Agribisnis dan Ekonomi Pertanian*, 3(2): 69-80. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalagribisnis/article/view/17084/12383>. [Diakses pada 15 Mei 2021].
- Anas, M.A. (2015). Peranan Sektor Industri Pengolahan Dalam Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Dengan Pendekatan Analisis Input Output. *Economics Development Analysis*, 4 (3): 282-291. <https://doi.org/10.15294/edaj.v4i3.1>. Diakses pada 7 Desember 2021.
- Anshori, L. (2021). Analisis Pengaruh Aglomerasi, Urbanisasi, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmiah*, 2(2) : 1-15. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Antika, U. (2015). Ketimpangan Pendapatan Perkapita Di Pulau Sumatera Tahun 2003-2013. *Jom FEKON*, 2(1): 1-11.

- Aprilia W, Sudarti, dan Hadi S. (2016). Analisis Ketimpangan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Ekonomi Pembangunan*, 14 (2): 178-188.  
<https://media.neliti.com/media/publications/71636-ID-analisis-ketimpangan-penyerapan-tenaga-k.pdf>. [Diakses pada 30 November 2021].
- Arsyad L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Ekonomi Pembangunan*. STIE YKPN: Yogyakarta.
- Atmarasydah, L. (2017). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Aglomerasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang.
- Awasthi, S. (2021). Hyper-Urbanisation and Migration: A Security Threat. *Cities*, 108.doi:10.1016/j.cities.2020.102965.
- Ayu, D, F., Riani, W., dan Haviz, M. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2016 . *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 5(1): 214-220.  
<https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/16016>.
- Aziz, N.N.A., Hassan, W.H.A.W, and Saud, N. (2012). The Effect of Urbanization Towards Social and Cultural Change Among Malaysian Settlers in the Federal Land Development Schemens (FELDA), Johor Darul Takzim. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, (68),pp.910-920.
- Badan Informasi Geospasial. (2021). *Peta Administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung*. Jakarta. <https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web>.
- Badan Litbang dan Pengendalian. (2019). *Informasi dan Profil Daerah Kabupaten Pesisir Barat 2019*. Pesisir Barat: Krui.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Selatan. (2011). *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan 2011-2031*. Kabupaten Lampung Selatan: Kalianda.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Timur. (2016). *Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur tahun 2016-2021*. Kabupaten Lampung Timur: Kotabumi.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lampung Utara. (2017). *Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya*. Kabupaten Lampung Utara: Sukadana.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pesawaran. (2010). *Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran tahun 2010-2015*. Kabupaten Pesawaran: Pesawaran.

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pesisir Barat. (2015). *Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Barat*. Kabupaten Pesisir Barat: Krui.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanggamus. (2011). *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus tahun 2011-2031*. Kabupaten Tanggamus: Tanggamus.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tulang Bawang. (2012). *Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulang Bawang 2012-2032*. Kabupaten Tulang Bawang: Menggala.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Way Kanan. (2020). *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2030*. Kabupaten Way Kanan: Blambangan Umpu.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mesuji. 2019. *Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah RPI2JM) Kabupaten Mesuji tahun 2019-2023*. Kabupaten Mesuji: Mesuji.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung. (2009). *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung tahun 2009-2029*. Provinsi Lampung: Bandar Lampung.
- 
- \_\_\_\_\_ . (2017). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW Provinsi Lampung 2009-2029*. Provinsi Lampung: Bandar Lampung.
- 
- \_\_\_\_\_ . (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2019-2024*. Provinsi Lampung: Bandar Lampung.
- 
- \_\_\_\_\_ . (2021). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2021*. 2021. Bandar Lampung.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN ) Tahun 2020-2024*. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia 2020*. Badan Pusat Statistik: Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2019). *Hasil Panen Unggulan Provinsi Lampung*. Bandar Lampung.
- 
- \_\_\_\_\_ . (2019). *Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Lampung*. Provinsi Lampung: Bandar Lampung.

- \_\_\_\_\_. (2019). *Serapan Tenaga Kerja Di Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Dan Sektor Industri Pengolahan Tiga Tahun Terakhir (2017-2019)*. Bandar Lampung.
- \_\_\_\_\_. (2020). *Kontribusi PDRB Provinsi Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016 – 2019 Per Kabupaten/Kota*. Bandar Lampung.
- \_\_\_\_\_. (2020). *Peranan/Share Sektor Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan Serta Sektor Industri Pengolahan Per Kabupaten di Provinsi Lampung (2017-2019)*. Bandar Lampung.
- \_\_\_\_\_. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2012-2020*. Bandar Lampung.
- Balai Riset dan Standardisasi Industri Bandar Lampung. (2020). *Strategi Industrialisasi Daerah T.A 2020-2024*. Provinsi Lampung: Bandar Lampung.
- Baldwin, R. E. (1986). *Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi, Terjemahan St Dianjung*. PT Bina Aksara: Jakarta.
- Bank Indonesia Publikasi. (2021). *Laporan Ekonomi Provinsi Lampung*. Provinsi Lampung: Bandar Lampung.
- Basuki, A T dan Immanudin, Y. (2015). *Ekonometrika: Teori dan*. Mitra Pustaka Matani: Yogyakarta.
- Basuki, A.T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan Eviews)*. Katalog Dalam Terbitan (KDT): Yogyakarta.
- Bintarto, R. (1987). *Urbanisasi dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Bloom. D E, David C, dan Jocelyn F F. (2008). *Population Aging and Economic Growth in Asia*. University of Chicago Press.  
<http://www.nber.org/chapters/c8148>.
- Bonet, J. (2006). Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities: Evidence from The Colombian Experience. *Ann Reg Sci*, 40:661-676. Urbana: University of Illinois.  
<http://www.springerlink.com/content/36595348343m6660/fulltext.pdf>.
- Bradley, R dan Gans, J S. (1996). Growth in Australian Cities The Economic Record. *The Economic Society of Australia*, 74 (226).  
<https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1998.tb01923.x>. [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Bugis, M. (2011). Nalisis Struktur Dan Pola Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Seram Bagian Timur. *Jurnal Inflasi*, 2(1): 1-18.

[https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_paperinfo\\_Ink.php?id=798](https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_paperinfo_Ink.php?id=798). [Diakses pada 28 November 2021].

- Capello, R. (2007). *Regional Economics*. Routledge: New York.
- Cohen, J. P. (2005). Agglomeration Economies and Industry Location Decisions: The Impacts of Spatial and Industrial Spillovers. *Regional Science and Urban Economics*, 35(3):215-237. DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2004.04.005. [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Damayanti, L. (2017). Analisis Dampak Aglomerasi Terhadap Ketimpangan Regional Pulau Jawa. *Jurnal Ilmiah*, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4180>. [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Darnilawati. (2018). Strategi Kutup Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi*, 26(2): 138-150. <https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/download/6074/5588>. [Diakses pada 15 Juni 2021].
- Deichmann U, Kaiser K, Lall S, dan Shalizi Z. (2005). Agglomeration Transport and Regional Development in Indonesia. *World Bank Policy Research Working Paper 3477*, [https://www.researchgate.net/publication/23723029\\_Agglomeration\\_Transport\\_and\\_Regional\\_Development\\_in\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/23723029_Agglomeration_Transport_and_Regional_Development_in_Indonesia). [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Dekiawan, H dan Budi, A. (2017). Pendekatan Model Shift-Share Spasial Dinamis Dalam Penentuan Sektor Ekonomi Kompetitif. *Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI)*, 6 : 389-410. <http://fkbi.akuntansi.upi.edu/> [Diakses pada 28 November 2021].
- Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat. (2019). *Luas lahan pertanian Pesisir Barat 2019*. Kabupaten Pesisir Barat: Krui.
- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan. (2020). *Revisi Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Peternakan Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021*. Kabupaten Way Kanan: Blambangan Umpu.
- Edi, S. (2011). Analisis Kausalitas Aglomerasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan di Provinsi Jawa Timur. *Tesis*, Thesis. Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister Fakultas Ekonomi Universitas Jember 2021]. [https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/22460/gdlhub%201%20%28273%29\\_1\\_processed.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/22460/gdlhub%201%20%28273%29_1_processed.pdf?sequence=1&isAllowed=y). [Diakses pada 14 Maret].
- Eriyatno. (2011). *Membangun Ekonomi Komparatif: Strategi Meningkatkan Kemakmuran Nusa dan Resilensi Bangsa*. PT Gramedia Widia Sarana: Jakarta.

- Fadilah, N., Nuraini, I., dan Susilowati, D. (2017). Pengaruh Industri, Tenaga Kerja Industri Dan Pdrb Sektor Industri Terhadap Disparitas Pendapatan Antar Wilayah Provinsi Jawa Timur . *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4): 441-452. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6283>.
- Ferdiansyah, D. d. (2013). Pola Spasial Kegiatan Industri Unggulan di Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus: Subsektor Industri Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki). *TEKNIK POMITS*, 2 (1): 2337-3539. <https://media.neliti.com/media/publications/147555-ID-pola-spasial-kegiatan-industri-unggulan.pdf>. Diakses pada [15 Mei 2021].
- Geospasial. (2020). *Peta administrasi kabupaten/kota Provinsi Lampung*. Geospasial.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Glaeser, K. H. (1992). Growth in Cities. *Journal of Political Economy*, 100 (6). 1126- 1152. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/261856>. [Diakses pada 14 Maret].
- Gujarati, D N. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat: Jakarta.
- Hadijah, Z. (2020). Pengaruh Urbanisasi Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia. *Wilayah dan Lingkungan*, 8(3): 290-306. <http://dx.doi.org/10.14710/jwl.8.3.290-306>.
- Hajeri, Erlina, Y., dan Eva, D. (2015). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Kubu Raya. *Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(2): 253-269. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JJ/article/view/12485>. [Diakses pada 28 November 2021].
- Hanifah, S. (2021). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. *Tesis*, Universitas Andalas.
- Harahap, F.R. (2013). Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia. *Jurnal Society*, 1 (1): 35-45. <https://media.neliti.com/media/publications/130628-ID-dampak-urbanisasi-bagi-perkembangan-kota.pdf> [Diakses pada 30 November 2021].
- Harjana, L.I. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2100>.
- Hendarmin. (2017). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Modal Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EcceS*, 6 (2): 245-271.



<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/ecc/article/view/11186>.  
[Diakses pada 14 Maret 2021].

- Hirschman, A. (1958). *The Strategy of Economic Development in Developing Countries*. Yale University Press: New Haven, Connecticut, USA.
- Hutabarat, E. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah, dan PDRB Terhadap Kemiskinan (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002-2013). *Tesis*, <http://e-journal.uajy.ac.id/8944/>.
- Indrawati, T. (2021). Pengaruh Sektor Industri Pengolahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Journal of Economic*, 12 (1): 104-108.  
<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Eko/article/download/4086/pdf>.  
[Diakses pada 30 November 2021].
- Iqbal, M. (2015). *Regresi Data Panel (3) "Penggunaan Eviews 8"*. Perbanas Institute: Jakarta. <https://dosen.perbanas.id/regresi-data-panel-3-penggunaan-eviews-8/>.
- Jacobs, J. (1969). *Economy of Cities*. Vintage: New York.
- Jhingan, M. L. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Kementerian Pertanian. (2020). *Isu Strategis Sektor Industri Nasional. Kementerian Perindustrian*. Kementerian Pertanian: Jakarta.
- Khan, A. U., Saboor, A., Ali, I., Malik, W. S., & Mahmood, K. (2016). Urbanization of Multidimensional Poverty: Empirical Evidences From Pakistan. *Quality & Quantity*, 50: 439-469. Doi:10.1007/s11135-014-0157-x.
- Kolehmainen, J. (2002). Territorial Agglomeration as a Local Innovation Environment. *MIT Industrial Performance Centre, Working Paper No. 03002*. <http://web.mit.edu/lis/papers/LIS03-002.pdf>. [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga: Jakarta.
- Kuncoro, M. (2010). *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Erlangga: Jakarta.
- Kuncoro, M. (2002). *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. AMP YKPN: Yogyakarta.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Salemba: Jakarta.
- Kurniawan B dan Sugiyanto FX. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Share Sektor Industri dan Pertanian Serta Tingkat Jumlah Orang Yang Bekerja

- Terhadap Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2002-2010. *Diponegoro Journal Of Economics*, 2 (1): 1-14. <https://media.neliti.com/media/publications/19672-ID-pengaruh-pertumbuhan-ekonomi-share-sektor-industri-dan-pertanian-serta-tingkat-j.pdf>. [Diakses pada 30 November 2021].
- Kusumasari, A., dan Kartiasih, F. (2017). Aglomerasi Industri Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat 2010-2014. *Jurnal Aplikasi Statistik dan Komputasi Statistik*, 9 (2): 28-41. <https://jurnal.stis.ac.id/index.php/jurnalasks/article/view/143>. [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Landiyanto, E. A. (2005). Konsentrasi Spasial Industri Manufaktur Tinjauan Empiris di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 5(2):75-90. <https://www.neliti.com/id/publications/84434/konsentrasi-spasial-industri-manufaktur-tinjauan-empiris-di-kota-surabaya>. [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Latumaerissa J R. (2015). *Perekonomian Indonesia dan Dinamika Ekonomi Global*. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Malik, I. (2020). *Masa Depan Aglomerasi Bandar Lampung*. Kepala Pusat Studi Kota & Daerah Universitas Bandar Lampung (PSKD UBL): Bandar Lampung.
- Maparu, T.S., and Mazumder, T.N. (2017). Transportation Infrastructure, Economic Development and Urbanization in India (1990-2011): Is There Any Causal Relationship??. *Transportation Research Part A*, 100: 319-361.
- Markusen, A. (1996). Sticky places in slippery space: A Typologi of industrial districts. *Economic Geography*, 72 (3), 293,19. <https://doi.org/10.2307/144402>. [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Matondang, Z. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Desa Palopat Maria Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru. *Ihtiyath*, 2 (2): 255-270. [https://scholar.archive.org/work/yqqjpwcnff6temn5ae6ncpvsu/access/wa\\_yback/https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ihtiyath/article/download/715/452](https://scholar.archive.org/work/yqqjpwcnff6temn5ae6ncpvsu/access/wa_yback/https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ihtiyath/article/download/715/452). Diakses pada [30 Desember 2021].
- Mirdana I., Rosalina A.M.K., Jacline I.S. (2018). Analisis Potensi Daya Saing Sektor Ekonomi Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bitung. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5): 186-197.
- Mitchell, William, Jenny M, dan James, J. (2005). *Extending Shift-Share Analysis to Account for Spatial Effects: A Study Using Australian Census Data*. Centre of Full Employment and Equity: The University of New Castle.
- Mubyarto. (1995). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES: Jakarta. .

- Muta'ali, L. (2015). *Teknologi Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan*. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM: Yogyakarta. .
- Mutu'ali, L. (2015). *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM: Yogyakarta.
- Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Under-Development Regions*. G. Duckwort: London.
- Narayan, D. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction: A Source Book*. World Bank.
- Ningsih, E. S. (2010). Analisis Komoditi Unggulan Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo Sebelum dan Selama Otonomi Daerah. *Tesis*: Universitas Sebelas Maret, Surakarta: Jawa Tengah.
- Nora, S. (2016). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Periode 1981-2014). *Tesis*. Universitas Andalas.
- Novalia, N. (2015). Analisis Daya Saing Industri Agro Indonesia. *Tesis*. PPS Universitas Sriwijaya: Sumatera Selatan.
- Novita, U.D. (2010). Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kota Singkawang Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk Produk Domestik Regional Bruto ( Pdrb ). *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 1(1):1-23. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/3499/3537>. [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Nur'aidawati, S., dan Nurmasari, I. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Dan Pertumbuhan Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tangerang Selatan. *Prosiding Senantias*, 1(1): 107-116. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/8241>. [Diakses pada 30 November 2021].
- Nurlaili, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa Tahun 2013. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta. <https://eprints.uny.ac.id/30718/>.
- Nuryadin, D., dan Jamzani, S. (2007). Aglomerasi Dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 8(2): 117-129. <https://media.neliti.com/media/publications/77860-ID-aglomerasi-dan-pertumbuhan-ekonomi-peran.pdf>. [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Pangestuti, F W. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disparitas Pembangunan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*, Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Perroux, F. (1970). Economic Space: Theory And Applications . *Quarterly Journal of Economics*, 64: 89-104.
- Potro, B.S. (2011). Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Di Kabupaten Wonogiri. *Skripsi*, Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian: Universitas Negeri Surakarta.  
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/22932/NDgyMDc=/Peran-Sektor-Pertanian-Dalam-Perekonomian-Di-Kabupaten-Wonogiri-abstrak.pdf>. [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Prasetyo, R. B. (2010). Dampak Pembangunan Infrastruktur dan Aglomerasi Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia. *Tesis*, Institut Pertanian Bogor: Jawa Barat.
- Pratiwi, D dan Rahajeng, A. (2017). Analisis Pengaruh Aglomerasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015. *Tugas Akhir*, Program Studi Ekonomi Terapan, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi: Universitas Gajah Mada.  
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/114429>.
- Pravitasari, A. E. (2009). Dinamika Perubahan Disparitas Regional di Pulau Jawa sebelum dan Setelah Kebijakan Otonomi Daerah. *Tesis*. Institut Pertanian Bogor: Jawa Barat.
- Rastvortseva, S. (2017). Agglomeration Economica in Regions: The Case In The Russian Industry. *Journal Regional Science Inquiry* , IX, (2): 45-54, World Economy Department - National Research University Higher School of Economics, Russia.  
[https://www.researchgate.net/publication/321700224\\_Aglomeration\\_economics\\_in\\_regions\\_The\\_case\\_in\\_the\\_Russian\\_industry](https://www.researchgate.net/publication/321700224_Aglomeration_economics_in_regions_The_case_in_the_Russian_industry). [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Richardson, H. W. (2001). *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Robiani B,. (2005). Analisis Pengaruh Industrialisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 6 (1): 93-103.  
<https://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI/article/view/153>. [Diakses pada 30 November 2021].
- Rustiadi, E., Indraprahasta, GS., dan Mulya SP. (2021). *Teori Perencanaan Mahzab & Praktik Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. .
- Sadono, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Sakti, T. A. (2007). Analisis Aglomerasi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terkonsentrasinya Lembaga Pendidikan Tinggi di Pulau Jawa. *Ekonomi*

*dan Bisnis Indonesia*, 22 (1): 1-22.  
<https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/view/36982>.

- Salsabila, S P, Santosa, B, dan Soeharjoto. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aglomerasi Di Kabupaten Bandung Barat. *Media Ekonomi*, 27 (2): 133-140.  
<https://trijurnal.lmlit.trisakti.ac.id/medek/article/view/6260/5514>.  
 [Diakses pada 15 Mei 2021].
- Saputra, H dan Rahayu, S. (2015). Hubungan Tingkat Urbanisasi dan Tingkat Ketimpangan Di Daerah Pantura Jawa Tengah. *Teknik PWK*, 4 (4): 737-752. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/10218>.  
 [Diakses pada 30 November 2021].
- Sari, R M., Hidayat, J T., dan Yogie, M. (2017). Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, 1(1): 1-10. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik-Universitas Pakuan.  
<https://jom.unpak.ac.id/index.php/teknikpwk/article/download/679/621>.  
 [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Sbergami, F. (2002). *Agglomeration and Economic Growth: Some Puzzles*. Geneva Graduate Institute of Internasional Studies.
- Sholihah, D A., Soedwihajono, dan Kusumastuti. (2018). Dampak Perkembangan Aglomerasi Industri Gondangrejo, Karanganyar terhadap Perubahan Spasial. *Jurnal Region*, 13 (2): 115-132. DOI: 10.20961/region.v13i2.20960. [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Sidarta, Erdi, dan Dibyo P. (2004). Peranan Subsektor Ekonomi Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Regional di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. *Tesis*, Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- Sigalingging, A. (2002). Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Wilayah. *Tesis*, Universitas Diponegoro : Bandung.
- Sihombing, K. H. (2008). Pengaruh Aglomerasi, Modal, Tenaga Kerja, dan Kepadatan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Demak. *Skripsi*, Universitas Diponegoro.  
[https://repository.usd.ac.id/30552/2/111324020\\_full.pdf](https://repository.usd.ac.id/30552/2/111324020_full.pdf). [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional*. Baduouse Media: Padang.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Sodik dan Iskandar. (2017). Aglomerasi Dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, <https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/151>. [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Sudjana. (2003). *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi*. Transito: Bandung.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. CV. Alfabeta: Bandung .
- Sukirno, S. (2006). *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi ke – 3*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sukirno, S. (2000). *Ekonomi Pembangunan Proses Masalah dan Dasar Kebijakan Pembangunan*. UI Press: Jakarta.
- Suparta, I W., dan Pratama, A D. (2020). Hubungan Tenaga Kerja,Rumah Tangga Dan Produksi Perikanan Dalam Aglomerasi Industri Di Kabupaten Tanggamus. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9 (3): 126-137. DOI: <http://doi.org/10.23960/jep.v9i3.99>. [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Susanto, E. (2018). Analisis Kategori Unggulan Pada Sistem Agribisnis Dan Perkembangan Ekonomi Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. *Tesis, Program Pascasarjana Magister Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bandar Lampung*.
- Sutawijaya, A. (2004). Analisis Tingkat Pertumbuhan Dan Disparitas Antar Daerah Pada Era Otonomi Daerah. *Skripsi*, Universitas Terbuka. [http://repository.ut.ac.id/2281/1/adrian\\_sutawijaya.pdf](http://repository.ut.ac.id/2281/1/adrian_sutawijaya.pdf). [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Tambunan. (2001). *Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang : Kasus Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Tarigan, R. (2005). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Tarigan, R. (2007). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi Cetakan Ke Empat*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Tarigan, R. (2004). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Todaro dan Smith . (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Erlangga: Jakarta.
- Todaro, M P., dan Smith, S C. (2006). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan*. Erlangga: Jakarta.
- Todaro, M. P. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*. Erlangga: Jakarta.

- Toton. (2017). Analisis Typologi Klassen Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung. *Tesis*. Universitas Bandar Lampung Ekonomi Bisnis: Bandar Lampung.
- Turok, I., and Granahan, Mc.G. (2013). Urbanization and Economic Growth: The Arguments and Evidence for Africa and Asia. *Environment and Urbanization*, 25 (2): 465-482. doi:10.1177/0956247813490908.[Diakses pada 30 November 2021].
- Verbeek, M. (2000). *A Guide to Modern Econometrics*. John Wiley & Sons, Ltd: Baffins Lane-Chichester.
- Wahyuntari, L I dan Pujianti, A. (2016). Disparitas Pembangunan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis* , 5(3): 194-199.
- Wibisono, Y. (2005). *Modul Pelatihan Ekonometrika Dasar*. Lab. Ilmu Ekonomi FE-UI: Depok.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi Kedua*. FE Universitas Islam: Yogyakarta.
- Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Ekonisia FE UII: Yogyakarta.
- Widodo, T. (2006). *Perencanaan Pembangunan*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Wie, T. K. (1981). *Pemerataan Kemiskinan Ketimpangan*. Sinar Harapan: Jakarta.
- Wijayanto, A.T. (2016). Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000-2010. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16 (2): 418-428.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/12569/12141>. [Diakses pada 30 November 2021].
- Winardi dan Kustanto, H. (2018). Multiplier Efek Peningkatan Investasi Sektor Industri Pengolahan Di Kawasan Industri Terhadap Kinerja Sektor Pengangkutan/Logistik. *Manajemen Industri dan Logistik*, 2(2): 27-134. DOI: <https://doi.org/10.30988/jmil.v2i2.33>. [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Winarno, W W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, Edisi Empat*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
- World Bank. (2018). *Urbanization for All (Indonesia)*. World Bank. Retrieved from World Bank website:  
<https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-september-2018>.
- Yenny, N.F., dan Anwar, K. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Lhokseumawe. *Ekonomika Unimal*,

- 10(2):26-31. [http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi\\_regional](http://ojs.unimal.ac.id/index.php/ekonomi_regional). [Diakses pada 30 November 2021].
- Yuliani, A. (2014). Pengaruh Sektor Transportasi dan Perekonomian Provinsi Lampung. *Warta Penelitian Perhubungan*, 26(9): 501-508. DOI:10.25104/warlit.v26i9.926. [Diakses pada 28 November 2021].
- Yunan, Z.Y. (2011). Analisis Sektor Unggulan Kota Bandar Lampung. *Procciding Seminas Competitive Advantage*, 1(1): 1-6. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/seminas/article/view/41>. [Diakses pada 28 November 2021].
- Yusica, L V., Malik, N., dan Arifin, Z. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2 (2): 230-240. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/view/6982>. [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Zhang, X. Q. (2016). The Trends, Promises And Challenges of Urbanisation In The World. *Habitat International*, 54(3), 241–252. doi:10.1016/j.habitatint.2015.11.018. [Diakses pada 14 Maret 2021].
- Zuliasri, F., Rindayati, W., dan Asmara, A. (2013). Analisis Faktor Yang Memengaruhi Aglomerasi Industri Unggulan Daerah Dan Hubungannya Dengan Daya Saing Industri Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 2 (2): 113-134. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jekp/article/view/19946>. [Diakses pada 14 Maret 2021].